



**LAPORAN AKTUALISASI  
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III  
ANGKATAN 1 TAHUN 2018**

**OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT YANG  
KOMPREHENSIF PADA SIKLUS PEMBICARAAN  
PENDAHULUAN RAPBN 2019 DAN  
SIKLUS APBN INDUK 2019**

Oleh :

**EKO ADITYO ANANTO, S.E.**

**NIP. 198808102018031001**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

### LAPORAN HASIL AKTUALISASI

### “OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT

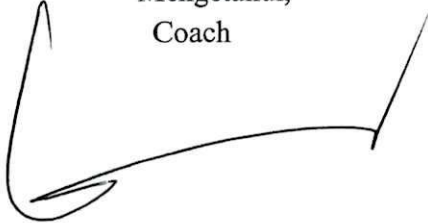
### SIKLUS PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN 2019 DAN

### SIKLUS APBN INDUK 2019”

Nama : Eko Adityo Ananto, S.E.  
NIP : 198808102018031001  
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama  
Instansi : Pusat Kajian Anggaran

Cisarua, 2 Oktober 2018

Mengetahui,  
Coach



Bambang Wiyoso, S.T., MM.Si.  
NIP.197204112005011001

Menyetujui,  
Mentor



Rastri Paramita, S.E., M.M.  
NIP.198001262014022002



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang mana atas bimbingannya maka penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS dan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai salah satu prasyarat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan Aktualisasi ini dapat diselesaikan karena tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran;
2. Bapak Drs. Helmizar, M.E., selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
3. Bapak Mardi Harjo, S.E., M.Si., selaku Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
4. Bapak Bambang Wiyoso, S.T., MM.Si., selaku *coach* PNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI;
5. Ibu Rastri Paramita, S.E., M.M, selaku mentor kegiatan Aktualisasi Diklatsar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI;
6. Bapak Dr.Sapto Harsoyo, Ibu Dr. Intan Ratnawati dan Rizky Rahmayanti selaku ayah, ibu dan adik atas doa dan dukungannya selama ini.

Laporan ini menyajikan dokumentasi atas proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis sebagai Calon Analis APBN Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi penyusunan ARC untuk Pusat Kajian Anggaran dalam memberikan dukungan substansi untuk Banggar.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Jakarta, 30 September 2018**

**Eko Adityo Ananto, S.E.**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang	1
B Visi dan Misi Pusat Kajian Anggaran	2
C Tugas Poko dan Fungsi Jabatan Analis APBN Ahli Pertama	3
<b>II RANCANGAN AKTUALISASI</b>	<b>4</b>
A Deskripsi Isu	4
B Pemilihan Isu Prioritas	5
C Pemilihan Gagasan Prioritas	6
D Matriks Rancangan Aktualisasi	7
E Potensi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	15
F Jadwal Kegiatan Aktualisasi	15
<b>III CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASASI</b>	<b>16</b>
A Gambaran Umum dan Catatan Perubahan	16
B Matriks Pelaksanaan Aktualisasi	18
<b>IV PENUTUP</b>	<b>33</b>
A Kesimpulan	33
B Saran	34
C Rencana Tindak Lanjut	34
<b>LAMPIRAN</b>	<b>35</b>

## **BAGIAN I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam menjalankan fungsinya terutama terkait fungsi anggaran, maka dibentuklah Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu unit supporting system di bawah Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Kajian Anggaran dahulu merupakan bagian dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang berada di bawah Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan. Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung dan dikeluarkannya Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI maka Pusat Kajian Anggaran resmi dibentuk. Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang perancangan APBN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran;
- h. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

## **B. VISI DAN MISI PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

### **Visi**

”Menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel”

**Pusat Kajian Anggaran yang profesional** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

**Pusat Kajian Anggaran yang andal** mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

**Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

### **Misi**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan.
- c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.



### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN ANALIS APBN AHLI PERTAMA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD sebagai anggota;
- b. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalan data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim;
- c. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC), secara individual, sebagai anggota atau ketua tim;
- d. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC.

## **BAGIAN II**

### **RANCANGAN AKTUALISASI**

#### **A. DESKRIPSI ISU**

##### **I. Isu: Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk**

###### **➤ Deskripsi**

Salah satu tuntutan atau harapan dari “*user*” Pusat Kajian Anggaran yaitu Pimpinan DPR adalah Analisis Ringkas Cepat (ARC) yang sangat diperlukan dalam pembahasan RAPBN tahun berikutnya. Penyusunan ARC biasanya dilakukan berdasarkan permintaan anggota atau alat kelengkapan dewan (AKD). Namun pada tahun ini, ARC akan dibuat selain berdasarkan permintaan juga menjadi inisiatif Pusat Kajian Anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran baik untuk Pimpinan DPR serta Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) agar lebih optimal dalam melaksanakan fungsinya. Selama ini, ARC yang disajikan oleh Pusat Kajian Anggaran lebih bersifat sebagai penyajian data secara mentah dan belum memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif. Dalam waktu dekat ini, pemerintah bersama DPR akan membahas siklus pendahuluan pembicaraan RAPBN 2019 beserta siklus APBN induk 2019, tentu dalam waktu yang sangat terbatas Pusat Kajian Anggaran harus dapat menyajikan analisis yang akurat dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang anggaran khususnya untuk Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Banggar.

###### **➤ Dampak Apabila Tidak Tertangani**

Apabila isu tersebut tidak tertangani maka akan berdampak pada :

- a. Dukungan Pusat Kajian Anggaran kepada *stakeholder* belum optimal ;
- b. Substansi analisis yang tidak komprehensif.

##### **II. Belum Banyak AKD Yang Memanfaatkan Dukungan Substansi Dari Pusat Kajian Anggaran**

###### **➤ Deskripsi**

Sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran di atas, Pusat Kajian Anggaran mempunyai tugas sebagai *supporting system* bagi Dewan khususnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam hal pertimbangan penyusunan dan penetapan APBN. Namun, dalam realisasinya sejak keberadaan Pusat Kajian Anggaran ditetapkan dalam Persekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 299, kehadirannya belum mampu menjawab kebutuhan Dewan sebagai *supporting system* dalam hal memberikan

pertimbangan penyusunan dan penetapan APBN. Dari keseluruhan AKD yang ada, hanya Komisi V dan IX yang pernah menggunakan analisis dari Pusat Kajian Anggaran. Hal tersebut disebabkan sosialisasi dan koordinasi yang belum optimal dari Pusat Kajian Anggaran Alat Kelengkapan Dewan. Untuk itulah, dalam Rancangan Aktualisasi ini akan dilakukan upaya perubahan untuk meningkatkan perhatian atau *awareness* AKD sebagai “*stakeholder*” dari Pusat Kajian Anggaran.

➤ **Dampak Apabila Tidak Tertangani :**

- a. Kurang optimalnya dukungan substansi yang diberikan Pusat Kajian Anggaran;
- b. *Output* yang diberikan kepada AKD kurang komprehensif.

### III. Belum Memadainya Kenyamanan Ruang Kerja

➤ **Deskripsi**

Berdasarkan Laporan Sistem Manajemen Mutu yang ada di *website* Pusat Kajian Anggaran, salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian adalah kenyamanan ruang kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari belum meratanya ketersediaan *Personal Computer* (PC) di meja kerja Analis APBN.

➤ **Dampak Apabila Tidak Tertangani :**

Apabila isu tersebut tidak tertangani, maka kinerja Analis APBN kurang optimal dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya.

## B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

**Tabel 2.1**  
**Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG**

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk	5	4	5	14
2	Belum Banyak AKD Yang Memanfaatkan Dukungan Substansi Dari Pusat Kajian Anggaran	4	5	5	13
3	Belum Memadainya Kenyamanan Ruang Kerja	2	3	2	7

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah Isu ke 1 :

**Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk.**



### C. PEMILIHAN GAGASAN PRIORITAS

**Tabel 2.2**  
**Matrik Pemilihan Gagasan Prioritas dengan Analisis USG**

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Penyusunan Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan Siklus APBN Induk 2019 Yang Komprehensif Dengan Prinsip <i>Plan Do Check Act</i> Secara Seksama Di Pusat Kajian Anggaran.	5	4	5	14
2	Penyusunan Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan Siklus APBN Induk 2019 Dengan Kolaborasi Bersama Konsultan Riset Ekonomi	4	3	2	9
3	Penyusunan Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan Siklus APBN Induk 2019 Dengan Kolaborasi Bersama Perguruan Tinggi	2	3	2	7

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka Gagasan yang dipilih adalah Gagasan ke 1 : **Penyusunan Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan Siklus APBN Induk 2019 Yang Komprehensif Dengan Prinsip *Plan Do Check Act*.**

#### D. MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

**Unit Kerja** : Pusat Kajian Anggaran

**Identifikasi Isu** : 1. Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk  
2. Belum Banyak AKD Yang Memanfaatkan Dukungan Substansi Dari Pusat Kajian Anggaran  
3. Belum Memadainya Kenyamanan Ruang Kerja

**Isu yang Diangkat** : **Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk**

**Gagasan Pemecahan Isu** : **Penyusunan Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan Siklus APBN Induk 2019 Yang Komprehensif Dengan Prinsip *Plan Do Check Act* Secara Seksama Di Pusat Kajian Anggaran**

**Tabel 2.3**  
**Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS**

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output /Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mencari referensi dari analisis terdahulu;</li><li>- Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor;</li><li>- Berdiskusi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Draft</i> format analisis;</li><li>- Notulensi diskusi/rapat;</li><li>- Surat persetujuan/disposisi dari Kapus.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan melakukan perencanaan yang matang dan seksama</li></ul>	Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan visi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yaitu "Pusat Kajian Anggaran yang andal". Maknanya	Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dari nilai <b>Akuntabel</b> dengan persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawab

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output /Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<b>(Komitmen Mutu);</b> - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor dan Atasan ( <b>Etika Publik</b> ); - Sebagai langkah awal dalam mempertanggungjawabkan kualitas kajian ( <b>Akuntabilitas</b> )	adalah bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.	kan dengan baik. Selain itu, langkah tersebut juga mendorong peningkatan nilai <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan kesungguhan untuk menjalankan peran dan fungsi dengan sebaik-baiknya.
2	Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)	- Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; - Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN yang lain.	- <i>Database</i> referensi; - Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis.	- Keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan penguatan teori yang dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> );	Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan salah satu visi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yaitu “Pusat Kajian Anggaran yang andal”. Maknanya adalah bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi,	Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dari perwujudan nilai <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu,



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output /Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				- Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).	dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.	langkah tersebut juga mendorong peningkatan nilai <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan kesungguhan untuk menjalankan peran dan fungsi dari jabatan yang diemban dengan sebaik-baiknya.
3	Melakukan Pengumpulan Data (Do)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 di Banggar/Komisi ;</li> <li>- Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen data terkait indikator asumsi ekonomi makro yang dibicarakan pemerintah dan DPR;</li> <li>- Dokumen data pembandingan dari sumber lain (opsional).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan data secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias (<b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b>);</li> <li>- Koordinasi dan kerjasama dengan Sekretariat Badan</li> </ul>	Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan visi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yaitu “Pusat Kajian Anggaran yang andal”. Maksudnya adalah bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta	Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dari perwujudan nilai <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, langkah tersebut juga

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output /Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p>Banggar untuk ARC siklus APBN Induk 2019 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari data pembandingan dari sumber lain (opsional) ;</li> <li>- Berkoordinasi dengan Mentor.</li> </ul>		<p>Anggaran (<i>Whole of Government</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan (<b>Etika Publik</b>).</li> </ul>	dapat diimplementasikan.	<p>mendorong peningkatan nilai <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan kesungguhan untuk menjalankan peran dan fungsi dari jabatan yang diemban dengan sebaik-baiknya.</p>
4	Melakukan Olah Data (Do)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi dan verifikasi data;</li> <li>- Melakukan olah data dengan aplikasi pengolahan data;</li> <li>- Berkonsultasi dengan mentor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi dalam bentuk excel;</li> <li>- Kertas kerja hasil pengolahan data dari semua indikator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan data yang dilakukan secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias (<b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b>);</li> <li>- Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan (<b>Etika Publik</b>).</li> </ul>	Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan visi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yaitu “Pusat Kajian Anggaran yang andal”. Maknanya adalah bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang	Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dari perwujudan nilai <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, langkah tersebut juga mendorong



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output /Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					akan dicapai serta dapat diimplementasikan.	peningkatan nilai <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan kesungguhan untuk menjalankan peran dan fungsi.
5	Melakukan Analisis (Do)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori tersebut;</li> <li>- Merancang infografis;</li> <li>- Berkonsultasi dengan mentor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Draft</i> analisis sementara;</li> <li>- Rancangan infografis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias (<b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b>);</li> <li>- Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan (<b>Etika Publik</b>).</li> </ul>	Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan visi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yaitu “Pusat Kajian Anggaran yang andal”. Maknanya adalah bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.	Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dari perwujudan nilai <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, langkah tersebut juga mendorong peningkatan nilai <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan kesungguhan untuk menjalankan peran dan fungsi dari

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output /Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						jabatan yang diemban dengan sebaik-baiknya.
6	Evaluasi dan Koreksi (Check)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengirimkan <i>draft</i> analisis sementara kepada Koordinator Bidang Asumsi Ekonomi Makro/Mentor;</li> <li>- Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis;</li> <li>- Melakukan koreksi bersama-sama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil analisis final;</li> <li>- Notulensi rapat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian mutu agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan (<b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b>);</li> <li>- Konsultasi dan harmonisasi hasil kajian dengan Korbid beserta Analisis APBN yang lain (<b>Etika Publik</b>).</li> </ul>	<p>Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan visi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yaitu “Pusat Kajian Anggaran yang andal”. Maknanya adalah bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.</p>	<p>Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dari perwujudan nilai <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pengendalian mutu agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.</p> <p>Selain itu, langkah tersebut juga mendorong peningkatan nilai <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan kesungguhan untuk menjalankan peran</p>



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output /Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						dan fungsi dari jabatan yang diemban dengan sebaik-baiknya.
7	Finalisasi Analisis (Act)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyerahkan hasil analisis final kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>- Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen;</li> <li>- Upload hasil ARC di <i>website</i>;</li> <li>- Membuat <i>form feedback</i> kepada Pimpinan Banggar sebagai langkah evaluasi untuk kedepannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Analisis Ringkas Cepat (ARC) Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan siklus APBN induk dengan isu yang ada di luar rapat Banggar (target 10 dokumen);</li> <li>- <i>Softfile</i> Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke <i>website</i>;</li> <li>- <i>Form Feedback</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian mutu agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dan feedback untuk mengetahui kepuasan <i>user</i> (<b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b>);</li> <li>- Konsultasi dan harmonisasi hasil kajian dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran (<b>Etika Publik</b>);</li> </ul>	Diharapkan melalui kegiatan ini, akan mendorong tercapainya visi “Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel”. Maknanya adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam mendukung fungsi anggaran DPR RI.	<p>Kegiatan tersebut merupakan upaya konkret dari perwujudan nilai <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pengendalian mutu agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.</p> <p>Selain itu, langkah tersebut juga mendorong peningkatan nilai <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan kesungguhan untuk</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output /Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				- Upload hasil ARC di website (Pelayanan Publik).		menjalankan peran dan fungsi dari jabatan yang diemban dengan sebaik-baiknya.

E. POTENSI KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI

Dalam pelaksanaan kegiatan “Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat Siklus Pendahuluan Dalam RAPBN 2019” kendala atau hambatan yang akan ditemui adalah :

- 1. Waktu yang cukup terbatas karena ada libur dan cuti bersama sehingga harus ada sinkronisasi dan koordinasi jadwal sejak jauh-jauh hari;
- 2. Pengumpulan dan olah data dilakukan dengan tenggat waktu yang terbatas;
- 3. Koordinasi yang belum optimal dengan Sekretariat AKD (Banggar/Komisi);
- 4. Waktu rapat yang kadang tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat.

F. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 2.4  
Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		IV	I	II	III	IV	I	II	*III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)																	
2.	Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)																	
3.	Melakukan Pengumpulan Data (Do)																	
4.	Melakukan Olah Data (Do)																	
5.	Melakukan Analisis (Do)																	
6.	Evaluasi dan koreksi (Check)																	
7.	Finaliasi Analisis (Act)																	

Keterangan:

- \*) Setelah finalisasi ARC Siklus Pendahuluan RAPBN 2019, pada minggu ke III bulan Juli 2018 akan dilanjutkan dengan menyusun ARC untuk pembahasan pada siklus APBN Induk/RAPBN 2019 yang akan difinalisasi pada minggu ke IV bulan September 2018
- Libur Hari Raya Idul Fitri 1439 H
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan



### BAGIAN III

#### CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASASI

#### A. GAMBARAN UMUM DAN CATATAN PERUBAHAN

Kegiatan aktualisasi penyusunan ARC dengan konsep Plan Do Check Act (PDCA) dimulai pada tanggal 27 Mei-27 September 2018 dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan siklus APBN yaitu siklus pembicaraan pendahuluan dan siklus APBN Induk. Untuk ARC siklus pembicaraan pendahuluan, yang terselesaikan adalah 3 dokumen sedangkan ARC siklus APBN Induk adalah 4 dokumen sehingga jumlah keseluruhan output akhir adalah 7 dokumen. Berikut adalah ARC pada masing-masing siklus:

**Tabel 3.1**  
**Daftar ARC Pada Tiap Siklus Pembahasan APBN**

No	Siklus Pembicaraan Pendahuluan	No	Siklus APBN Induk
1	Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019	1	Fokus Pada Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Sumber Devisa
2	Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah.	2	Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas
3	Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Petani	3	Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel
		4	Analisis PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia

Sesuai rancangan yang telah ditetapkan sebanyak 7 kegiatan, jika terdapat 7 dokumen maka jumlah keseluruhan adalah 49 kegiatan. Penjabaran kegiatan di masing-masing penyusunan ARC akan dipaparkan pada bagian lampiran yang ada di dalam laporan ini beserta catatan dari Mentor. Selain itu karena ada output pada tahapan kegiatan yang tidak bisa dilampirkan dalam laporan ini karena ada file digital dan data rekaman maka akan diberikan tambahan dalam bentuk CD/DVDR. Sebagai informasi, karena ada beberapa kendala dan dinamika eksternal, terdapat sejumlah **tahapan kegiatan penting yang mengalami penyesuaian dan perubahan yaitu :**

- a. Pada kegiatan pengumpulan data (Do) di sub kegiatan mencatat hasil rapat antara Banggar dengan Kementerian/Lembaga, pihak Sekretariat Banggar tidak mengizinkan untuk hadir di ruang rapat. Hal tersebut menyulitkan dalam mendapatkan data rapat yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan ARC karena ARC yang disusun harus berdasarkan rapat Banggar. Untuk mengatasinya, pelaksana aktualisasi meminta bahan rapat dari Tenaga Ahli (TA) Banggar, menempatkan *recorder* atau mengunduh berita di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id);
- b. Pada kegiatan olah data (Do) di sub kegiatan olah data dengan aplikasi pengolah data diubah menjadi olah data excel sederhana hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan data yang tersedia tidak mendukung untuk diolah dengan aplikasi pengolah data;
- c. Pada kegiatan finalisasi (Act) di subkegiatan *form feedback* kepada Pimpinan Banggar diubah menjadi *form feedback* kepada Tenaga Ahli (TA) Banggar. Hal ini disebabkan karena pelaksana aktualisasi tidak mendapat izin dari Sekretariat Banggar. Meskipun demikian, hal tersebut masih cukup *reliable* dan valid karena TA Banggar memahami substansi dan dinamika yang terjadi di Banggar. Selain itu, pelaksana aktualisasi telah mendapatkan izin dari Mentor;
- d. Sehubungan dengan direvisinya Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, terdapat “pengaktifan” Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sempat dihilangkan yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Sebagai supporting system dibidang anggaran, PKA sering dilibatkan dalam memberikan dukungan keahlian untuk BAKN, maka pelaksana aktualisasi dengan seizin mentor berinisiatif untuk memberikan ARC serta meminta *feedback* kepada BAKN. Tetapi sama seperti Banggar, *feedback* diberikan kepada Tenaga Ahli BAKN.
- e. Untuk tahapan kegiatan konsultasi dengan Mentor dikegiatan III, IV dan V dihilangkan agar lebih efisien. Kegiatan konsultasi tersebut akan difokuskan di Kegiatan VI pada saat rapat internal dan melakukan koreksi bersama.



## B. MATRIKS PELAKSANAAN AKTUALISASI

<b>Unit Kerja</b>	: Pusat Kajian Anggaran
<b>Identifikasi Isu</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk</li> <li>2. Belum Banyak AKD Yang Memanfaatkan Dukungan Substansi Dari Pusat Kajian Anggaran</li> <li>3. Belum Memadainya Kenyamanan Ruang Kerja</li> </ol>
<b>Isu yang Diangkat</b>	: <b>Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk</b>
<b>Gagasan Pemecahan Isu</b>	: <b>Penyusunan Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan Siklus APBN Induk 2019 Yang Komprehensif Dengan Prinsip <i>Plan Do Check Act</i> Secara Seksama Di Pusat Kajian Anggaran</b>

### I. Siklus Pembicaraan Pendahuluan

Kegiatan 1	Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari referensi dari analisis terdahulu;</li> <li>2. Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor;</li> <li>3. Koordinasi kegiatan dengan Kapus PKA.</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft Format Analisis (terlampir);</li> <li>2. Notulensi rapat (dilakukan secara informal);</li> <li>3. Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus (terlampir)</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	27 Mei – 28 Mei 2018 (Tahap ini hanya dilakukan sekali untuk semua ARC)
Hambatan	Tidak ada hambatan yang berarti dalam kegiatan ini. Hanya saja latar belakang tugas pelaksana aktualisasi yang sebelumnya lebih banyak berkulat dibidang telaaahan BPK, maka pelaksana aktualisasi perlu memperdalam kembali pengetahuan tentang Ilmu Ekonomi Makro.
Solusi	Pelaksana berdiskusi dengan Mentor dan membaca referensi dari buku-buku Ekonomi Makro.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Dengan mencari referensi dari analisis terdahulu, pelaksana aktualisasi memperoleh gambaran tentang format yang biasa digunakan oleh PKA dan melakukan penyempurnaan agar lebih baik. Penyempurnaan atau perbaikan merupakan perwujudan dari <b>komitmen mutu</b>. Hal tersebut juga mencerminkan sikap <b>akuntabilitas</b> agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Upaya tersebut bagian dari pengembangan kompetensi jabatan (<b>manajemen ASN</b>).</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Selanjutnya pelaksana aktualisasi melakukan diskusi dengan Mentor. Meskipun sedianya rapat diganti dengan diskusi informal, namun hal tersebut tidak mengurangi keseriusan pelaksana aktualisasi. Keseriusan dalam mengikuti diskusi informal ini merupakan implementasi <b>komitmen mutu dan etika publik</b>. Etika publik ditandai dengan keseriusan meskipun hanya sebatas diskusi informal, sedangkan keseriusan disatu sisi lainnya menunjukkan kemauan untuk memberikan hasil yang terbaik sebagai bentuk menjaga komitmen mutu.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Tahapan kegiatan terakhir adalah berkoordinasi dengan Kapus PKA. Hal ini merupakan bentuk hormat terhadap atasan sebelum melaksanakan kegiatan. Pada tahap ini, pelaksana menyampaikan gambaran rencana kegiatan kepada Mentor untuk disampaikan kepada Kapus PKA. Kemudian Kapus PKA memberikan <b>Surat Keterangan Melakukan Kegiatan (SKMK)</b> per 30 Mei 2018. Koordinasi dengan Kapus PKA tersebut melambangkan <b>etika publik</b> dalam</p>

	berorganisasi meskipun pada pelaksanaannya diwakili oleh Mentor (untuk efisiensi waktu). SKMK tersebut berlaku dari awal sampai akhir kegiatan aktualisasi ini. Disamping etika, juga terdapat perwujudan sikap <b>nasionalisme</b> dengan mengikuti instruksi atasan.
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan ketiga tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Fondasi yang kuat merupakan buah dari upaya melakukan perencanaan yang sistematis dan kesungguhan memberikan yang terbaik. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui perencanaan yang baik dalam bidang substansi dan dukungan legal formal dari Kapus PKA dalam bentuk SKMK merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan perencanaan yang matang dan dukungan legal dalam bentuk SKMK serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

Kegiatan II	Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)
Tahapan Kegiatan	1. Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; 2. Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN yang lain.
Output	1. <i>Database</i> referensi; (terlampir dalam CD/DVD R) 2. Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis (terlampir).
Tanggal Pelaksanaan	30 Mei, 21 Juni dan 11 Juli 2018
Hambatan	Latar belakang tugas pelaksana aktualisasi yang sebelumnya lebih banyak berkutat dibidang telaahan BPK, maka pelaksana aktualisasi perlu memperdalam kembali pengetahuan tentang Ilmu Ekonomi Makro.
Solusi	Pelaksana berdiskusi dengan Mentor dan membaca referensi dari buku-buku Ekonomi Makro.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Dengan mencari referensi referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). Database ini menyesuaikan sesuai tema dan substansi ARC. Mencari referensi merupakan bagian dari upaya agar kompetensi sebagai Analis APBN meningkat (<b>manajemen ASN</b>). Hasil analisis berbasis referensi bukan dari subyektivitas atau pesanan pihak tertentu menunjukkan pengamalan sebagai <b>perekat dan pemersatu bangsa</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Selanjutnya pelaksana aktualisasi melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN lain, kemudian hasil dari diskusi tersebut akan diperoleh catatan kerangka berpikir (<i>framework analysis</i>). Catatan tersebut menjadi pedoman</p>



	dalam penyusunan ARC meskipun dalam prakteknya terdapat banyak penyesuaian. Tahapan ini hanya juga dilakukan hanya sekali saja meliputi semua ARC yang telah tersusun. Tahapan kegiatan ini merupakan perwujudan <b>etika publik</b> dimana pelaksana aktualisasi sebagai “junior” memohon saran dari Mentor sebagai “senior” yang telah berpengalaman. Output dalam bentuk catatan kerangka berpikir menjadi <i>guidelines</i> agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI ( <b>komitmen mutu</b> ) dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah ( <b>akuntabel</b> ).
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui pendalaman teori analisis yang akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI dan kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

Kegiatan III	Melakukan Pengumpulan Data (Do)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar;</li> <li>2. Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 ;</li> <li>3. Mencari data pembandingan dari sumber lain (opsional) ;</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulensi rapat (terlampir);</li> <li>2. Data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 (terlampir);</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	31 Mei 2018, 22 Juni-23 Juni 2018 dan 2 Juli-14 Juli 2018.
Hambatan	Pelaksana aktualisasi tidak mendapat izin dari Sekretariat Banggar untuk hadir dan mencatat rapat.
Solusi	Meminta catatan rapat kepada TA Banggar atau mengunduh berita rapat di <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> .
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Dengan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). Untuk bisa hadir mencatat rapat juga harus berkoordinasi dengan Sekretariat Banggar (<i>whole of government</i>).</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Melalui pencarian data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019, hal tersebut diharapkan akan membuat ARC menjadi lebih komprehensif</p>

	<p>(<b>komitmen mutu</b>). Data yang dicari haruslah subyektif dan tidak menguntungkan pihak tertentu sebagai perwujudan peran <b>perekat dan pemersatu bangsa</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Dengan pencarian data pembanding dari sumber lain, hal tersebut diharapkan akan membuat ARC menjadi lebih komprehensif (<b>komitmen mutu</b>). Meskipun demikian tahapan ini urung dilakukan karena keterbatasan waktu dan sumber daya.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 4</b>– Koordinasi dengan mentor meskipun dilakukan secara informal bertujuan untuk memohon saran dari Mentor sebagai “senior” yang telah berpengalaman agar pelaksana aktualisasi tidak salah melangkah. Hal tersebut perwujudan <b>etika publik</b> dalam berorganisasi.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui pendalaman teori analisis yang akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI dan kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

Kegiatan IV	Melakukan Olah Data (Do)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang mengacu pada dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar ;</li> <li>2. Melakukan olah data dengan aplikasi pengolah data;</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi data excell (terlampir);</li> <li>2. Hasil olah data (terlampir);</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	1 Juni- 3 Juni 2018, 24 Juni 2018 dan 12 Juli-14 Juli 2018.
Hambatan	Pada beberapa ARC ada yang direncanakan menggunakan aplikasi statistik seperti SPSS atau Eviews. Namun karena data yang tersedia tidak mendukung dan dikhawatirkan akan menjadi bias.
Solusi	Olah data diubah pemaparan secara deskriptif dengan formula excel.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang mengacu pada dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). Verifikasi data dilakukan dengan cermat agar data tidak bias dan menguntungkan pihak tertentu sebagai perwujudan <b>perekat dan pemersatu bangsa</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Melalui olah data secara deskriptif dengan formula excel, hal tersebut diharapkan akan membuat ARC menjadi lebih komprehensif (<b>komitmen mutu</b>). Melakukan olah data juga merupakan bagian dari pengembangan</p>



	kompetensi jabatan Analis APBN ( <b>manajemen ASN</b> ) dan memberikan support data yang valid kepada Anggota DPR ( <b>pelayanan publik</b> ). Pada beberapa ARC ada yang direncanakan menggunakan aplikasi statistik seperti SPSS atau Eviews. Namun karena data yang tersedia tidak mendukung dan dikhawatirkan akan menjadi bias.
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui Rekapitulasi dan verifikasi data dan olah data akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI dan kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

Kegiatan V	Melakukan Analisis (Do)
Tahapan Kegiatan	1. Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019; 2. Merancang infografis;
Output	1. <i>Draft</i> analisis sementara (terlampir); 2. Rancangan infografis (terlampir).
Tanggal Pelaksanaan	4 Juni 2018, 24 Juni 2018 dan 15 Juli-18 Juli 2018.
Hambatan	Membutuhkan keahlian khusus untuk membuat infografis.
Solusi	Menggunakan situs <i>open source</i> Canva
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<b>Tahapan kegiatan 1</b> – Dengan Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI ( <b>komitmen mutu</b> ) dan kaidah penulisan karya ilmiah ( <b>akuntabilitas</b> ). Analisis dilakukan dengan subjektif dan tidak bias menunjukkan pengamalan sebagai <b>perekat dan pemersatu bangsa</b> .  <b>Tahapan kegiatan 2</b> – Melalui pembuatan infografis, ARC menjadi lebih menarik dan mengundang minat baca <i>user</i> sebagai wujud <b>pelayanan publik dan komitmen mutu</b> . Meski membuat infografis bukan tusi utama Analis APBN, tapi hal tersebut adalah wujud kemauan belajar dan mengembangkan kompetensi ( <b>manajemen ASN</b> )

Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 dilengkapi dengan infografis akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI serta kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

Kegiatan VI	Melakukan Evaluasi dan Koreksi (Check)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengirimkan draft ARC sementara tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 kepada Koordinator Bidang Asumsi Ekonomi Makro/Mentor;</li> <li>2. Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis;</li> <li>3. Melakukan koreksi bersama-sama.</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil analisis final (dokumen)</li> <li>2. Notulensi rapat (terlampir).</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	5 Juni 2018, 25 Juni-2 Juli 2018 dan 19 Juli-28 Juli 2018.
Hambatan	Dalam periode melakukan koreksi tersebut terkadang ada ketidaksepahaman dengan saran dari Mentor ataupun analis lain.
Solusi	Bersedia mendengar masukan dengan seksama demi hasil ARC yang memuaskan.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Mengirimkan draft ARC sementara tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 kepada Koordinator Bidang Asumsi Ekonomi Makro/Mentor, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). Selain itu pelaksana membutuhkan banyak masukan dari senior yang sudah berpengalaman. Hal tersebut merupakan perwujudan dari <b>etika publik</b> dalam berorganisasi.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Melalui Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). (<b>komitmen mutu</b>).</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Melalui koreksi bersama-sama, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). (<b>komitmen mutu</b>). Proses koreksi ini dilakukan secara bersama baik oleh Analis PNS maupun PTT. Pelibatan PNS maupun PTT menunjukkan bahwa semua turut dilibatkan sebagai bagian dari</p>



	perwujudan dari <b>etika publik</b> dan gotong royong sebagai wujud <b>nasionalisme</b> dalam berorganisasi.
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui pengiriman draft ARC sementara tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 kepada mentor serta pengendalian mutu akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI serta kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

Kegiatan VII	Finalisasi Analisis (Act)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan hasil analisis final kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>2. Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen;</li> <li>3. Upload hasil ARC di website;</li> <li>4. Membuat <i>form feedback</i> kepada TA Banggar.</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Analisis Ringkas Cepat (ARC terlampir);</li> <li>2. Softfile Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke website (terlampir);</li> <li>3. Form Feedback (terlampir).</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	<p>Finalisasi dan penyerahan ke Kapus PKA : 20 Juni 2018, 3 Juli-8 Juli 2018 dan 29 Juli 2018.</p> <p>Upload hasil ARC di website : 28 September 2018</p> <p><i>Form feedback</i> kepada TA Banggar : 18 September 2018</p>
Hambatan	Pada kegiatan ini hambatan terbesar adalah berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Banggar/BAKN untuk memberikan form feedback.
Solusi	Aktif melakukan pendekatan dari sisi informal serta berkoordinasi dengan mentor.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Dengan menyerahkan hasil analisis final kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran hal tersebut merupakan perwujudan dari <b>etika publik</b> dan pembuktian fungsi dari jabatan Analis APBN (<b>manajemen ASN</b>). Pencetakan dokumen dengan printer warna beresolusi tinggi merupakan langkah nyata untuk memberikan <b>pelayanan publik</b> dengan <b>komitmen mutu</b> yang terbaik kepada Anggota DPR RI.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Publikasi hasil analisis beserta infografis melalui website merupakan upaya melakukan penyebaran informasi yang bermanfaat khususnya kepada kalangan akademisi. Hasil publikasi tersebut merupakan salah satu wujud <b>pelayanan publik</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Dengan berkirim <i>form feedback</i> kepada user yaitu TA Banggar/BAKN, pelaksana akan memperoleh gambaran tentang kualitas produk yang dihasilkan dan melakukan perbaikan kedepannya sebagai wujud <b>komitmen</b></p>

	<b>mutu.</b> Selain itu hal tersebut juga upaya menjalin hubungan kelembagaan yang lebih erat dengan TA sebagai penyambung lidah ke Anggota DPR ( <i>whole of government</i> ).
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Rangkaian kegiatan diatas merupakan upaya untuk memperkuat substansi ARC yang memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI serta pelayanan publik dengan penyebarluasan hasil analisis melalui website. Hal tersebut merupakan implementasi pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

## II. Siklus APBN Induk

Kegiatan 1	Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)
Tahapan Kegiatan	1. Mencari referensi dari analisis terdahulu; 2. Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor; 3. Berdiskusi dengan Kapus PKA
Output	1. Draft Format Analisis (terlampir); 2. Notulensi rapat (dilakukan secara informal); 3. Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus (terlampir).
Tanggal Pelaksanaan	27 Mei – 28 Mei 2018 (Tahap ini hanya dilakukan sekali untuk semua ARC)
Hambatan	Tidak ada hambatan yang berarti dalam kegiatan ini. Hanya saja latar belakang tugas pelaksana aktualisasi yang sebelumnya lebih banyak berkutat dibidang telaaahan BPK, maka pelaksana aktualisasi perlu memperdalam kembali pengetahuan tentang Ilmu Ekonomi Makro.
Solusi	Pelaksana berdiskusi dengan Mentor dan membaca referensi dari buku-buku Ekonomi Makro.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<b>Tahapan kegiatan 1</b> – Dengan mencari referensi dari analisis terdahulu, pelaksana aktualisasi memperoleh gambaran tentang format yang biasa digunakan oleh PKA dan melakukan penyempurnaan agar lebih baik. Penyempurnaan atau perbaikan merupakan perwujudan dari <b>komitmen mutu</b> . Hal tersebut juga mencerminkan sikap <b>akuntabilitas</b> agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Upaya tersebut bagian dari pengembangan kompetensi jabatan ( <b>manajemen ASN</b> ). <b>Tahapan kegiatan 2</b> – Selanjutnya pelaksana aktualisasi melakukan diskusi dengan Mentor. Meskipun sedianya rapat diganti dengan diskusi informal, namun hal tersebut tidak mengurangi keseriusan pelaksana aktualisasi. Keseriusan dalam mengikuti diskusi informal ini merupakan implementasi <b>komitmen mutu dan etika publik</b> . Etika publik ditandai dengan keseriusan meskipun hanya sebatas diskusi informal, sedangkan keseriusan disatu sisi lainnya menunjukkan kemauan untuk memberikan hasil yang terbaik sebagai bentuk menjaga komitmen mutu.



	<i><b>Tahapan kegiatan 3</b></i> – Tahapan kegiatan terakhir adalah berkoordinasi dengan Kapus PKA. Hal ini merupakan bentuk hormat terhadap atasan sebelum melaksanakan kegiatan. Pada tahap ini, pelaksana menyampaikan gambaran rencana kegiatan kepada Mentor untuk disampaikan kepada Kapus PKA. Kemudian Kapus PKA memberikan <b>Surat Keterangan Melakukan Kegiatan (SKMK)</b> per 30 Mei 2018. Koordinasi dengan Kapus PKA tersebut melambangkan <b>etika publik</b> dalam berorganisasi meskipun pada pelaksanaannya diwakili oleh Mentor (untuk efisiensi waktu). SKMK tersebut berlaku dari awal sampai akhir kegiatan aktualisasi ini. Disamping etika, juga terdapat perwujudan sikap <b>nasionalisme</b> dengan mengikuti instruksi atasan.
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan ketiga tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Fondasi yang kuat merupakan buah dari upaya melakukan perencanaan yang sistematis dan kesungguhan memberikan yang terbaik. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui perencanaan yang baik dalam bidang substansi dan dukungan legal formal dari Kapus PKA dalam bentuk SKMK merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan perencanaan yang matang dan dukungan legal dalam bentuk SKMK serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

<b>Kegiatan II</b>	<b>Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)</b>
Tahapan Kegiatan	1. Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; 2. Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN yang lain.
Output	1. <i>Database</i> referensi; (terlampir dalam CD/DVD R); 2. Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis (terlampir).
Tanggal Pelaksanaan	20 Agustus 2018 (Nota Keuangan RAPBN 2019) 4 September dan 20 September 2018 (penyusunan 2 ARC di setiap tanggal)
Hambatan	Latar belakang tugas pelaksana aktualisasi yang sebelumnya lebih banyak berkulat dibidang telaahan BPK, maka pelaksana aktualisasi perlu memperdalam kembali pengetahuan tentang Ilmu Ekonomi Makro.
Solusi	Pelaksana berdiskusi dengan Mentor dan membaca referensi dari buku-buku Ekonomi Makro.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<i><b>Tahapan kegiatan 1</b></i> – Dengan mencari referensi referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI ( <b>komitmen mutu</b> ) dan kaidah penulisan karya ilmiah ( <b>akuntabel</b> ). <i>Database</i> ini menyesuaikan sesuai tema dan substansi ARC. Mencari referensi merupakan bagian dari upaya agar kompetensi sebagai Analis APBN meningkat ( <b>manajemen ASN</b> ). Hasil analisis berbasis



	<p>referensi bukan dari subyektivitas atau pesanan pihak tertentu menunjukkan pengamalan sebagai <b>perekat dan pemersatu bangsa</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Selanjutnya pelaksana aktualisasi melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN lain, kemudian hasil dari diskusi tersebut akan diperoleh catatan kerangka berpikir (<i>framework analysis</i>). Catatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan ARC meskipun dalam prakteknya terdapat banyak penyesuaian. Tahapan ini hanya juga dilakukan hanya sekali saja meliputi semua ARC yang telah tersusun. Tahapan kegiatan ini merupakan perwujudan <b>etika publik</b> dimana pelaksana aktualisasi sebagai “junior” memohon saran dari Mentor sebagai “senior” yang telah berpengalaman. Output dalam bentuk catatan kerangka berpikir menjadi <i>guidelines</i> agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>).</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.</p>
Penguatan Nilai Organisasi	<p>Melalui pendalaman teori analisis yang akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI dan kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.</p>

Kegiatan III	Melakukan Pengumpulan Data (Do)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar;</li> <li>2. Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 ;</li> <li>3. Mencari data pembandingan dari sumber lain (opsional) ;</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulensi rapat (terlampir);</li> <li>2. Data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 (terlampir);</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	4-10 September 2018, dan 20 September 2018 (Pengumpulan data untuk 2 ARC disetiap tanggal)
Hambatan	Pelaksana aktualisasi tidak mendapat izin dari Sekretariat Banggar untuk hadir dan mencatat rapat.
Solusi	Meminta catatan rapat kepada TA Banggar, menaruh <i>recorder</i> dan mengunduh berita rapat di <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> .
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<b>Tahapan kegiatan 1</b> – Dengan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI ( <b>komitmen mutu</b> )

	<p>dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). Untuk bisa hadir mencatat rapat juga harus berkoordinasi dengan Sekretariat Banggar (<i>whole of government</i>).</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Melalui pencarian data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus APBN induk, hal tersebut diharapkan akan membuat ARC menjadi lebih komprehensif (<b>komitmen mutu</b>) dan menjaga “marwah” jabatan sebagai upaya pengamalan <b>manajemen ASN</b>. Data yang dicari haruslah subyektif dan tidak menguntungkan pihak tertentu sebagai perwujudan peran <b>perekat dan pemersatu bangsa</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Dengan pencarian data pembanding dari sumber lain, hal tersebut diharapkan akan membuat ARC menjadi lebih komprehensif (<b>komitmen mutu</b>). Meskipun demikian tahapan ini urung dilakukan karena keterbatasan waktu dan sumber daya.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui pendalaman teori analisis yang akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI dan kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

Kegiatan IV	Melakukan Olah Data (Do)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar;</li> <li>2. Melakukan olah data dengan aplikasi pengolahan data;</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi data excell (terlampir);</li> <li>2. Hasil olah data (terlampir);</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	17 September (Olah data untuk 2 ARC) , 22 September dan 23 September 2018.
Hambatan	Pada beberapa ARC ada yang direncanakan menggunakan aplikasi statistik seperti SPSS atau EvIEWS. Namun karena data yang tersedia tidak mendukung dan dikhawatirkan akan menjadi bias.
Solusi	Olah data diubah pemaparan secara deskriptif dengan formula excel.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<b>Tahapan kegiatan 1</b> – Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang mengacu pada pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI ( <b>komitmen mutu</b> ) dan kaidah penulisan karya ilmiah ( <b>akuntabel</b> ). Verifikasi data dilakukan dengan cermat agar data tidak bias dan menguntungkan pihak tertentu sebagai perwujudan <b>perekat dan pemersatu bangsa</b> .



	<p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Melalui olah data secara deskriptif dengan formula excel, hal tersebut diharapkan akan membuat ARC menjadi lebih komprehensif (<b>komitmen mutu</b>). Melakukan olah data juga merupakan bagian dari pengembangan kompetensi jabatan Analis APBN (<b>manajemen ASN</b>) dan memberikan support data yang valid kepada Anggota DPR (<b>pelayanan publik</b>).</p> <p>Pada beberapa ARC ada yang direncanakan menggunakan aplikasi statistik seperti SPSS atau Eviews. Namun karena data yang tersedia tidak mendukung dan dikhawatirkan akan menjadi bias.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.</p>
Penguatan Nilai Organisasi	<p>Melalui Rekapitulasi dan verifikasi data dan olah data akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI dan kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.</p>

Kegiatan V	Melakukan Analisis (Do)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar tentang RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar;</li> <li>2. Merancang infografis.</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Draft</i> analisis sementara (terlampir) ;</li> <li>2. Rancangan infografis (terlampir).</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	17 September (penyelesaian analisis untuk 2 ARC), 22 September dan 23 September 2018
Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membutuhkan keahlian khusus untuk membuat infografis.;</li> <li>- Penugasan Dinas Luar ke Maluku Utara</li> </ul>
Solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan situs <i>open source</i> Canva</li> <li>- Memulai analisis pada saat sedang Dinas Luar ke Maluku Utara</li> </ul>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Dengan Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar tentang RAPBN K/L/BUMN 2019 , pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabilitas</b>). Analisis dilakukan dengan subjektif dan tidak bias menunjukkan pengamalan sebagai <b>perekat dan pemersatu bangsa</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Melalui pembuatan infografis, ARC menjadi lebih menarik dan mengundang minat baca <i>user</i> sebagai wujud <b>pelayanan publik dan komitmen mutu</b>. Meski membuat infografis bukan tusi utama Analis APBN, tapi hal tersebut</p>



	adalah wujud kemauan belajar dan mengembangkan kompetensi ( <b>manajemen ASN</b> )
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 dilengkapi dengan infografis akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI serta kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

Kegiatan VI	Melakukan Evaluasi dan Koreksi (Check)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengirimkan draft ARC sementara tentang hasil rapat Banggar RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar kepada Koordinator Bidang Asumsi Ekonomi Makro/Mentor;</li> <li>2. Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis;</li> <li>3. Melakukan koreksi bersama-sama.</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil koreksi analisis (dokumen terlampir)</li> <li>2. Notulensi rapat (terlampir)</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	17 September dan 24 September 2018 (koreksi 2 <i>draft</i> ARC di setiap tanggal)
Hambatan	Dalam periode melakukan koreksi tersebut terkadang ada ketidaksepahaman dengan saran dari Mentor ataupun analis lain.
Solusi	Bersedia mendengar masukan dengan seksama demi hasil ARC yang memuaskan
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Mengirimkan draft ARC sementara tentang hasil rapat Banggar terkait RAPBN K/L/BUMN 2019 kepada Koordinator Bidang Asumsi Ekonomi Makro/Mentor, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). Selain itu pelaksana membutuhkan banyak masukan dari senior yang sudah berpengalaman. Hal tersebut merupakan perwujudan dari <b>etika publik</b> dalam berorganisasi.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Melalui Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). (<b>komitmen mutu</b>).</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Melalui koreksi bersama-sama, pelaksana berharap agar hasil ARC memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI (<b>komitmen mutu</b>) dan kaidah penulisan karya ilmiah (<b>akuntabel</b>). (<b>komitmen mutu</b>). Proses koreksi ini</p>

	dilakukan secara bersama baik oleh Analis PNS maupun PTT. Pelibatan keduanya menunjukkan bahwa semua turut dilibatkan sebagai bagian dari perwujudan dari etika publik <b>etika public</b> dan gotong royong sebagai wujud <b>nasionalisme</b> dalam berorganisasi.
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui pengiriman draft ARC sementara tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 kepada mentor serta pengendalian mutu akan memperkuat substansi ARC dalam rangka memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI serta kaidah penulisan karya ilmiah merupakan penekanan pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.

Kegiatan VII	Finalisasi Analisis (Act)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan hasil analisis final kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>2. Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen;</li> <li>3. Upload hasil ARC di website;</li> <li>4. Membuat <i>form feedback</i> kepada TA Banggar/BAKN.</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Analisis Ringkas Cepat dan Infografis (terlampir);</li> <li>2. Softfile Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke website (terlampir);</li> <li>3. <i>Form Feedback</i> (terlampir).</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	<p>Finalisasi analisis : 27 September 2018</p> <p>Upload hasil ARC di website : 28 September 2018</p> <p><i>Form feedback</i> kepada TA Banggar/BAKN : 27 September 2018</p>
Hambatan	Pada kegiatan ini hambatan terbesar adalah berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Banggar/BAKN untuk memberikan form feedback.
Solusi	Aktif melakukan pendekatan dari sisi informal serta berkoordinasi dengan mentor.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Dengan menyerahkan hasil analisis final kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran hal tersebut merupakan perwujudan dari <b>etika publik</b> dan pembuktian fungsi dari jabatan Analis APBN (<b>manajemen ASN</b>). Pencetakan dokumen dengan printer warna beresolusi tinggi merupakan langkah nyata untuk memberikan <b>pelayanan publik</b> dengan <b>komitmen mutu</b> yang terbaik kepada Anggota DPR RI.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Publikasi hasil analisis beserta infografis melalui website merupakan upaya melakukan penyebaran informasi yang bermanfaat khususnya kepada kalangan akademisi. Hasil publikasi tersebut merupakan salah satu wujud <b>pelayanan publik</b>.</p>



	<i>Tahapan kegiatan 3</i> – Dengan berkirim <i>form feedback</i> kepada user yaitu TA Banggar/BAKN, pelaksana akan memperoleh gambaran tentang kualitas produk yang dihasilkan dan melakukan perbaikan kedepannya sebagai wujud <b>komitmen mutu</b> . Selain itu hal tersebut juga upaya menjalin hubungan kelembagaan yang lebih erat dengan TA sebagai penyambung lidah ke Anggota DPR ( <i>whole of government</i> ).
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Melalui pelaksanaan tahap kegiatan tersebut, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan produk ARC yang sesuai kebutuhan dan standar Anggota DPR RI. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni <b>mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal</b> karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Rangkaian kegiatan diatas merupakan upaya untuk memperkuat substansi ARC yang memenuhi standar kebutuhan Anggota DPR RI serta pelayanan publik dengan penyebaran hasil analisis melalui website. Hal tersebut merupakan implementasi pada nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Religius Akuntabel Profesional Integritas (RAPI). Dari keempat nilai tersebut, kegiatan ini merupakan penekanan dari <b>Akuntabel</b> yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar ilmiah dalam serta <b>Profesional</b> yang ditunjukkan dengan keseriusan serta tanggung jawab sebagai Analis APBN untuk memberikan ARC yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Anggota DPR RI.



## BAGIAN IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, maka telah diaktualisasikan pula nilai-nilai dasar PNS serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Aktualisasi tersebut dilakukan dengan metode *Plan Do Check Act* (PDCA). Secara garis besar, muatan substansi nilai ANEKA pada kegiatan aktualisasi ini lebih banyak menekankan kepada **Akuntabilitas** dan **Komitmen Mutu**. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak begitu banyak perubahan dari rancangan jadwal yang sudah ditetapkan. Hanya saja pada tahap terakhir yaitu finalisasi terutama pada tahap kegiatan *form feedback* terdapat kendala birokrasi untuk memberikannya kepada Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI. Kendala birokrasi ini menunjukkan perlu adanya peningkatan *Whole of Government* diantara Pusat Kajian Anggaran dengan Sekretariat Banggar.

Form feedback dalam bentuk kuesioner *likert scale* ini berfungsi sebagai *tools* untuk mengetahui bagaimana kualitas produk yang dihasilkan dari sudut pandang *user*. Untuk mengatasi tidak terisnya *form feedback* tersebut, *form feedback* akhirnya diberikan kepada TA Banggar dan juga TA BAKN. Untuk TA Banggar, dikarenakan ada kendala komunikasi, rencana memberikan *form feedback* pada akhir Siklus Pembicaraan Pendahuluan di sekitar akhir Juli sampai pertengahan Agustus menjadi tertunda dan baru terlaksana pertengahan September. Meskipun demikian, hasil *form feedback* untuk 3 ARC yang diisi oleh masing-masing TA membuahkan hasil positif dimana mereka menyatakan puas terhadap substansi ARC tersebut. Sedangkan pada Siklus APBN Induk baru terealisasi pada tanggal 28 September 2018 dimana pada siklus ini, *form feedback* diisi oleh 1 orang TA Banggar dan 1 TA BAKN. TA Banggar tersebut mengisi *form feedback* dalam bentuk lain yaitu berupa catatan detail mengenai substansi khususnya pada ARC tentang Transfer ke Daerah (TKD) dimana perlu ada pendalaman analisis berupa model ekonometri sederhana dan perbaikan tampilan infografis. Sedangkan TA BAKN mengisi semua *form feedback* pada 4 ARC dan menyatakan puas atas substansi ARC tersebut namun tetap harus ada upaya perbaikan terutama dari aspek pelaporan yang lebih mendalam dan terstandarisasi.

Secara keseluruhan terdapat 5 responden (TA) yang mengisi 7 form feedback pada masing-masing ARC. Sejumlah 4 orang dari Banggar dan 1 orang dari BAKN (selengkapnya di Lampiran). **Keempat responden menyatakan bahwa substansi ARC sesuai dengan kebutuhan Anggota DPR RI dan satu orang menyatakan cukup sesuai.**

## **B. SARAN**

Selama proses pembelajaran klasikal maupun non klasikal dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) CPNS DPR RI termasuk pelaksanaan program aktualisasi ini, maka terdapat beberapa saran dimana penulis berharap melalui kegiatan dan laporan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan sehingga tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS. Berdasarkan hasil *form feedback*, produk ARC ini sesuai dengan kebutuhan Anggota DPR RI. Kedepannya agar lebih optimal, pelaksana mengusulkan untuk dibentuk suatu tim penyusun ARC yang *jobdesknya* dibagi berdasarkan tahapan kegiatan dalam aktualisasi ini. Tim ini akan bekerja dari bulan Mei hingga Oktober tiap tahunnya karena pada bulan-bulan tersebut merupakan periode pembahasan RAPBN di tahun yang akan datang. Koordinator Bidang akan berperan menjadi motivator, fasilitator dan koordinator. Motivator untuk memotivasi anggota tim agar menampilkan kualitas yang terbaik, fasilitator dalam rangka memfasilitasi gagasan, ide dan saran dari anggota tim serta koordinator dalam rangka menyampaikan produk agar dapat disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Banggar/BAKN DPR RI.

## **C. RENCANA TINDAK LANJUT**

Agar kegiatan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, maka pelaksana akan berupaya untuk :

1. meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti kursus atau *workshop* serta siap apabila dilibatkan di dalam tim penyusun ARC.
2. Selain itu, pelaksana juga akan mengusulkan kepada Korbid atau Kapus PKA untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Sekretariat Banggar/BAKN ataupun TA agar ARC dan juga produk lainnya yang dihasilkan oleh PKA dapat diterima dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik oleh Anggota Banggar/BAKN. Untuk itulah, perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu kepada pihak Sekretariat dan TA sebelum berlanjut ke hubungan formal kelembagaan.

# **LAMPIRAN KEGIATAN I**

## **(Siklus Pembicaraan Pendahuluan)**

---



LAMPIRAN I.I. (Draft Format Analisis Terdahulu)

Laporan Bahan Rapat Timus tentang Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017

Adapun pokok-pokok keputusan keputusan hasil pembahasan panja terkait perubahan postur transfer ke Daerah dan Dana Desa:

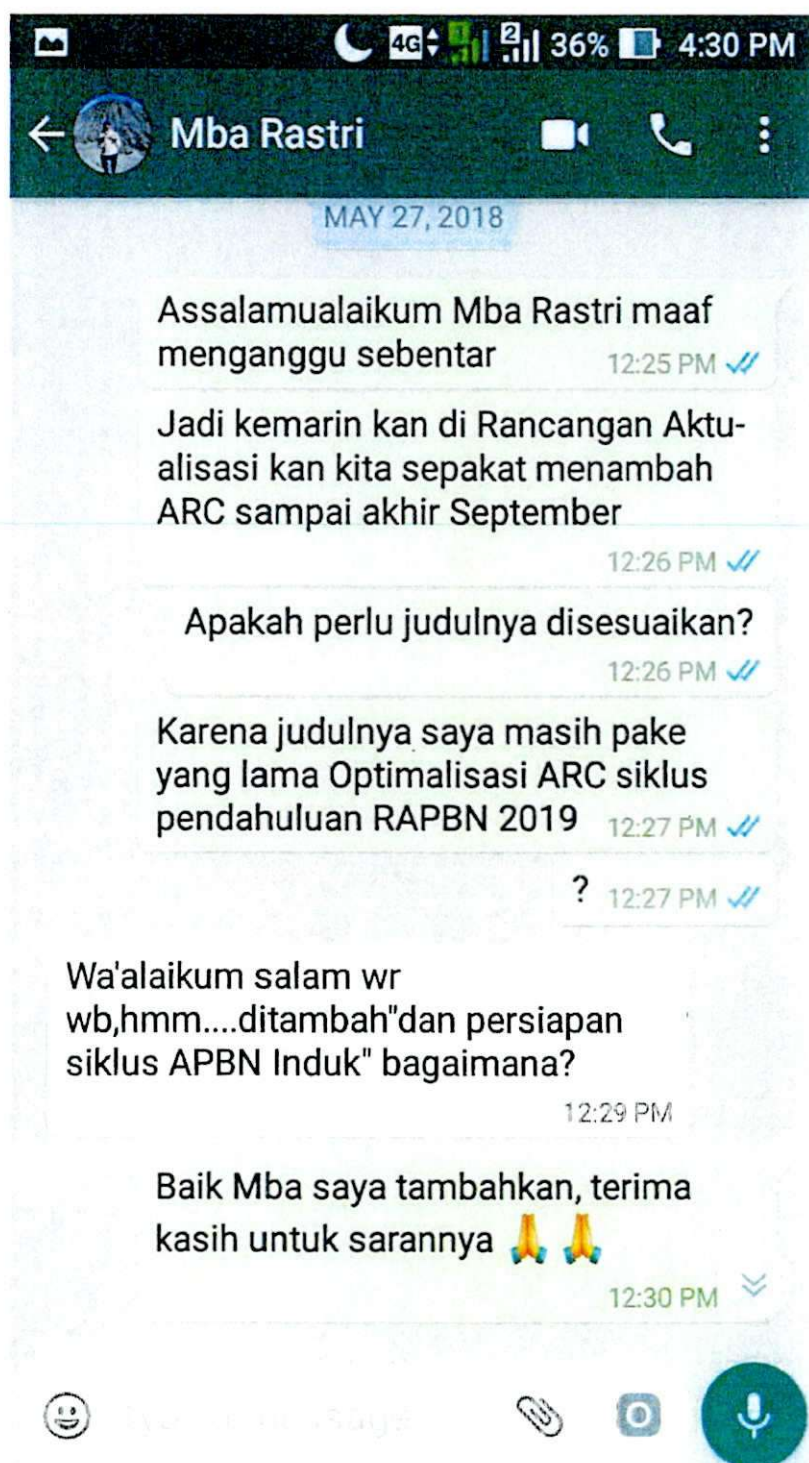
Perubahan transfer ke daerah dan dana desa, antara lain mencakup perubahan pada dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) akibat adanya perubahan penerimaan negara, perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan perubahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta perubahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Sementara itu, Dana Intensif Daerah (DID), Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi khusus provinsi papua dan papua barat, Dana Keistimewaan DIY, dan dana desa tidak mengalami perubahan.

URAIAN	2017				
	APBN	RAPBN P	Kesepakatan	SELISIH	
				Terhadap APBN	Terhadap RAPBN P
				(5) = (4) - (2)	(6) = (4) - (3)
	(2)	(3)	(5)	(5) = (4) - (2)	(6) = (4) - (3)
Transfer ke Daerah	704.93	699.80	706.34	1.41	6.54
I. Dana Perimbangan	677.08	672.31	678.60	1.52	6.29
A. Dana Transfer Umum	503.63	487.67	493.96	(9.67)	6.29
1. Dana Bagi Hasil	92.79	95.37	95.38	2.58	0.01
a. Pajak	58.58	58.09	58.09	(0.49)	-
b. Sumber Daya Alam	28.92	30.52	30.52	1.61	-
2. Dana Alokasi Umum	410.84	392.30	398.68	(12.3)	6.28
B. Dana Transfer Khusus	173.44	184.63	184.63	11.18	-
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	58.34	69.53	69.53	11.18	-
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	115.10	115.10	115.10	-	-
II. Dana Insentif Daerah	7.50	7.50	7.50	-	-
III. Dana Otonomi Khusus dan DK DIY	20.34	19.99	20.24	(101.9)	251.2
A. Dana Otonomi Khusus	19.54	19.19	19.44	(101.0)	251.2
1. Dana Otsus Prov.Paua dan Prov.Papua Barat	8.02	7.84	7.97	(50.9)	125.6
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8.02	7.84	7.97	(50.9)	125.6
3. Dana Tambahan Infakstruktur Dalam Rangka Otsus	3.50	3.50	3.50	-	-
B. Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta	800	800	800	-	-
>Dana Desa	60.00	60.00	60.00	-	6.54
JUMLAH	764.93	759.80	766.34	1.41	6.54

Menyikapi perubahan kebijakan anggaran yang menyesuaikan penyaluran DAU berdasarkan kemampuan penerimaan negara, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai mengurangi ketergantungan akan DAU sebagai sumber pembiayaan utama menjalankan pembangunan di daerahnya. Alternatif pembiayaan dan inovasi dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah harus segera dilakukan.

Hasil temuan BPK terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai juga dapat menjadi masukan dalam APBN Perubahan untuk dijadikan sebagai penambahan obyek yang harus didanai namun tetap disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan.

LAMPIRAN I.II. (Konsultasi Informal Dengan Mentor)



### LAMPIRAN I.III. (Surat Keterangan Melakukan Kegiatan)



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715730 FAX (021) 5715933 LAMAN [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN  
NOMOR: BK-@TSETJEN DAN BK DPR RI/PA/05/2018

Yang beranda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Eko Adityo Ananto, S.E.  
NIP : 19880610 201803 1 001  
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama  
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan Aktualisasi pada 30 Mei 2018-30 September 2018. Adapun kegiatan Aktualisasi yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi Analisa Ringkas Cepat (ARC) Siklus Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2019 dan Siklus APBN Induk 2019 dengan output maksimal 10 dokumen ARC.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Mei 2018  
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si.  
NIP. 19710911 199703 1 005



# **LAMPIRAN KEGIATAN I**

## **(Siklus APBN Induk)**

LAMPIRAN I.I. (Draft Format Analisis Terdahulu)

Laporan Bahan Rapat Timus tentang Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017

Adapun pokok-pokok keputusan keputusan hasil pembahasan panja terkait perubahan postur transfer ke Daerah dan Dana Desa:

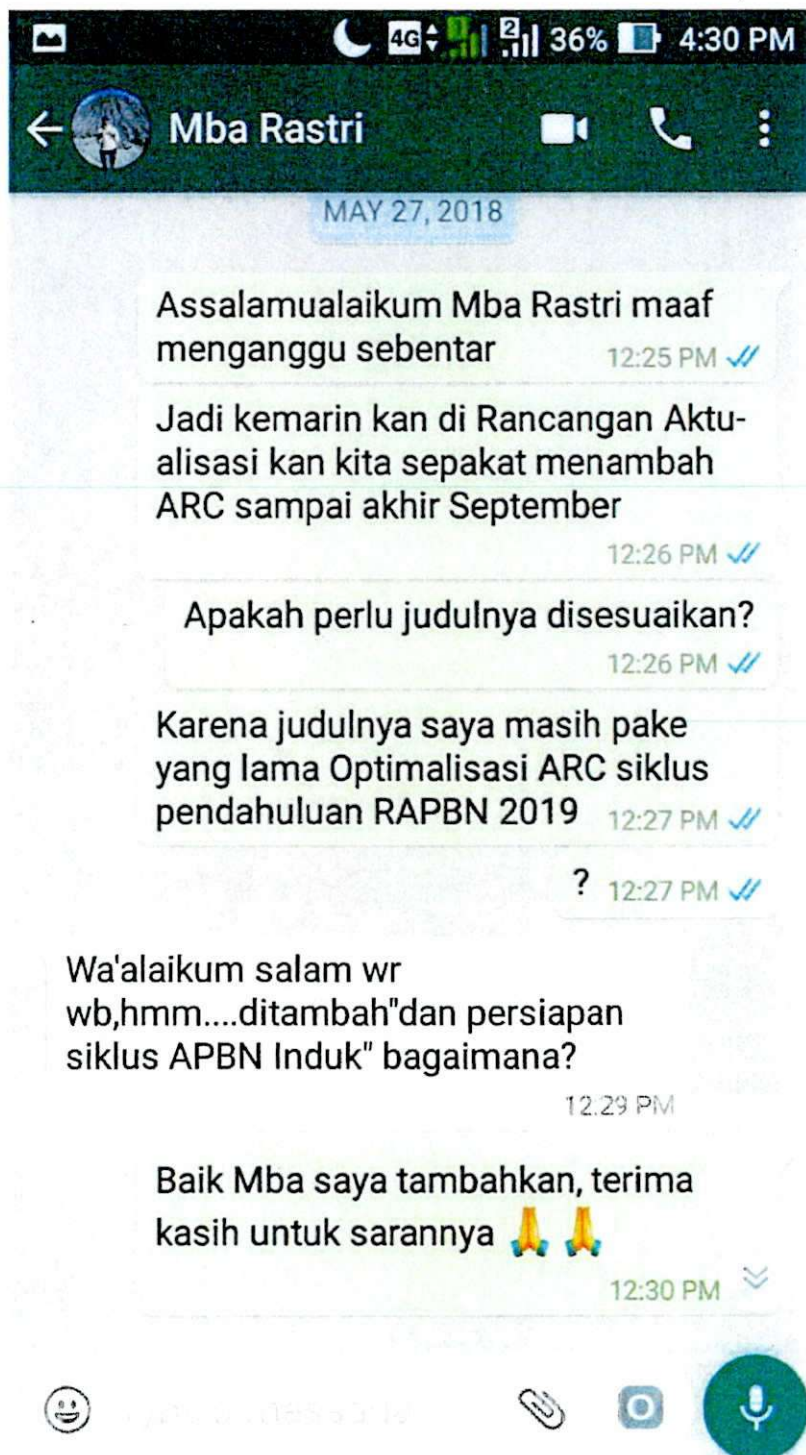
Perubahan transfer ke daerah dan dana desa, antara lain mencakup perubahan pada dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) akibat adanya perubahan penerimaan negara, perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan perubahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta perubahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Sementara itu, Dana Intensif Daerah (DID), Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi khusus provinsi papua dan papua barat, Dana Keistimewaan DIY, dan dana desa tidak mengalami perubahan.

URAIAN	2017				
	APBN	RAPBN P	Kesepakatan	SELISIH	
				Terhadap APBN	Terhadap RAPBN P
				(5) = (4) - (2)	(6) = (4) - (3)
	(2)	(3)	(5)		
Transfer ke Daerah	704.93	699.80	706.34	1.41	6.54
IV. Dana Perimbangan	677.08	672.31	678.60	1.52	6.29
C. Dana Transfer Umum	503.63	487.67	493.96	(9.67)	6.29
3. Dana Bagi Hasil	92.79	95.37	95.38	2.58	0.01
c. Pajak	58.58	58.09	58.09	(0.49)	-
d. Sumber Daya Alam	28.92	30.52	30.52	1.61	-
4. Dana Alokasi Umum	410.84	392.30	398.68	(12.3)	6.28
D. Dana Transfer Khusus	173.44	184.63	184.63	11.18	-
3. Dana Alokasi Khusus Fisik	58.34	69.53	69.53	11.18	-
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	115.10	115.10	115.10	-	-
V. Dana Insentif Daerah	7.50	7.50	7.50	-	-
VI. Dana Otonomi Khusus dan DK DIY	20.34	19.99	20.24	(101.9)	251.2
B. Dana Otonomi Khusus	19.54	19.19	19.44	(101.0)	251.2
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	8.02	7.84	7.97	(50.9)	125.6
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8.02	7.84	7.97	(50.9)	125.6
3. Dana Tambahan Infakstruktur Dalam Rangka Otsus	3.50	3.50	3.50	-	-
B. Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta	800	800	800	-	-
>Dana Desa	60.00	60.00	60.00	-	6.54
JUMLAH	764.93	759.80	766.34	1.41	6.54

Menyikapi perubahan kebijakan anggaran yang menyesuaikan penyaluran DAU berdasarkan kemampuan penerimaan negara, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai mengurangi ketergantungan akan DAU sebagai sumber pembiayaan utama menjalankan pembangunan di daerahnya. Alternatif pembiayaan dan inovasi dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah harus segera dilakukan.

Hasil temuan BPK terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai juga dapat menjadi masukan dalam APBN Perubahan untuk dijadikan sebagai penambahan obyek yang harus didanai namun tetap disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan.

LAMPIRAN I.II. (Konsultasi Informal Dengan Mentor)





## LAMPIRAN I.III. (Surat Keterangan Melakukan Kegiatan)



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

### SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN NOMOR: BK/SETJEN DAN BK DPR RI/PA/05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Eko Adityo Ananto, S.E.  
NIP : 19880810 201503 1 001  
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama  
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan II Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan Aktualisasi pada 30 Mei 2018-30 September 2018. Adapun kegiatan Aktualisasi yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi Analisis Ringkas Cepat (ARC) Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPEN 2018 dan Siklus APEN Induk 2018 dengan output maksimal 10 dokumen ARC.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Mei 2018  
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE, M.Si.  
NIP. 19710911 199703 1 005

## **LAMPIRAN KEGIATAN II**

### **(Siklus Pembicaraan Pendahuluan)**

---

## LAMPIRAN II.I. (Database Referensi)

### - ARC Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

BAB 3 PERPRES RKP 2016	5/25/2018 4:17 PM	Adobe Acrobat D...	1,922 KB
BSK-24-Nilai-Tukar-Ferry	6/24/2018 11:13 AM	Adobe Acrobat D...	1,410 KB
Buku I RPJMN 2015-2019	6/4/2018 11:53 AM	Adobe Acrobat D...	5,604 KB
Defisit APBN	5/25/2018 4:29 PM	Adobe Acrobat D...	279 KB
History pertumbuhan-ekonomi-Indonesia-sejak-1961	7/13/2018 2:54 PM	Adobe Acrobat D...	113 KB

### - ARC Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah.

BAB 3 PERPRES RKP 2016	5/25/2018 4:17 PM	Adobe Acrobat D...	1,922 KB
BSK-24-Nilai-Tukar-Ferry	6/24/2018 11:13 AM	Adobe Acrobat D...	1,410 KB
Buku I RPJMN 2015-2019	6/4/2018 11:53 AM	Adobe Acrobat D...	5,604 KB

### - ARC Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Petani

RC Habitasi > Lampiran Output > ARC Pembicaraan Pendahuluan > ARC Subsidi Pupuk > Tahap II > Database Referensi

Name	Date modified	Type
086_LK_BUN_2012	8/30/2013 9:18 AM	Adobe Acrobat D...
086_LK_BUN_2013	9/17/2014 7:19 AM	Adobe Acrobat D...
86_LK_Bendahara_Umum_Negara_2015	9/19/2015 11:40 AM	Adobe Acrobat D...
87_LK_BUN_2014	9/18/2015 3:51 PM	Adobe Acrobat D...
092_LK_BA_999_07_2012	8/14/2015 2:30 PM	Adobe Acrobat D...
111_PDDT_Subsidi_Pupuk (BA 999.07)	8/31/2015 2:39 PM	Adobe Acrobat D...
112_DTT_Pengelolaan_dan_Pertanggungjawaban_Keuangan_Bagian_Anggaran_999.07_(Belanja_Subsidi_Pupuk)_TA_2015_pada_Kementan	3/16/2016 9:40 AM	Adobe Acrobat D...
844-ID-peta-masalah-pupuk-bersubsidi-di-indonesia-program-integritas-dan-akuntabilitas	7/22/2018 10:35 AM	Adobe Acrobat D...
8382-22962-1-PB (3)	7/20/2018 4:45 PM	Adobe Acrobat D...
54029-ID-alternatif-kebijakan-penyyaluran-subsidi	7/19/2018 10:24 AM	Adobe Acrobat D...
55218-ID-subsidi-pupuk-kebijakan-pelaksanaan-dan	7/9/2018 10:53 AM	Adobe Acrobat D...
A1 096 LK Bendahara Umum Negara Th2016	8/14/2017 3:33 PM	Adobe Acrobat D...
ANALISIS SISTEM SUBSIDI PUPUK _ KESIAPAN BUMI PUPUK (Mei 2017)	7/19/2018 10:08 AM	Adobe Acrobat D...
Buku I RPJMN 2015-2019	6/4/2018 11:53 AM	Adobe Acrobat D...
Buku II RPJMN 2015-2019	7/7/2018 9:48 PM	Adobe Acrobat D...
Buku III RPJMN 2015-2019	7/7/2018 9:52 PM	Adobe Acrobat D...
CriticalJournalPenilaianKebijakanPupuk	7/9/2018 11:34 AM	Microsoft Word 9...
EVALUASI-KEBIJAKAN-PERTANIAN-TAHUN-2016	7/23/2018 4:23 PM	Adobe Acrobat D...
JUKLAK_PENYEDIAAN_PUPUK_BERSUBSIDI_2018final_full	7/19/2018 10:20 AM	Adobe Acrobat D...
Kinerja Subsidi Pupuk	7/23/2018 11:04 AM	Adobe Acrobat D...
LAKIN Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2012	7/23/2018 2:08 PM	Adobe Acrobat D...
LAKIP DIT. PUKPES 2013	7/23/2018 2:54 PM	Adobe Acrobat D...
Laporan-kajian-subsidi-pertanian-KPK	7/16/2018 3:42 PM	Adobe Acrobat D...
MAFIA PUPUK ADALAH KEJAHATAN SISTEMIK DAN TEROR	7/23/2018 3:58 PM	Adobe Acrobat D...
OUTLOOK INDIKATOR MAKRO GLOBAL DAN SEKTOR PERTANIAN 2016-2019	7/23/2018 4:08 PM	Adobe Acrobat D...
SOPPupukdanPerluasanUjicobaSLP	7/17/2018 11:51 AM	Adobe Acrobat D...



## **LAMPIRAN II.II. (Catatan Kerangka Berpikir)**

### **Catatan Kerangka Berpikir Analisis Ringkas Cepat:**

Berdasarkan hasil diskusi dengan mentor pada tanggal 29 Mei 2018., untuk memudahkan penyusunan ARC perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Perbandingkan asumsi atau rencana yang diajukan oleh pemerintah dengan indicator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019;
2. Analisis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan situasi riil yang ada saat ini;
3. Buatlah perbandingan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun;
4. Batlah sebuah gambaran yang realistis dan komprehensif tentang rencana kerja tersebut dan dampaknya di masa yang akan datang.

## **LAMPIRAN KEGIATAN II**

### **(Siklus APBN Induk)**

---

LAMPIRAN II.I. (Database Referensi)

- ARC Fokus Pada Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Sumber Devisa

Name	Date modified	Type	Size
181-317-1-SM	9/15/2018 5:38 PM	Adobe Acrobat D...	359 KB
A1_56_Kinerja_Pemasaran_Pariwisata_201...	9/12/2018 2:42 PM	Adobe Acrobat D...	6,033 KB
Aktor sosial pariwisata	9/12/2018 4:20 PM	Adobe Acrobat D...	164 KB
Anggaran Pemasaran Pariwisata	9/13/2018 9:30 PM	Adobe Acrobat D...	520 KB
Indonesia2018	9/13/2018 6:02 PM	Adobe Acrobat D...	1,818 KB
KEMENPAR-Laporan-3-Th-Jkw-JK	9/13/2018 7:52 PM	Adobe Acrobat D...	3,462 KB
MPRA_paper_65628 Analisis Pariwisata	9/12/2018 4:03 PM	Adobe Acrobat D...	425 KB
note-keuangan-dan-rapbn-2019	8/23/2018 11:39 AM	Adobe Acrobat D...	19,772 KB
Paparan Kemenpar untuk KIDI 2016	9/19/2018 10:47 AM	Adobe Acrobat D...	11,331 KB
Pariwisata ASEAN	9/13/2018 4:10 PM	Adobe Acrobat D...	619 KB
PARWISATADANPERTUMBUHAN EKON...	9/15/2018 7:02 PM	Adobe Acrobat D...	301 KB
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi...	9/13/2018 6:47 PM	Adobe Acrobat D...	10,656 KB
Referensi Pariwisata	9/12/2018 4:25 PM	Microsoft Word D...	20 KB
Statistik Kunjungan Wisatawan Mancane...	9/15/2018 6:05 PM	Adobe Acrobat D...	5,010 KB

- ARC Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas

Name	Date modified	Type	Size
Bahan Paparan DPR 8 Agustus DAK Fisik ...	8/9/2018 5:18 PM	Microsoft PowerP...	3,087 KB
Bahan-Wamenkeu	9/17/2018 9:44 AM	Adobe Acrobat D...	4,513 KB
note-keuangan-dan-rapbn-2019	8/23/2018 11:39 AM	Adobe Acrobat D...	19,772 KB
Quality Spending-IMAM SUMARD/OKO	9/17/2018 9:39 AM	Adobe Acrobat D...	310 KB

- ARC Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel

Name	Date modified	Type	Size
2149-5874-1-PB	9/23/2018 9:35 AM	Adobe Acrobat D...	343 KB
2767-6359-1-SM	9/23/2018 9:32 AM	Adobe Acrobat D...	261 KB

- Analisis PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia

Name	Date modified	Type	Size
239-611-1-PB	9/23/2018 11:18 AM	Adobe Acrobat D...	751 KB
biro-apbn-apbn-Penyertaan-Modal-Negara-pada-BUMN-1441158796	9/22/2018 6:41 PM	Adobe Acrobat D...	673 KB
note-keuangan-dan-rapbn-2019	9/23/2018 6:45 PM	Adobe Acrobat D...	19,772 KB
Regresi-Linier-Berganda-Eviews	9/23/2018 2:24 PM	Adobe Acrobat D...	1,569 KB



## **LAMPIRAN II.II. (Catatan Kerangka Berpikir)**

### **Catatan Kerangka Berpikir Analisis Ringkas Cepat:**

Berdasarkan hasil diskusi dengan mentor pada tanggal 29 Mei 2018., untuk memudahkan penyusunan ARC perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Perbandingkan asumsi atau rencana yang diajukan oleh pemerintah dengan indicator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019;
2. Analisis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan situasi riil yang ada saat ini;
3. Buatlah perbandingan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun;
4. Batlah sebuah gambaran yang realistis dan komprehensif tentang rencana kerja tersebut dan dampaknya di masa yang akan datang.

## **LAMPIRAN KEGIATAN III**

### **(Siklus Pembicaraan Pendahuluan)**

---

### **LAMPIRAN III.I. (Bahan Notulensi Rapat Banggar) \***

**\*) Digunakan sebagai bahan penyusunan semua ARC di Siklus Pembicaraan Pendahuluan**

**POINTERS DAN KESIMPULAN  
RAPAT BADAN ANGGARAN DPR RI DENGAN MENTERI KEUANGAN,  
MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS DAN GUBERNUR BANK INDONESIA  
TANGGAL 31 MEI 2018 JAM 14:00 WIB**

**AGEND            ACARA:**

1. Penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2019
2. Penyampaian Perkembangan Ekonomi Terkini Prospek dan Kebijakan BI
3. Pemaparan Isu-isu dan program Strategi Nasional Bappenas

**SAMBUTAN PIMPINAN BADAN ANGGARAN DPR RI:**

Tidak ada sambutan khusus dari Ketua Badan Anggaran DPR RI, namun sebelum memulai rapat Ketua badan Anggaran meminta seluruh hadirin baik Anggota Badan Anggaran DPR-RI bersama dengan Pemerintah menyepakati terlebih dahulu pengesahan jadwal rapat dan agenda rapat pada hari ini yakni penyampaian oleh Menteri Keuangan; Perkembangan Ekonomi Terkini Prospek dan Kebijakan BI oleh Gubernur Bank Indonesia, dan Isu dan Program Strategis Nasional oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

**PENJELASAN MENTERI KEUANGAN:**

**Kerangka Ekonomi Makro**

Perekonomian Global tengah menuju pada titik keseimbangan baru

Perekonomian Indonesia pada awaln ya memiliki optimisme cukup tinggi, akan tetapi dalam konteks ekonomi global akhir 2017 hingga awal 2018. perekonomian mengalami adjustment yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait kenaikan U.S Treasury yield sehingga kedepannya diperkirakan hingga 2019 likuiditas global akan semakin tipis dan berpotensi meningkatkan tekanan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN akan ditempuh melalui program-program kerja pemerintah. Dalam pelaksanaan program itu juga akan diikuti dengan alokasi anggaran dalam APBN dan arah kebijakan fiskal, penyusunan postur APBN dan arah kebijakan tersebut perlu ditopang oleh asumsi ekonomi makro yang kredibel, dimana asumsi-asumsi makro ini akan memberikan dasar bagi perkiraan kinerja penerimaan dan pengeluaran negara serta arah kebijakan yang perlu disusun pemerintah

Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018 -2019



Indikator	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	APBN	Perkiraan
a. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,02	5,07	5,4	5,4 -5,8
b. Inflasi (% yoy)	3,02	3,61	3,5	2,5 -4,5
c. Tingkat Suku Bunga SPN-3 bulan (%)	5,7	4,98	5,2	4,6 -5,2
d. Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.307	13.382	13400	13.700-14.000
e. Harga Minyak mentah Indonesia (US\$/Barel)	40,2	51,2	48	60-70
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	829	803,91	800	722-805
G. Lifting Gas (ribu minyak setara minyak per hari)	1.180	1.142,33	1.200	1.210 - 1.300

Sumber: Kementerian Keuangan

### Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019, ekonomi nasional diperkirakan masih berada dalam tren peningkatan yang akan tumbuh pada kisaran 5,4 hingga 5,8 persen yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang produktif, tahun 2019 akan berlangsung pemilihan umum. Untuk itu, kepercayaan masyarakat harus terus dijaga sehingga diperlukan kestabilan untuk menjamin kepastian politik dan keamanan, penyelesaian pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama untuk mendorong perekonomian dengan harapan inflasi tetap terjaga, adanya perbaikan kinerja ekspor, dan perbaikan persepsi investor.

### Tingkat Inflasi

Inflasi diperkirakan akan tetap terkendali di 2019, pencapaian target inflasi di 2019 dimana akan didukung oleh program-program peningkatan dan perbaikan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional serta menjamin kelancaran distribusi antar wilayah. Risiko yang harus dimitigasi terkait inflasi yaitu kenaikan harga minyak global. Pencapaian laju inflasi ini perlu terus dijaga dengan dukungan dari seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah.

Menteri Keuangan melewati/men-skip pembahasan mengenai nilai tukar dan suku bunga karena itu dianggap ranah gubernur BI

### Suku Bunga SPN 3 Bulan

Suku bunga SPN 3 bulan diasumsikan diatas 5 persen, akan tetapi kenyataan yang sesungguhnya berada di kisaran 4,5 persen, hal ini didukung oleh kredibilitas APBN. Meski demikian ada risiki yang harus dimitigasi terkait hal ini yaitu potensi kenaikan Fed fund rate.

### Harga Minyak

Harga minyak adalah hal asumsi ekonomi makro yang tersulit untuk diprediksi. Meskipun kecenderungan harga minyak terus menurun, di tahun 2018 ini harga minyak sempat melompat ke harga \$60-\$80 per barel disebabkan oleh anggota OPEC yang telah mulai disiplin dalam mengatur supply minyak, contohnya Arab Saudi dan Rusia menaikkan produksi sebagai kompensasi penurunan produksi Venezuela

Menteri Keuangan tidak memaparkan lifting Minyak dan Gas.

### Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal



Kebijakan pemerintah ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sustainable, penyediaan barang publik,antisipasi kegagalan pasar, serta mendistribusikan pendapatan dan perlindungan sosial.

Tema RKP 2019 yakni Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas, sementara tema kebijakan fiskal 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Fokus kebijakan fiskal pemerintah yaitu (1) menjaga kesehatan fiskal yang dilakukan secara produktif,efisien, daya tahan dan sustainable, (2) Kebijakan fiskal mendorong iklim investasi dan ekspor yang dilakukan dengan simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas layanan publik, pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor.

Dari sisi pengelolaan fiskal, pemerintah masih menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu: (1) ruang fiskal yang masih terbatas sehingga diperlukan mobilisasi pendapatan; (ii) kualitas belanja yang perlu dipertajam melalui penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan non proiritas, serta percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output; (iii) efektifitas bansos,subsidi, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang perlu ditingkatkan; (iv) belanja yang bersifat mengikat yang lebih terkendali; dan (v) pengelolaan defisit yang lebih terkendali dalam batas aman serta keseimbangan primer menuju positif melalui efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2019 yang akan ditempuh adalah: (i) MobilisasiPendapatan yang Realistis, yang dilakukan dengan: (a) menjaga peningkatan trend tax ratio, (b) inesebtif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor, (c) pengelolaan SDA dan Aset, (d) penguatan pengelolaan aset, (e) peningkatan kualitas pelayanan publik.(ii) Strategi Belanja Agar Lebih Efektif dan Produktif yang dilakukan dengan cara: (a) penguatan SDM untuk peningkatan skill dan produktivitas, (b) mendorong investasi dan eskpor, (c) efektivitas program perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, (d) melanjutkan infrastruktur untuk daya saing dan kapasitas produksi, (e) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien, (f) penguatan kualitas desentralisasi fiskal. (iii) Pembiayaan yang Efisien dan Kreatif, dilakukan dengan cara: (a) pembiayaan kreatif dan inovatif pelibatan peran swasta, (b) defisit dan rasio utang terkendali dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, (c) keseimbangan primer menuju positif, (d) pembiayaan investasi untuk peningkatan akses UMKM, Peningkatan ekspor. Maka postur makro fiskal tahun 2019 disusun dengan: (1) menjaga defisit tetap terkendali pada kisaran 1,6-1,9 persen terhadap PDB, (ii) pendapatan negara dan hibah diupayakan mencapai 12,7-13,5 persen terhadap PDB, dan (iii) belanja negara dijaga pada kisaran 14,2-15,4 persen terhadap PDB.

Penerimaan negara yang berasal dari PNPB SDA merupakan yang paling sulit dalam hal prediktibilitas karena sangat tergantung dari volatilitas harga dan kuantitas ekspor. Sementara belanja negara 2019 terdiri dari 6 prioritas yaitu: (i) SDM, menyangkut pendidikan, kesehatan, vocational, dan R&D, (ii) dukungan fiskal bagi investasi dan ekspor, (iii) efektifitas bansos subsidi dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), (IV) fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan mendorong skema KPBU, (v) fiskal untuk membangun birokrasi yang lebih efisien, (vi) fisikal untuk menjaga indonesia dari ketidakpastian, bencana alam, perubahan iklim.. belanja modal harus lebih dialokasikan untuk belanja modal sebagaimana Preseden RI meminta agar dilakukan efisiensi belanja barang baik itu yang bersifat operasional maupun non operasional. Belanja modal ditujukan untuk meningkatkan aset pemerintah.

Subsidi energi difokuskan pada sebsidi epiji 3 kg dan pengguna listrik berdaya 450 KVA, sementara subsidi bansos difokuskan pada perbaikan mekasisme subsidi langsung pupuk, subsidi LRT Jabodetabek, subsidi suku bunga KUR, dan insentif pajak yang ditanggung pemerintah (DTP). terkait TKDD yang tren nya terus meningkat, hal yang masih menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana menyelaraskan TKDD dengan memangkass tumpang tundih belanja yang terjadi antara K/L dan daerah. Terkait Pembiayaan Anggaran, tren defisit semakin mengecil karena pembiayaan dilakukan dengan mekasisme yang produktif, baik dengan skema bilateral maupun multilateral pembiayaan utang akan tetap dijaga di bawah 30 persen dari PDB. Pada intinya pemerintah berusaha untuk menjaga utang dari dalam maupun luar negeri dalam batas aman.

**PENJELASAN GUBERNUR BANK INDONESIA:**



Sejak awal tahun, khususnya sejak awal Februari seiring dengan membaiknya ekonomi Amerika Serikat memicu ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan dengan kemungkinan akan terjadi 4 kali kenaikan. Disamping itu juga terjadi perubahan landscape kebijakan fiskal di AS untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan cara penurunan tarif fiskal, hal itu meningkatkan risiko ketidakpastian baik di AS, Tiongkok, Eropa dan kawasan lainnya. Kemudian secara moneter kenaikan suku bunga U.S. Treasury Bills dari 2,1 persen, 3,19 persen hingga 3,35 persen saat ini memicu arus dana kembali ke AS disamping faktor ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed.

### Ekonomi Dalam Negeri

Di dalam negeri, perekonomian Indonesia secara umum cukup baik dan solid. Bank Indonesia mencatat bagaimana Indonesia mampu bertahan dan keluar dari pengaruh Krisis Subprime Mortgage, Krisis Yunani, Krisis Eropa, dan Pengaruh Brexit. Pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan, laju inflasi terkendali, defisit berjalan terkendali berada di kisaran 2,1 persen, cadangan devisa terjaga dan setara enam bulan ekspor, stabilitas sistem keuangan cukup baik khususnya dilihat dari sisi permodalan, kenaikan penyaluran kredit, dan penurunan kredit bermasalah (NPL).

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat koordinasi dan ketahanan terhadap tekanan global. Di tahun 2018, BI mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1-5,5 persen, defisit transaksi berjalan tidak lebih dari 2,5 persen, nilai tukar berada di kisaran 13.800-14.100 per USD, dan tingkat inflasi pada 3,5 (+/-) 1 persen. Untuk tahun 2019, terdapat peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 5,2 - 5,6 persen yang disebabkan oleh adanya stimulus fiskal, kenaikan harga komoditas, dan naiknya investasi swasta. Defisit Transaksi Berjalan pada kisaran 2-2,5 persen dari PDB disebabkan membaiknya neraca perdagangan akibat komoditas ekspor, Nilai Tukar berada di kisaran 13.800-14.100, laju Inflasi 3,5 (+/-) 1 persen yang ditopang oleh terkendalinya permintaan, terjaganya ekspektasi, dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Pada intinya BI akan terus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan bauran kebijakan yang dimiliki antara lain: (i) Kebijakan Moneter, untuk memperkuat stabilitas, (ii) Kebijakan Makroprudensial, Contohnya yaitu pengatutan uang muka KPR sebagai upaya relaksasi, (iii) Pendalaman Pasar Keuangan, dilakukan dengan pembiayaan infrastruktur yang melibatkan sektor swasta, (iv) Pengembangan Ekonomi Syariah, (v) Sistem Pembayaran, contohnya yaitu penerapan *payment gateway*.

Saat ini BI berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dengan upaya sebagai berikut: (i) melakukan respon kebijakan suku bunga dengan kenaikan sebesar 25 basis point menjadi 4,75 persen, (ii) intervensi di pasar valas dan pasar surat berharga, (iii) operasi moneter untuk memastikan likuiditas di pasar uang dan pasar valas, menjalin komunikasi efektif dengan pelaku pasar, perbankan, dan para ekonom.

### PENJELASAN WAKIL MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Program Prioritas Nasional I di 2019 yaitu Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar dicapai melalui: (i) Percepatan Pengurangan kemiskinan, (ii) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, (iii) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, (iv) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.

Isu Strategis Prioritas Nasional II antara lain: (i) belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan, (ii) tingginya harga logistik pada daerah-daerah dengan aksesibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat, (iii) rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan dan pendidikan, (iv) kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana, (v) belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik pertanian dan perikanan. Isu Strategis Prioritas Nasional ini hendak diselesaikan dengan Program Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Peningkatan Konektivitas dan Kemaritiman.



Isu Strategis Prioritas Nasional III antara lain: (i) rendahnya nilai tambah ekonomi dan pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, (ii) belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, (iii) rendahnya nilai tambah dan daya saing produk Industri, (iv) rendahnya pemanfaatan iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah, (v) belum optimalnya penciptaan nilai tambah jasa produktif. Isu Strategis Prioritas Nasional III ini hendak diatasi melalui program Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.

Isu Strategis Prioritas Nasional IV antara lain: (i) produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat, (ii) harga pangan (khususnya beras) yang masih berfluktuatif dan cenderung meningkat, (iii) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian dan industri, (iv) tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi. Isu Strategis Prioritas Nasional ini hendak diatasi dengan program Pemantapan Ketahanan Energi, pangan dan Sumber Daya Air.

Isu Strategis Prioritas Nasional V antara lain: (i) tingginya angka kejahatan siber, narkoba dan konvensional, (ii) kerawanan pelaksanaan PEMILU dan netralitas ASN, (iii) dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara, (iv) belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi, (v) perlunya penguatan diplomasi yang efektif. Isu strategis ini hendak diatasi dengan program Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

#### **KESIMPULAN RAPAT KERJA/CLOSING STATEMENT PEMERINTAH::**

Menteri keuangan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI akan ada laporan capaian di semester I 2018. Disamping itu menegaskan bahwa Defisit adalah strategi yang digunakan pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan global karena untuk negara-negara yang tidak memiliki ruang fiskal yang cukup maka penggunaan instrumen utang itu dianjurkan dalam upaya mengakumulasi aset selagi mampu dan kemudian menggunakannya pada saat tidak mampu.

Gubernur Bank Indonesia menyampaikan alasan untuk menaikkan lagi suku bunga *7 days repo rate* baru-baru ini sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen adalah berdasarkan pertimbangannya terhadap dampak kepada nilai tukar yang sangat berdampak signifikan dan segera terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya kenaikan suku bunga digunakan untuk mendanai kredit-kredit infrastruktur seperti kredit perumahan.

Ketua Badan Anggaran DPR RI menyatakan belum ada penjadwalan mengenai acara untuk APBNP dan meminta kepada pemerintah untuk bersama menjalankan jadwal pembahasan yang telah disepakati.

## LAPORAN

### RAPAT PANJA ASUMSI DASAR, KEBIJAKAN FISKAL, PENDAPATAN, DEFISIT, & PEMBIAYAAN

Senin, 2 Juli 2018, Pukul 09.00 s.d. 12.30 WIB

- I. Pengambilan Keputusan atas Asumsi Makro hasil pembahasan Komisi XI dan Pemerintah, disetujui di Badan Anggaran, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Indikator	Kesepakatan			
	KEM PPKF	Komisi XI	Komisi VII	Panja Asumsi Dasar
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,4 – 5,8	5,2 – 5,6		5,2 – 5,6
Inflasi (% , yoy)	2,5 – 4,5	2,5 – 4,5		2,5 – 4,5
Tingkat Suku Bunga SPN-3 Bulan (%)	4,6 – 5,2	4,6 – 5,2		4,6 – 5,2
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.700 – 14.000	13.700 – 14.000		13.700 – 14.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	60 – 70		60 – 70	60 – 70
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	722 – 805		722 – 805	722 – 805
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.210-1.300		1.210-1.300	1.210-1.300

Catatan:

Angka Pertumbuhan ekonomi sebaiknya dikisaran 5,2 - 5,4, dasarnya adalah selama ini sejak tahun 2015 hingga 2017, pertumbuhan ekonomi belum pernah mencapai target.

- II. Pengambilan keputusan tentang Target Pembangunan Nasional 2019 hasil Pembahasan Komisi XI dan Pemerintah, disetujui di Badan Anggaran, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Indikator	Kesepakatan	
	KEM PPKF	Panja Asumsi Dasar
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,2	4,8 – 5,2
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,5	8,5 – 9,5
Rasio Gini	0,38 – 0,39	0,38 – 0,39
Indeks Pembangunan Manusia	71,98	71,98

Catatan:

Indeks rasio gini seharusnya dinaikkan targetnya menjadi 0,37 – 0,38, agar dapat memaksa kebijakan Pemerintah untuk menyusun cara bagaimana menurunkan angka rasio gini. Karena pemerintah sudah membangun infrastruktur dan ada dana desa yang seharusnya mampu mendukung pemerataan di Indonesia.

- III. Rapat diskors sampai tanggal 3 Juli 2018 Pukul 14.00 WIB untuk membahas dan mengambil keputusan tentang subsidi.

- IV. Isu-Isu yang dibahas dalam Panja Asumsi Dasar Ekonomi Makro:



1. Tax Amnesty, bagaimana perkembangan deklarasi aset orang Indonesia yang parkir di luar negeri. Dan kemungkinan Tax Amnesty dilakukan kembali.
2. Target pertumbuhan ekonomi sebaiknya dibuat mendekati realita pencapaian selama ini, sebaiknya tidak dibuat terlalu tinggi namun kemungkinan tercapai besar.
3. Isu PNBPN, sebaiknya PNBPN lebih difokuskan untuk menstimulus perekonomian atau meningkatkan produktivitas, bukan sebagai sumber penerimaan. Contohnya PNBPN di sektor maritim, sektor ini mengalami penurunan produktivitas, namun kontribusi PNBPNnya naik pesat, sehingga mengalami kesulitan untuk mengembangkan sektor maritim. Begitu juga PNBPN yang berasal dari BUMN. Target PNBPN dari BUMN yang tinggi dapat menyebabkan mengganggu fungsi BUMN sebagai agent of development dan stabilitas pasar. Hal ini terjadi pada PLN yang dituntut PNBPN besar, akhirnya menekan masyarakat dengan menaikkan tarif listrik.
4. Dalam menargetkan PNBPN dari migas, sebaiknya pemerintah tidak hanya menggunakan perubahan harga ICP saja, namun juga mempertimbangkan volume produksinya agar tidak terjadi *lazy policy* di sektor migas.
5. Metode pencatatan APBN sebaiknya menggunakan metode yang sama baik pencatatan penerimaan maupun pengeluaran dari tahun ke tahun, dan apabila terjadi perubahan metode, pemerintah sebaiknya memberitahu.
6. Dasar *year on year* (yoy) sebaiknya mulai direvisi. Di luar negeri, dasar tahun biasanya digunakan paling lama 5 (lima) tahun, tidak lebih.
7. Buat skema penerimaan negara baik dari pajak maupun dari PNBPN dengan baik sehingga diharapkan akan lebih mudah mencapai target serta kebijakannya juga harus konsisten agar pelaku bisnis mudah dalam menerapkannya.
8. Kanwil pajak di Papua yang memiliki wilayah kerja meliputi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara sebaiknya dievaluasi ulang karena cakupan wilayahnya yang luas dan merupakan daerah kepulauan. Jika memungkinkan dari sisi jumlah wajib pajak, cakupan wilayah, dan potensi pajaknya dimungkinkan dibuka kanwil baru agar mampu menghimpun pajak di wilayah tersebut secara lebih optimal.
9. Mengapresiasi pinjaman perumahan dengan transaksi dibawah 500 (lima ratus) juta dibebaskan PPHTB oleh Bank Sentral.
10. Mengenai defisit anggaran, sebaiknya ditetapkan target yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat realistis dalam mencapainya.
11. Apresiasi terhadap pengurangan pajak yang dikenakan pada UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Sebaiknya insentif fiskal digunakan untuk menstimulus perekonomian sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan UMKM dan brujung pada peningkatan dari pajak pendapatan maupun badan.
12. *Tax Holiday* ditujukan kepada industri hulu yang merupakan penanam modal baru, terutama untuk industri yang memproduksi barang substitusi impor agar dapat memperbaiki *current account*.
13. Pemerintah harus fokus juga terhadap pemungutan pajak perusahaan asing. SDM pajak juga senantiasa diberikan peningkatan kapasitas untuk menelusuri kemungkinan penggelapan atau *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan asing.
14. Pemerintah harus mampu mengelola utangnya, terutama utang jangka pendek.



Dalam rapat internal Badan Anggaran disepakati sebagai berikut:

**A. Laporan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan**

Dalam hal pembiayaan yang bersumber dari PMN, agar Pemerintah melakukan:

1. Peninjauan kembali urgensi pembiayaan PMN tersebut.
2. Agar pembiayaan PMN disesuaikan dengan keterbatasan anggaran/APBN.
3. Jika akan dilakukan PMN, agar dipinutukan dalam penugasan khusus yang berkaitan dengan bidang infrastruktur.

**B. Laporan Panja RKP dan Prioritas Anggaran**

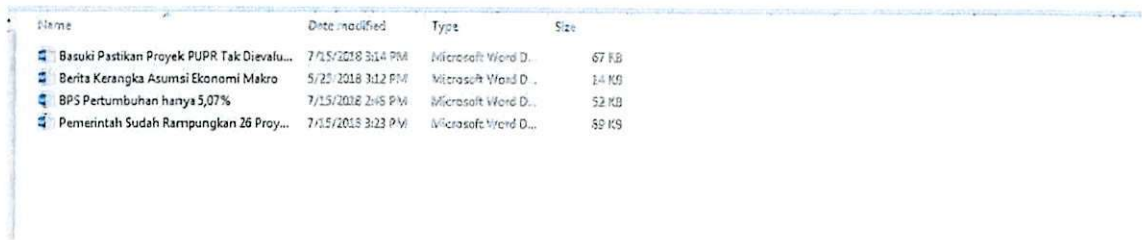
1. Memperkuat kurikulum pendidikan dalam rangka membangun karakter bangsa dan revolusi mental, (halaman 4 poin 3)
2. Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan berdasarkan kebutuhan industri khususnya menghadapi revolusi industri 4.0
3. Program sertifikasi Pancasila melalui BPIP agar dibuat dalam bentuk produk-produk operasional yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pemukiman. Produk-produk operasional tersebut juga disesuaikan dengan tingkatannya, misalnya pada tingkat pendidikan SD dan SLTP, perlu dibuat buku-buku seperti komik bergambar tentang pengamalan Pancasila yang mudah dimengerti dan dipahami.
4. Agar Pemerintah memasukkan dalam Prioritas Nasional 2, penanggulangan dampak bencana akibat Rob
5. Bahwa Pemerintah seharusnya menyelesaikan secara menyeluruh korban lumpur Lapindo dari unsur pelaku usaha dan rumah tangga sekaligus tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanah wakaf yang ada di dalam peta area terdampak. Karena ini perintah konstitusi seperti Pemerintah harus buat ganti rugi tanah milik pelaku usaha dan rakyat serta untuk tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial dan tanah wakaf di luar peta area terdampak.
6. Meningkatkan sumber daya manusia para pelaku wisata dan masyarakat di destinasi wisata dan sekitarnya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan.

**C. Laporan Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat**

1. Menyusun Cetak Biru Pendidikan untuk memandu arah pendidikan dan penyusunan kurikulum yang sesuai (Halaman 3 Bidang Pendidikan)
2. Agar Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran kenaikan gaji/penghasilan bagi Purnawirawan TNI/Polri, Veteran, Warakawuri yang selama 4 (empat) tahun ini tidak pernah mengalami kenaikan.
3. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan anggaran Badan SAR Nasional yang memadai berkaitan dengan fungsi operasional penyelamatan kecelakaan, bencana dan lainnya, serta penambahan personil (SDM), sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyelamatan.
4. Kebijakan Pemerintah untuk mengalokasikan dana sakti dalam pelaksanaan Pemihapan Umum dan APBN.

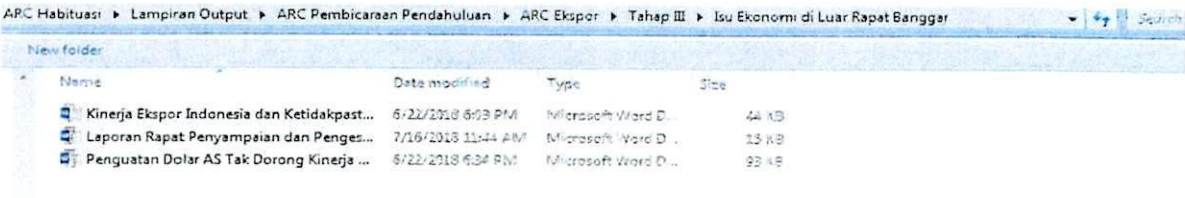
**LAMPIRAN III.II. (Isu Ekonomi di luar Rapat Banggar)**

- **ARC Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019**



Name	Date modified	Type	Size
Basuki Pastikan Proyek PUPR Tak Dievalu...	7/15/2018 3:14 PM	Microsoft Word D...	67 KB
Berita Kerangka Asumsi Ekonomi Makro	5/25/2018 3:12 PM	Microsoft Word D...	14 KB
BPS Pertumbuhan hanya 5,07%	7/15/2018 2:45 PM	Microsoft Word D...	52 KB
Pemerintah Sudah Rampungkan 26 Proy...	7/15/2018 3:23 PM	Microsoft Word D...	59 KB

- **ARC Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah.**



ARC Habitasi > Lampiran Output > ARC Pembicaraan Pendahuluan > ARC Ekspor > Tahap III > Isu Ekonomi di Luar Rapat Banggar

Name	Date modified	Type	Size
Kinerja Ekspor Indonesia dan Ketidakpast...	6/22/2018 6:03 PM	Microsoft Word D...	44 KB
Laporan Rapat Penyampaian dan Penges...	7/16/2018 11:44 AM	Microsoft Word D...	13 KB
Penguatan Dolar AS Tak Dorong Kinerja ...	5/22/2018 6:34 PM	Microsoft Word D...	93 KB

- **ARC Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Petani**



Name	Date modified	Type	Size
Pemerintah Dikritik Karena Terlalu Banya...	9/30/2018 3:57 PM	Microsoft Word D...	249 KB

## **LAMPIRAN KEGIATAN III**

### **(Siklus APBN Induk)**

---



### LAMPIRAN III.I. (Bahan Notulensi Rapat Banggar)\*

- \*) Digunakan sebagai bahan penyusunan semua ARC pada Siklus APBN Induk. Khusus untuk ARC Analisis PMN LPEI terdapat tambahan *evidence* berupa file *audio* Rapat Banggar tanggal 20 September 2018**

Name	Date modified	Type	Size
Isu di Luar Rapat Banggar	9/30/2018 4:11 PM	File folder	
Bahan Bank Indonesia	9/12/2018 2:10 PM	Adobe Acrobat D...	2,082 KB
Bahan Bappenas	9/12/2018 2:10 PM	Adobe Acrobat D...	2,782 KB
Bahan Kemenkeu	9/12/2018 2:10 PM	Adobe Acrobat D...	3,892 KB
Catatan TA BANGGAR	9/12/2018 2:10 PM	Adobe Acrobat D...	842 KB
Rancangan Siklus (bahan raker)	9/12/2018 2:10 PM	Adobe Acrobat D...	429 KB

### LAMPIRAN III.II. (Isu Ekonomi di luar Rapat Banggar)

- ARC Fokus Pada Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Sumber Devisa**

Name	Date modified	Type	Size
Referensi Pariwisata	9/12/2018 1:25 PM	Microsoft Word D...	29 KB

- ARC Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas**

Name	Date modified	Type	Size
LAPORAN TKDD_09082018_BAKN	9/17/2018 5:17 AM	Microsoft Word D...	527 KB

- ARC Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel**

Name	Date modified	Type	Size
-#1 final RDP VERSI PANJANG P2P-EDIT ...	9/19/2018 10:20 AM	Microsoft PowerP...	13,309 KB
Penyakit Katastropik JKN	9/22/2018 10:08 AM	Microsoft Word D...	165 KB

- Analisis PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia**

Name	Date modified	Type	Size
Bahan BUMN dan BLU (compile)	9/22/2018 10:29 AM	Microsoft Word D...	1,462 KB

## **LAMPIRAN KEGIATAN IV**

---

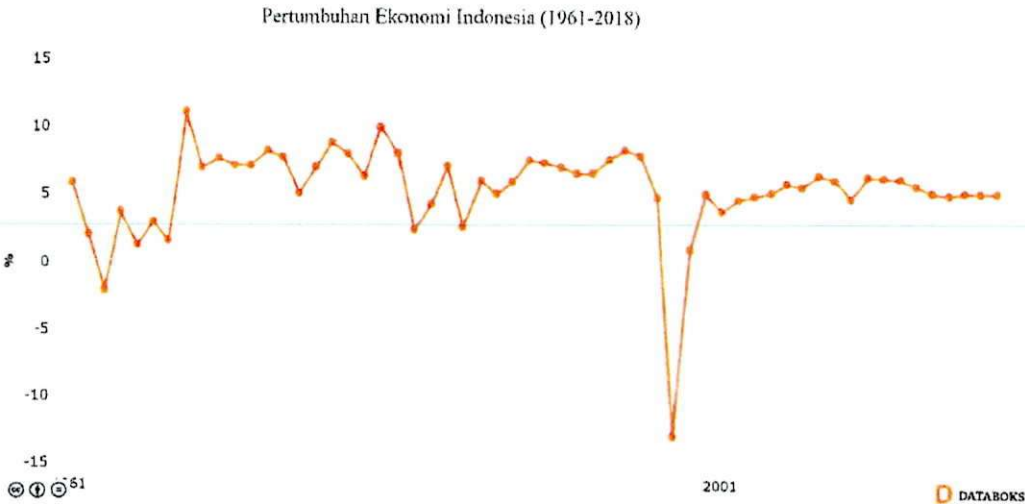
### **(Siklus Pembicaraan Pendahuluan)**

LAMPIRAN IV (Rekapitulasi dan Olah Data)

- ARC Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

Inilah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak 1961

Melambatnya konsumsi domestik yang berimbas terhadap lesunya dunia usaha membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 di bawah target APBN-P 2017. Secara kumulatif, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sepanjang triwulan I-III 2017 tumbuh 5,03% dari yang ditargetkan sebesar 5,2%. Sedangkan pada 2018 ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh 5,4%. Sejak 1961, ekonomi Indonesia secara umum selalu mengalami pertumbuhan dan hanya dua kali mengalami kontraksi. Pertumbuhan PDB Indonesia tertinggi dicatat pada 1968 atau awal era Orde Baru, yakni mencapai 10,92%. Sementara di era reformasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicatat pada 2007, yaitu sebesar 6,35%. Namun, ekonomi Indonesia juga pernah mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif, yakni pada 1963 di era Orde Lama dan pada 1998 saat terjadi krisis finansial Asia. Terjadinya krisis yang dibarengi dengan aksi kerusuhan di seluruh tanah air membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sangat dalam hingga -13,13%. (Baca Databoks: 2018, Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 5,3 Persen)



- ARC Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah.





- ARC Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Petani



## **LAMPIRAN KEGIATAN IV**

### **(Siklus APBN Induk)**

LAMPIRAN IV (Rekapitulasi dan Olah Data)

- ARC Fokus Pada Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Sumber Devisa

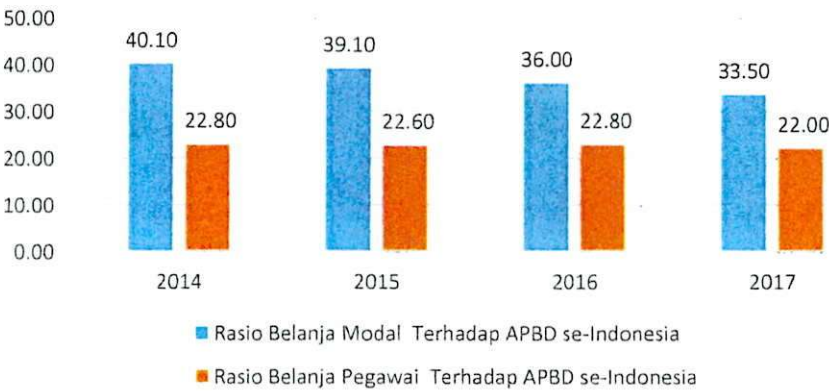
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Devisa RI  
Tahun 2014-2017 (Miliar USD)



Sumber : Katadata (2018).

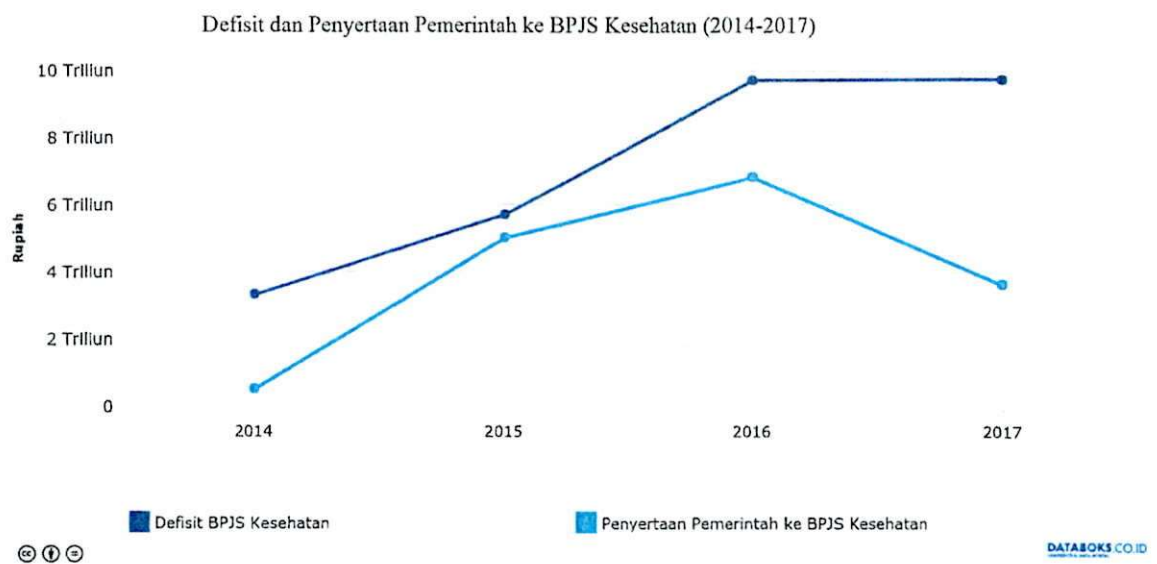
- ARC Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas

Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Pegawai  
Dalam APBD  
2014-2017





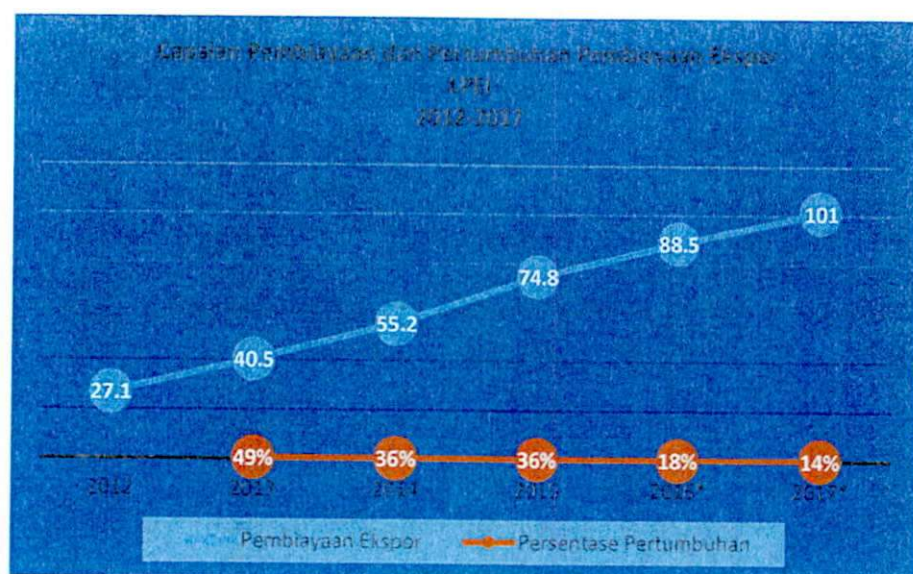
- **ARC Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel**



- **Analisis PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia**

Dependent Variable: PEMBIAYAAN\_EKSPOR\_  
 Method: Least Squares  
 Date: 09/23/18 Time: 13:46  
 Sample: 2015 2017  
 Included observations: 3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	98.33425	15.672	6.274517	0.1006
PMN	4.767956	5.200937	0.916749	0.5276
R-squared	0.456649	Mean dependent var		111.3667
Adjusted R-squared	-0.086703	S.D. dependent var		10.96099
S.E. of regression	11.42629	Akaike info criterion		7.944432
Sum squared resid	130.5601	Schwarz criterion		7.343507
Log likelihood	-9.916648	Hannan-Quinn criter.		6.736496
F-statistic	0.840429	Durbin-Watson stat		2.002762
Prob(F-statistic)	0.527633			



## **LAMPIRAN KEGIATAN V**

### **(Siklus Pembicaraan Pendahuluan)**

---



## LAMPIRAN V (Draft Analisis Sementara)\*

\*) Untuk rancangan infografis akan dilampirkan di Kegiatan VII

### Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

Berdasarkan hasil Rapat antara Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Bappenas) dan Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2018, Pemerintah mengajukan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-5,8% pada RAPBN 2019. Sedangkan Bank Indonesia mengajukan proyeksi sedikit dibawah Pemerintah yaitu sebesar 5,2%-5,6%. Apabila dilihat sekilas dari proyeksi tersebut, hal tersebut sangat jauh dari apa yang ditargetkan oleh Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 8% pada tahun 2019. Bahkan asumsi atau proyeksi tersebut sebenarnya juga kurang realistis apabila melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi belakangan ini.

Ketidakrealistisan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut dipertegas dengan selalu melesetnya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR RI selama tiga tahun berturut-turut. Perkembangan terakhir pada TA 2017 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,07% dibawah target APBNP 2017 sebesar 5,2% (BPS, 2017). Namun, pencapaian 5,07% ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2014. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari kinerja ekspor Indonesia sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, yang belum mencapai harapan dikarenakan ada perlambatan ekonomi global yang menurunkan *demand* ekspor khususnya non migas. Penurunan ini secara eksternal disebabkan oleh kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang berdampak sistemik secara *indirect* pada kinerja ekspor Indonesia. Sementara secara internal berkaitan dengan belum kompetitifnya sarana prasarana penunjang ekspor. Alhasil, pemerintah mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonominya.

Pemerintah pada Tahun Anggaran 2019 mengusung tema kebijakan fiskal 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Terkait dengan investasi, apabila dilihat dari perilaku investor, mereka cenderung untuk *wait and see* pada tahun 2019 yang bertepatan dengan pilpres dan pileg. Hal tersebut berkaitan dengan kemungkinan timbulnya ketidakpastian karena kemungkinan perubahan regulasi. Untuk daya saing, pemerintah berencana untuk memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan ekspor. Disatu sisi beberapa analisa dari lembaga riset dan perbankan menyakini bahwa kinerja ekspor di tahun politik ini akan melambat. Berbagai persoalan fundamental seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi menjadi faktor penghambat kinerja ekspor. Pada tahun politik seperti ini akan lebih baik bagi pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan dengan memprioritaskan peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Khusus belanja pemerintah, pemerintah perlu fokus pada peningkatan Belanja Modal yang diarahkan untuk produktivitas dan konektivitas serta menyerap tenaga kerja. Target pertumbuhan sebesar 5,4%-5,8% tidak mustahil tercapai, namun membutuhkan kerja keras dan koordinasi yang optimal antar K/L yang mungkin agak sulit dilakukan pada tahun politik.



### Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Dalam rapat antara Banggar DPR RI dengan Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Bappenas) serta Bank Indonesia (BI) pada tanggal 31 Mei 2018, Pemerintah bersama BI mengajukan asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

Indikator	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	APBN	Perkiraan
a. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,02	5,07	5,4	5,4-5,8
b. Inflasi (% yoy)	3,02	3,61	3,5	2,5-4,5
c. Tingkat Suku Bunga SPN-3 bulan (%)	5,7	4,98	5,2	4,6-5,2
d. Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.307	13.382	13400	13.700-14.000
e. Harga Minyak mentah Indonesia (US\$/Barel)	40,2	51,2	48	60-70
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	829	803,91	800	722-805
g. Lifting Gas (ribu minyak setara minyak per hari)	1.180	1.142,33	1.200	1.210 - 1.300

**Sumber: Kementerian Keuangan**

Pada tahun 2019, pemerintah memprediksi pertumbuhan akan mencapai 5,4%-5,8% yang disertai dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ sebesar Rp13.700-Rp14.000. Sementara itu di tahun 2018, Pemerintah bersama DPR telah bersepakat bahwa pertumbuhan ditetapkan di angka 5,4% dengan nilai nilai tukar Rupiah terhadap US\$ sebesar Rp13.400. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa pemerintah ingin mencapai pertumbuhan yang sama bahkan lebih tinggi dengan nilai tukar Rupiah terhadap US\$ yang cenderung melemah. Tentu hal tersebut cukup riskan karena dengan mematok nilai tukar Rupiah yang lebih rendah hal tersebut akan berdampak pada membengkaknya pembayaran bunga dan pokok hutang dalam APBN dan juga berdampak pada perlambatan investasi sektor swasta yang akan berdampak pada melesetnya pertumbuhan ekonomi. Namun, dibalik asumsi pelemahan kurs nilai tukar tersebut menurut pemerintah juga terdapat potensi untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Apabila berbicara tentang kinerja ekspor Indonesia, Sejak 2012, pertumbuhan ekspor negatif karena pertumbuhan ekonomi global yang lemah, dan anjloknya permintaan dan harga komoditas. Ketika permintaan komoditas anjlok atau dikenai bea masuk maka ekspor pun akan menurun. Selama ini, sekitar 60% dari ekspor Indonesia terdiri atas komoditas seperti gas, batu bara, produk mineral, dan kelapa sawit. Selain itu, input untuk menghasilkan barang ekspor baik bahan baku maupun mesin tersebut ternyata adalah barang impor begitu juga dengan kapal pengangkutnya. Secara garis besar terdapat permasalahan di sisi logistik dan ketergantungan akan komoditas yang mana hal tersebut menurut beberapa ekonom ketika terjadi pelemahan kurs nilai tukar tidak otomatis mendorong nilai ekspor.

Pada tahun 2017, nilai total ekspor meningkat pesat sebesar 15,8% dari US\$ 145 miliar di tahun 2016 menjadi US\$ 168 miliar dan surplus kurang lebih US\$ 12 miliar. Secara umum, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2017 cukup baik, namun ternyata masih kalah jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia (US\$231 miliar dan US\$184 miliar).

Apabila Indonesia memiliki fundamen ekspor yang baik, maka kinerja ekspor Indonesia tentu akan semakin meningkat. Peningkatan kinerja ekspor akan berdampak pada ketahanan perekonomian nasional suatu negara terutama dalam bentuk cadangan devisa. Ketika sebuah negara memiliki cadangan devisa yang besar maka negara tersebut tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar



mata uangnya akibat dinamika perekonomian global. Sebagai contoh, Tiongkok dengan cadangan devisanya yang besar dapat mematok nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang negara lain (*fixed exchange rate*). Sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem *floating exchange rate* (mengambang), yang berarti bahwa intervensi di pasar valuta asing lebih diarahkan untuk menstabilkan atau menghindari gejolak nilai tukar rupiah di pasar dan tidak mematok dikisaran tertentu.

Perkembangan terakhir menyatakan bahwa Nilai cadangan devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi pada Januari 2018 sebesar US\$ 131,98 miliar. Namun, ternyata cadangan devisa juga menyusut cepat dalam empat bulan berturut-turut. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2018 sebesar US\$ 122,9. Rekor cadangan devisa merosot sejak nilai tukar rupiah terus tertekan pada Februari 2018. Saat itu kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) melewati Rp 13.500. Tekanan rupiah mencapai puncak pada Mei 2018 saat menembus Rp 14.000 per dollar. Dengan melihat ketersediaan cadangan devisa yang ada, dan sulitnya menaikkan suku bunga BI di tengah kebijakan FED untuk menaikkan suku bungannya, pagu nilai tukar sebesar Rp13.700-Rp14.000/US\$ menjadi realistis. Jika cadangan devisa tidak digunakan, bisa saja rupiah akan lebih melemah lebih dalam.

Beberapa ekonom dan kalangan perbankan menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia masih cukup aman untuk digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun, mereka menyatakan perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk terus menggenjot ekspor dan menekan impor. Dalam rangka memperkuat nilai tukar Rupiah melalui peningkatan cadangan devisa, perlu adanya peningkatan kinerja dan tata kelola ekspor Indonesia yang dapat dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing ekspor dengan melakukan perbaikan nilai tambah dan efisiensi dari sektor industri, meningkatkan inovasi dan produktivitas di semua sektor agar tidak bergantung pada komoditas;
2. Perluasan pasar tujuan ekspor ke negara lain seperti Rusia, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk itulah perlu adanya optimalisasi peran Atase Perdagangan di negara sahabat serta perbaikan birokrasi;
3. Perlu adanya insentif terhadap eksportir agar membawa uang dollar yang mereka peroleh untuk dibawa ke Indonesia. Perlu ada tinjauan mengenai UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana eksportir tidak diwajibkan membawa uang dollar ke Indonesia;
4. Sosialisasi dan juga insentif pemanfaatan instrumen keuangan kepada para eksportir dalam bentuk *forward/ future contract* valuta asing (*hedging*) untuk melindungi nilai kontrak pada saat jatuh tempo pembayaran.

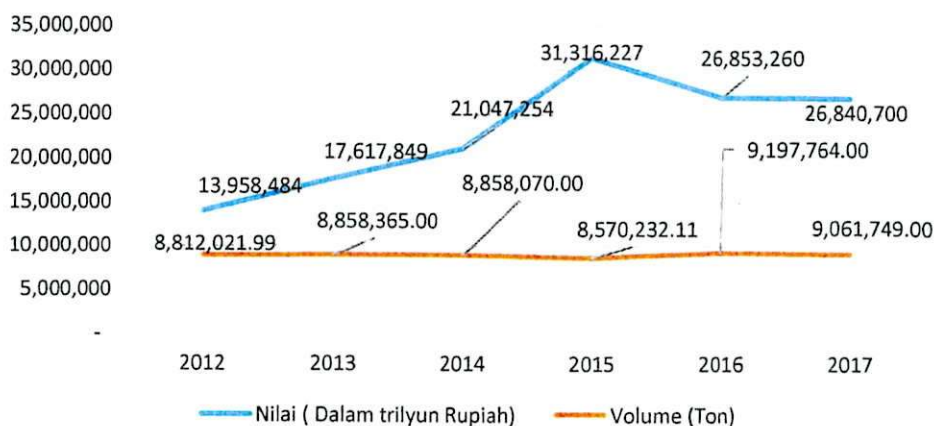


## Analisis Singkat Kebijakan Pembiayaan Pupuk Bersubsidi Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Kesejahteraan Petani

Tema dalam RKP 2019 ini adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Berkaitan dengan konteks pertumbuhan produksi pangan, persoalan yang mendapatkan sorotan adalah kebijakan subsidi pertanian dalam hal ini bantuan pupuk yang harus disalurkan secara tepat kepada yang berhak yaitu para petani kecil mengingat pengolahan komoditas pertanian sebagian besar dilakukan oleh petani kecil yang memiliki akses kepada input produksi yang terbatas. Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011 perubahan atas No. 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang Dalam Pengawasan, di mana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu.

Dari perspektif makro, Pemerintah melalui Kementan terus meningkatkan realisasi subsidi pupuk baik kimia maupun organik terutama dari tahun 2012-2015 dari Rp13.958.484 trilyun menjadi Rp31.316.227 trilyun (naik 124%). Kemudian pada tahun 2016-2017 nilai subsidi menurun dari Rp26.853.260 trilyun menjadi Rp26.840.700 trilyun (turun 4,7%). Meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan nilai subsidi, tetapi dari volume yang disalurkan justru meningkat dari 8.570.232,11 ton di tahun 2015 menjadi 9.197.764 ton di tahun 2016 (naik 7,3%). Sebelum akhirnya menurun menjadi 9.061.749 ton (turun 1,47%).

### Realisasi Nilai Subsidi dan Volume Subsidi Pupuk 2012-2017



Sumber : LHP BPK Atas LK Kementan Tahun 2012-2016  
LAKIN Dit Pupuk dan Pestisida 2012-2017

Penurunan realisasi subsidi pupuk tersebut memang bagian dari langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah agar APBN tidak “jebol” dan memang terjadi penurunan pada HPP pupuk. Meskipun demikian, volume pupuk bersubsidi dipertahankan untuk dalam kisaran 9 juta ton dalam dua tahun terakhir. Kebijakan pengalokasian anggaran untuk subsidi pupuk sampai saat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan guna mempertahankan ketahanan pangan nasional berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Meskipun peningkatan produksi pangan tidak hanya ditentukan dari penggunaan pupuk dan beban subsidi pupuk juga semakin membesar, namun dampak positif dari subsidi pupuk terlihat dari peningkatan produksi pangan khususnya padi.

Hanya saja, melihat dari efektivitas kebijakan tersebut dewasa ini, kerap ditemui berbagai permasalahan berulang seperti penyelewengan pupuk bersubsidi akibat kesenjangan HET dan HPP pupuk khususnya jenis Urea yang semakin melebar, permasalahan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan *moral hazard* petani untuk menggunakan pupuk dengan dosis berlebihan yang semuanya kontraproduktif dengan



besarnya anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah untuk subsidi pupuk. Sebagai tambahan dari aspek Keuangan Negara, pada Juni 2016, berdasarkan hasil kajian KPK tunggakan kewajiban bayar negara kepada produsen pupuk yaitu PT.PIHC mencapai angka Rp. 14,9 Triliun. Jumlah ini terbagi atas tunggakan pembayaran di 2014 sebesar Rp. 7,4 triliun, dan tunggakan pembayaran di tahun 2015 sebesar Rp. 7,5 triliun. Bagi produsen pupuk, tertundanya pembayaran selain mengakibatkan terganggunya *cashflow* di internal perusahaan BUMN tersebut, juga turut meningkatkan beban bunga yang mesti ditanggung perusahaan sendiri mengingat porsi pinjaman pembiayaan komersial dilakukan bersamaan dengan pembiayaan subsidi

Untuk itulah Pemerintah beserta DPR kedepannya perlu mengkaji berbagai opsi kebijakan terkait skema pembiayaan untuk subsidi pupuk tersebut agar tidak membebani APBN dan menciptakan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi para petani. Dengan melihat permasalahan yang ada selama ini, opsi kebijakan yang diambil diharapkan dapat menekan disparitas harga sehingga mengurangi *moral hazard* untuk melakukan penyimpangan. Berdasarkan analisis dari Pokja Khusus Perumusan Pupuk dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihimpun oleh Susilowati (2016), opsi kebijakan tersebut antara lain (cari sumber asli dari BKF dan Pokja Khusus) :

### 1. Subsidi Langsung Pupuk

Subsidi Langsung Pupuk (SLP) adalah bentuk bantuan untuk membeli pupuk yang diberikan langsung kepada petani dalam bentuk tunai, kupon, atau natura dalam bentuk kuota pupuk. Kelebihan dari kebijakan SLP model dana bantuan pupuk nontunai antara lain subsidi dalam APBN diterima langsung oleh petani; harga pupuk lebih bersaing; tidak ada disparitas harga pupuk, sehingga mengurangi penyelewengan pupuk ke sektor nonsubsidi. Subsidi yang diberikan hanya dapat digunakan untuk membeli pupuk, sehingga potensi pemanfaatan subsidi ke penggunaan lain dapat ditekan.

Dengan harga pupuk mengikuti harga pasar, penggunaan sarana produksi menjadi lebih optimal dan mendorong diversifikasi usaha tani. Akan tetapi kekurangannya antara lain harga pupuk akan melonjak dan berpotensi berfluktuasi serta berbeda antarwilayah. Pemerintah juga harus menyediakan dana untuk mengantisipasi fluktuasi harga pupuk di atas batas maksimal, sehingga ada risiko fiskal bagi pemerintah jika terjadi fluktuasi harga pupuk di pasaran. Hasil kajian bersama BKF dengan GIZ menyatakan Apabila melihat dari sudut pandang ekonomi dan kebijakan publik, maka mekanisme bantuan langsung pupuk non-tunai merupakan skema yang paling tepat untuk diterapkan karena bantuan diserahkan langsung kepada penerima, yang lebih mengetahui perilaku penggunaan pupuk paling tepat, dan juga dapat menekan potensi penyelewengan dan salah sasaran

### 2. Penghapusan Bertahap Subsidi Pupuk

Sumber dari terjadinya *moral hazard* dalam bentuk penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi adalah adanya disparitas harga pupuk subsidi dan nonsubsidi. Semakin besar disparitas harga maka insentif untuk melakukan *moral hazard* akan semakin besar. Apabila subsidi dikurangi, maka HET akan naik sampai pada tingkat tertentu di mana harga pupuk masih tetap bersubsidi. Untuk memberikan kompensasi peningkatan biaya produksi yang ditanggung petani karena meningkatnya harga pupuk, peningkatan HET secara bertahap diikuti dengan peningkatan HPP gabah. Dalam simulasi yang dilakukan oleh Pokja Khusus Perumusan Pupuk dengan menaikkan HET secara bertahap, maka selama lima tahun (2016–2020) jumlah total penghematan subsidi akan mencapai antara Rp84,99 triliun hingga Rp99,28 triliun. Hasil analisis simulasi juga menunjukkan jika kenaikan HET pupuk dimulai bulan Mei 2016 secara bertahap akan meningkatkan biaya usaha tani. Namun, dengan adanya kenaikan HPP gabah 5% per tahun dan produksi padi yang diasumsikan juga terjadi kenaikan 1,5% per tahun, maka persentase kenaikan biaya usaha tani akan tetap diikuti dengan kenaikan pendapatan petani. Usulan kebijakan ini sudah pernah disampaikan kepada DPR namun belum mendapat persetujuan karena secara politis bukan kebijakan populer apalagi menjelang suksesi kepemimpinan.

---

## **LAMPIRAN KEGIATAN V**

### **(Siklus APBN Induk)**



LAMPIRAN V (Draft Analisis Sementara)\*

\*) Untuk rancangan infografis akan dilampirkan di Kegiatan VII

**Fokus Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata  
Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Penyerap Devisa  
Untuk Memperkuat Nilai Tukar Rupiah**

Dalam keadaan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD belakangan ini yang sempat menembus Rp 14.800,00-Rp14.900,00, BI melakukan langkah stabilisasi dengan intervensi melalui Cadangan Devisa dan juga menaikkan Suku Bunga Bank Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pun bereaksi dengan memperketat izin untuk impor terutama untuk barang dan mewah dan mengeluarkan himbauan keada masyarakat untuk menukarkan USD ke Rupiah. Dalam kondisi perekonomian yang fluktuatif dan cukup sulit diprediksi seperti sekarang ini, RAPBN yang disusun pemerintah bersama DPR harus kredibel dan realistis untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi. Pemerintah harus fokus mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada sektor prioritas yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB), perolehan devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan DPR khususnya Badan Anggaran (Banggar) dan komisi diharapkan dapat membahas, menyetujui dan melakukan kontrol pada RKA Kementerian/Lembaga sektor prioritas tersebut dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor di Indonesia yang harus diprioritaskan untuk besar dan terus berkembang. Data dari tahun 2014-2017 menunjukkan tren yang positif pada kontribusi pariwisata terhadap devisa negara sebagai berikut :

**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Devisa RI  
Tahun 2014-2017 (Juta USD)**



Sumber : Capaian Sektor Pariwisata 3 Tahun Jokowi-JK (2017)

Untuk menambah “pundi-pundi” devisa, tentunya pemerintah dhi Kemenpar harus fokus untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan rilis dari BPS, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia meningkat selama 5 tahun terakhir. Jumlah kunjungan wisman selama 2017 merupakan yang tertinggi dalam periode tersebut. Selama 2017 jumlah kunjungan wisman mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik 21,88 persen dibanding jumlah kunjungan selama 2016 yang tercatat 11,52 juta kunjungan. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2017 tersebut masih jauh dibawah target kinerja Kemenpar pada tahun 2017 sebesar 15 juta wisman.

Pemerintah sendiri pada tahun 2019 menargetkan kunjungan 20 juta wisman dan devisa sebesar Rp260 triliun. Namun, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja keras untuk



memperbaiki daya saing. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand dari Indeks Daya Saing Pariwisata *World Economics Forum* (WEF) Tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 42 dunia. Capaian tersebut masih tertinggal jauh dari Singapura (13), Malaysia (26) dan Thailand (34). Aspek daya saing pariwisata yang harus mendapat perhatian untuk diperbaiki oleh pemerintah menurut WEF antara lain adalah : a) Keamanan, b) Higienitas, c) Implementasi TIK, d) Kelestarian lingkungan dan, e) infrastruktur untuk pelayanan kepada turis.

Dukungan kepada sektor pariwisata sebenarnya sudah cukup besar dalam bentuk alokasi anggaran yang terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Secara nominal sektor pariwisata mengalami pertumbuhan rata-rata 45,8 persen, yaitu dari Rp1,9 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp5,8 triliun dalam tahun 2017. Namun besaran anggaran yang terus meningkat tersebut tidak diikuti oleh efektivitas dalam menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan. Untuk menguatkan data dari WEF tersebut, BPK dalam LHP Pemeriksaan Kinerja Terhadap Atas Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015-Semester I 2016 menemukan permasalahan ketidakefektifan khususnya di pemasaran dan pengembangan destinasi untuk segmen wisman sebagai berikut :

- a. Koordinasi Lintas Sektoral Pengembangan Destinasi Pariwisata belum memadai;
- b. Perencanaan pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan destinasi yang berkelanjutan masih belum memadai;
- c. Belum terdapat koordinasi antara strategi pemasaran dengan implementasi promosi terkait penggunaan media ruang;
- d. Target dan capaian *branding* melalui media ruang dan festival belum ditetapkan sehingga kinerja promosi melalui *branding* Pesona Indonesia maupun *Wonderful Indonesia* tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Meskipun besaran dana yang telah dialokasikan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai target kunjungan wisatawan, opsi pengurangan anggaran untuk pariwisata khususnya anggaran pemasaran wisatawan mancanegara bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini. Simulasi regresi linier sederhana secara *time series* (2012-2016) oleh Sukirman (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kenaikan anggaran pariwisata dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jika pemerintah menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara, maka dibutuhkan kurang lebih anggaran pemasaran pariwisata mancanegara sebesar Rp6,09 triliun. Meskipun terdapat pengaruh positif akan tetapi dilihat dari signifikansi, alokasi anggaran pemasaran pariwisata tersebut tidak efektif jika pemerintah juga belum melakukan perbaikan pada implementasi kebijakan koordinasi lintas sektoral antara K/L/Daerah untuk membangun destinasi pariwisata yang memadai dan koordinasi untuk memperbaiki strategi pemasaran. Jika promosi pariwisata tidak diimbangi dengan pengembangan destinasi pariwisata, yang memadai tentu akan membuat wisatawan kecewa, dan enggan untuk kembali ke Indonesia.

Berikut adalah pertimbangan kebijakan yang ditempuh oleh Komisi X maupun Banggar dalam mendorong proses penganggaran yang kredibel di sektor pariwisata dalam rangka memperkuat devisa :

- a. Komisi X dapat mempertimbangkan kenaikan anggaran khususnya pada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Namun, tetap harus ada mekanisme *check and balance* dari 2 Kedeputan ini agar hasilnya optimal. Untuk pemasaran sebaiknya fokus pada negara dengan potensi *spending* dan *length of stay* wisman yang tinggi;
- b. Komisi X berkoordinasi dengan Banggar untuk mendorong Menteri Keuangan dan Bappenas untuk dapat mengalokasikan anggaran infrastruktur pariwisata lebih besar serta mendorong Koordinasi Lintas Sektoral untuk menyelesaikan “10 Bali Baru” ;
- c. Komisi X meminta Kemenpar berkoordinasi dengan BKPM untuk membatasi izin investor asing yang masuk di sektor pariwisata agar *profit* pariwisata tidak keluar dari Indonesia.



## Analisis Ringkas Cepat Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas

Pada RAPBN 2019, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Pertumbuhan tersebut salah satunya ditopang oleh Belanja Pemerintah. Dari 5 komponen pertumbuhan di RAPBN 2019 yaitu Belanja Rumah Tangga, Belanja Pemerintah, Ekspor, Impor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi Fisik, kontribusi Belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan pada tahun 2019 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,4%. Untuk melihat prospek kontribusi Belanja Pemerintah tersebut, perlu dilihat bagaimana efektivitas kebijakan Transfer ke Daerah (DAU, DAK dan DBH), sejauh ini dalam APBN untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, menekan angka kemiskinan dan membangun perekonomian daerah yang kompetitif. Secara umum, besaran Transfer ke Daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 transfer ke daerah sebesar Rp573,7 triliun, kemudian pada 2018 naik sebesar 22,6% menjadi Rp703,6 triliun. Gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dalam infografis berikut ini :



Sumber : Kementerian Keuangan RI (2017)

Dari infografis di atas dapat terlihat bagaimana timpangnya kontribusi antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia medio 2015-2016. Tingkat kemiskinan daerah juga masih cukup tinggi terutama di wilayah Papua. Hal yang perlu mendapat apresiasi adalah terdapat pertumbuhan PDRB *year on year* (yoy) di masing-masing daerah. Melalui gambaran singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa **sementara ini** pemanfaatan belanja pemerintah dalam bentuk transfer ke daerah tersebut belum efektifa menanggulangi kemiskinan, kesenjangan fiskal, dan membangun ekonomi regional yang kompetitif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena *quality spending* yang belum produktif. Daerah lebih menggunakan dana tersebut untuk belanja rutin dan administrasi dibanding belanja yang produktif seperti Belanja Modal.

Secara lebih rinci, berikut beberapa faktor yang menyebabkan inefektifitas pada kebijakan transfer ke daerah tersebut yaitu :



- a. Ketidakpatuhan daerah terhadap porsi anggaran belanja tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2017 menyatakan minimal 20 persen penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan infrastruktur/Belanja Modal belum dipenuhi oleh 302 daerah ;
- b. Kapasitas birokrat di daerah yang belum memadai untuk merealisasikan dana transfer tersebut sehingga terdapat dana transfer pemerintah pusat yang mengendap di deposito bank. Hal tersebut sebetulnya juga tidak lepas dari kekhawatiran pejabat berurusan dengan hukum sehingga memilih “main aman” dengan mendepositokannya ke Bank;
- c. Adanya permasalahan dalam pertanggungjawaban belanja daerah yang dibiayai dari Dana Transfer Pemerintah Pusat . Belanja daerah ini biasanya termasuk dalam kelompok Belanja Modal (proyek infrastruktur) yang biasanya dibiayai dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Permasalahan ini kerap menjadi temuan BPK dan menyebabkan kerugian negara.

Terkait porsi atau rasio belanja, berdasarkan data terkini dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), rata-rata rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah dalam APBD terus menurun selama 4 tahun terakhir dari 40,1% di 2014 menjadi 33,5% di 2018. Sebaliknya, untuk Belanja Modal rasionya fluktuatif namun di tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 3,9% dari tahun 2016. Pada tahun 2017 rasio Belanja Modal mencapai 25,9%, namun, pencapaian tersebut masih dibawah target nasional dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 30%. Masih rendahnya Belanja Modal ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal Belanja Modal ini mempunyai *multiplier effect* pada investasi yang akan masuk ke daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun faktanya, pemerintah daerah masih terjebak dalam pola pikir lama yang cenderung main aman, hal tersebut tentu berimbas kepada pembangunan yang stagnan di daerah tersebut.

Pemerintah pusat saat ini telah bertindak untuk mendisiplinkan perilaku pemerintah daerah tersebut dimana untuk DAU yang sebelumnya bebas digunakan untuk belanja apa saja oleh pemerintah daerah, kini 25% dari DAU tersebut wajib digunakan untuk Belanja Modal/infrastruktur. Namun, perlu langkah konkrit yang lebih jauh lagi untuk dapat mengubah pola pikir pemerintah daerah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah bersama DPR untuk mengubah pola pikir pemerintah daerah sehingga realisasi Belanja Modal diharapkan akan meningkat dan berkualitas :

- a. DPR dalam hal ini Komisi XI perlu berdiskusi dengan Kemenkeu untuk membuat skema *reward* dan *punishment* yang tepat untuk memacu daerah agar bersemangat untuk merealisasikan Dana Transfer dari pusat sesegera mungkin untuk Belanja Modal;
- b. Komisi XI perlu meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong Bank Pembangunan Daerah agar tidak menerima “parkiran” deposito yang bersumber dari Dana Transfer Pusat. Perlu adanya sanksi yang tegas dan proporsional bagi Bank yang menyimpan dana transfer tersebut;
- c. Komisi XI diharapkan dapat mendorong BPK untuk menjadi “konsultan” bagi pemerintah daerah agar mereka tidak takut dalam merealisasikan Belanja Modal dan tidak melawan peraturan perundang-undangan.
- d. Perlu adanya pemetaan terhadap daerah-daerah yang Belanja Modalnya rendah atau bermasalah untuk diberikan pendampingan dan dimonitor secara rutin bersama-sama oleh DPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.



## Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel

Dalam rapat antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran pada tanggal 4 September 2018, Kementerian Keuangan mengajukan RAPBN 2019 di sektor kesehatan sebesar **Rp121,9 triliun** yang terdiri dari **Rp88,2 triliun** yang berasal dari **Belanja Pusat** dan **Rp33,7 triliun Transfer Daerah**. Khusus untuk Belanja Pusat, **anggaran untuk Kemenkes diajukan sebesar Rp58,7 triliun**. Jika anggaran tersebut disetujui, maka anggaran untuk Kemenkes meningkat sebesar 28% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp45,9 triliun. Salah satu pos yang harus mendapat perhatian adalah pada **Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** yang masuk dalam program strategis RPJMN 2015-2019. Apabila mengkaji kinerja Kemenkes di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, diperoleh data sebagai berikut :

**Gambar 1. Target Indikator Kinerja Ditjen P2P yang terkait dengan RPJMN 2015-2019**

Indikator	2015		2016		2017		2018		2019	KET
	Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian*)	Target	
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	280	263	271	257	262	254	254	Data tahunan	245	
2. Prevalensi HIV (persen)	<0,5	0,33	<0,5	0,33	<0,5	0,33	<0,5	Data tahunan	<0,5	
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	21	21	23	23	25	24	26	24	34	
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	225	232	245	247	265	266	285	272	300	
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis	9	17	12	22	15	28	24	29	35	
6. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,28	NA	24,77	32,4	24,28	32,4	23,79	Data survei	23,38	
7. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4	NA	15,4	20,7	15,4	20,7	15,4	Data survei	15,4	
8. Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun	6,9	NA	6,4	8,8	5,9	8,8	5,8	Data survei	5,4	
9. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	75	66	80	80,7	85	85,4	90	Data tahunan	95	

**Sumber:** Bahan Paparan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan

Gambar 1 menunjukkan 9 indikator Ditjen P2P yang juga merupakan indikator pada RPJMN 2015-2019. Terlihat bahwa 3 indikator kinerja Ditjen P2P masih belum tercapai selama 2016-2017. Ketiga indikator tersebut adalah 1)Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (persen), 2)Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ tahun (persen), dan 3)Prevalensi merokok penduduk usia kurang dari sama dengan 18 tahun.

Pada indikator prevalensi tekanan darah tinggi diketahui bahwa prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2016 dan 2017 masih jauh dibawah target kinerja (semakin kecil persentasenya semakin bagus). **Pada tahun 2016 target kinerja prevalensi tekanan darah tinggi adalah sebesar 24,77 persen, sementara capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar 32,4 persen.** Pada tahun 2017 target prevalensi tekanan darah tinggi direncanakan untuk turun hingga 24,28 persen, namun capaian kinerja tahun 2017 tetap pada angka 32,4 persen.

Serupa dengan prevalensi darah tinggi, prevalensi obesitas pada usia 18 tahun keatas dan prevalensi merokok penduduk usia kurang dari sama dengan 18 tahun masih jauh dibawah target kinerja. **Pada tahun 2016 dan 2017 prevalensi obesitas pada usia 18 tahun keatas tetap statis pada angka 20,7 persen, sementara target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017 adalah 15,4 persen. Prevalensi merokok juga menunjukkan tren angka prevalensi yang statis selama 2016 dan 2017 yaitu sebesar 8,8, padahal target yang ditetapkan adalah 6,4 pada 2016 dan 5,9 pada 2017.**

Apabila pencegahan dan pengendalian tidak dilakukan secara maksimal, maka akan berdampak sistemik pada biaya pengobatan. Program Jaminan Kesehatan Negara (JKN) yang diorganisir BPJS yang defisit selama 3 tahun terakhir tidak lepas dari kurang optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit. Anggaran untuk BPJS sebagian besar habis untuk pengobatan katastrofik seperti gagal ginjal, kanker dan stroke. **Penyakit tersebut sebagian besar muncul dari kebiasaan merokok, obesitas dan tekanan darah tinggi.** Selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS selalu negatif. Pada tahun 2014 defisit anggaran perusahaan publik itu mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016. Pada akhir 2018, BPJS Kesehatan diperkirakan akan menanggung defisit anggaran sebesar Rp16 triliun. Dampaknya adalah BPJS terpaksa menunggak biaya operasional rumah sakit seperti dokter, obat-obatan dan lain-lain. Penyertaan penyakit katastrofik ke dalam penyakit yang ditanggung JKN memang baik, akan tetapi pemerintah harus waspada apabila jumlah pengidap penyakit tersebut lebih besar daripada pendapatan BPJS. Hal tersebut akan berpengaruh sistemik kepada kualitas hidup rakyat Indonesia dan menghambat pembangunan.

Sebagai langkah perbaikan kedepannya, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh DPR bersama pemerintah :

- DPR perlu mempertimbangkan kenaikan anggaran tetapi juga mendorong efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit terkait Prevalensi Darah Tinggi, Obesitas dan kebiasaan merokok untuk usia dibawah 18 tahun;
- DPR bersama Kemenkes mengkaji anggaran untuk *coverage* penyakit katastrofik dalam layanan JKN. Jika memang dirasa membebani APBN, perlu ada tindak lanjut berupa pengurangan subsidi untuk jenis penyakit tersebut dan menarik premi tambahan. Hal tersebut diharapkan akan mendorong dan memaksa masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.



## **Analisis Singkat PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia**

Penyertaan Modal Negara merupakan proses pemisahan aset negara menjadi modal di perusahaan baik BUMN, BUMS, perusahaan asing, ataupun perusahaan milik lembaga internasional. PMN dapat berupa tunai atau hak negara yang dinilai dengan uang. PMN diharapkan mampu memberikan *multiplier effect*, tanpa menghabiskan biaya yang besar. Hal ini terjadi karena proses pemberian PMN adalah proses pemisahan aset negara untuk dikelola BUMN, tanpa melepas aset negara tersebut. Dalam Rapat Banggar pada tanggal 20 September 2018, telah disepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT. PLN (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) pada pagu anggaran tahun 2019. Masing-masing sebesar Rp6,5 triliun untuk PLN dan 10 triliun untuk Hutama Karya. PMN tersebut diperuntukkan untuk pengembangan kapasitas bisnis BUMN tersebut yaitu untuk program pembangunan listrik desa (PLN) dan menyelesaikan target pembangunan lima ruas tol Trans Sumatera agar selesai di tahun 2019 (Hutama Karya).

Tujuan PMN pada 2 BUMN tersebut memang *on track* dengan Nawacita pemerintahan yang fokus pada infrastruktur dan konektivitas serta peningkatan kapasitas produksi. Namun, DPR dan juga pemerintah juga harus memperhatikan defisit pada neraca transaksi berjalan. Akibat dari defisit neraca transaksi berjalan tersebut menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap USD semakin melemah hingga menembus kisaran Rp14.800/USD-Rp14.900/USD. Untuk menguatkan kembali nilai tukar perlu ada upaya peningkatan ekspor dan pengendalian impor secara besar-besaran. Ketika ekspor meningkat, maka keuntungan ekspor dalam bentuk valas akan menambah persediaan valas dalam negeri akan bertambah sehingga nilai tukar Rupiah terhadap USD akan menguat.

LPEI sebagai lembaga yang sepenuhnya dimiliki pemerintah yang mempunyai mandat untuk menyediakan pembiayaan dalam rangka mendorong ekspor nasional perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk PMN. Pada rapat antara Kementerian Keuangan dengan Banggar pada tanggal 4 September 2018, Kementerian Keuangan mengajukan permohonan PMN kepada LPEI sebesar Rp2,5 triliun untuk mendorong peningkatan ekspor dan kinerja pemodal serta melaksanakan penugasan khusus. Alokasi penambahan PMN kepada LPEI untuk peningkatan kapasitas bisnis dialokasikan sebesar Rp1,5 triliun sedangkan untuk penugasan khusus sebesar Rp 1 triliun. Penugasan khusus diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.08/2017 dimana Menteri Keuangan telah mengeluarkan tiga Keputusan Menteri tentang penugasan khusus ekspor.

LPEI jika dibandingkan dengan bank pada umumnya lebih memiliki ruang gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi *supply* (dalam negeri) dan di sisi *demand* (luar negeri). Pembiayaan dapat diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutupi kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Terkait persetujuan pemberian PMN sendiri, tentu harus ada kajian yang komprehensif tentang kinerja entitas yang bersangkutan setelah diberikan PMN tersebut. Untuk kasus LPEI, dana dari PMN tersebut dimaksudkan agar eksportir bisa menikmati tingkat suku bunga yang kompetitif dan meningkatkan *outstanding* pembiayaan kepada eksportir selain melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah. Dengan tingkat suku bunga yang kompetitif akan menjadi stimulus munculnya eksportir-eksportir khususnya dari sektor UMKM yang akan menyumbang

devisa dan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Secara lebih rinci, Beberapa capaian yang mampu dihasilkan dari penambahan PMN kepada LPEI di antaranya peningkatan kinerja pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor, penyediaan suku bunga pembiayaan ekspor yang kompetitif kepada eksportir, dan peningkatan peluang penetrasi ekspor ke negara-negara non tradisional. Berikut adalah perkembangan PMN yang didapat LPEI beserta kinerja yang dicapai (terutama penyaluran pembiayaan ekspor) selama 3 tahun terakhir :



**Sumber :** LPEI dan Nota Keuangan RAPBN 2019

**Ket : \*)** PMN didapat diakhir tahun berjalan, maka capaian pembiayaan baru diukur pada tahun selanjutnya.

**\*\*) Asumsi capaian pembiayaan ekspor sampai akhir tahun 2018**

PMN yang didapat LPEI naik turun, tetapi capaian pembiayaan ekspor menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Namun, berdasarkan analisis statistik sederhana , ternyata PMN tidak signifikan berpengaruh terhadap capaian pembiayaan ekspor LPEI selama tiga tahun berturut-turut. Dapat diinterpretasikan bahwa LPEI tidak terlalu bergantung dari PMN untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. Namun, apabila melihat dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional dan angka yang diajukan oleh pemerintah pada RAPBN 2019 Rp2,5 triliun menurun Rp0,7 triliun dari realisasi tahun lalu, **jumlah yang diajukan oleh pemerintah dapat dipertimbangkan untuk disetujui**. Disamping itu, DPR juga harus mendorong LPEI untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik dalam proses bisnis mereka. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap LPEI Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Semester I) ternyata LPEI belum sepenuhnya didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut adalah catatan penting dari BPK untuk menjadi perhatian LPEI :

- a. LPEI belum sepenuhnya melaksanakan mandat dalam mendukung Program Ekspor Nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (Banyak pemberian pinjaman yang tidak tepat sasaran);
- b. LPEI tidak segera menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan akumulasi cadangan LPEI;
- c. Belum ada kejelasan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana eks Program Kemitraan PT BEI (Persero) yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang LPEI;
- d. LPEI belum memiliki mekanisme pengawasan pembiayaan melalui skema two step loan kepada end user dan definisi UMKM menurut LPEI tidak selaras dengan definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Besaran tarif premi Asuransi Proteksi Piutang Dagang belum mengakomodasi tarif premi dari perusahaan reasuransi dan besaran tarif premi Asuransi Marine Cargo dan No Claim Bonus yang diberikan belum diatur dalam peraturan internal LPEI; dan

- f. **Pemberian rating dua debitur LPEI tidak sesuai dengan Manual IEB Credit Rating System dan prinsip kehati-hatian;**
- g. **LPEI belum sepenuhnya menerapkan Risk Assesment yang memadai dalam penetapan tingkat suku bunga Pembiayaan;**
- h. **Pengikatan dan penilaian agunan terkait pembiayaan yang diberikan oleh LPEI belum sepenuhnya sesuai ketentuan.**



## **LAMPIRAN KEGIATAN VI**

### **(Siklus Pembicaraan Pendahuluan)**

## LAMPIRAN VI.I. (Hasil Koreksi Analisis)

### Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

Berdasarkan hasil Rapat antara Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Bappenas) dan Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2018, Pemerintah mengajukan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-5,8% pada RAPBN 2019. Sedangkan Bank Indonesia mengajukan proyeksi sedikit dibawah Pemerintah yaitu sebesar 5,2%-5,6%. Dasar pengajuan asumsi tersebut dilandasi optimisme bahwa akan terjadi peningkatan investasi dan momentum perekonomian yang semakin membaik. Apabila dilihat sekilas dari proyeksi tersebut, hal tersebut sangat jauh dari apa yang ditargetkan oleh Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 8% pada tahun 2019. Bahkan asumsi atau proyeksi tersebut sebenarnya juga kurang realistis apabila melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi belakangan ini.

Ketidakrealistisan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut dipertegas dengan selalu melesetnya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR RI selama tiga tahun berturut-turut. Perkembangan terakhir pada TA 2017 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,07% dibawah target APBNP 2017 sebesar 5,2% (BPS, 2017). Namun, pencapaian 5,07% ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2014. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari kinerja ekspor Indonesia sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, yang belum mencapai harapan dikarenakan ada perlambatan ekonomi global yang menurunkan *demand* ekspor khususnya non migas. Penurunan ini secara eksternal disebabkan oleh kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang berdampak sistemik secara *indirect* pada kinerja ekspor Indonesia. Sementara secara internal berkaitan dengan belum kompetitifnya sarana prasarana penunjang ekspor. Alhasil, pemerintah mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonominya.

Pemerintah pada Tahun Anggaran 2019 mengusung tema kebijakan fiskal 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Terkait dengan investasi, apabila dilihat dari perilaku investor, mereka cenderung untuk *wait and see* pada tahun 2019 yang bertepatan dengan pilpres dan pileg. Hal tersebut berkaitan dengan kemungkinan timbulnya ketidakpastian karena kemungkinan perubahan regulasi. Untuk daya saing, pemerintah berencana untuk memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan ekspor. Disatu sisi beberapa analisa dari lembaga riset dan perbankan menyakini bahwa kinerja ekspor di tahun politik ini akan melambat. Berbagai persoalan fundamental seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi menjadi faktor penghambat kinerja ekspor.

Pada tahun politik seperti ini akan lebih baik bagi pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan dengan memprioritaskan peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Khusus belanja pemerintah, pemerintah perlu fokus pada peningkatan Belanja Modal yang diarahkan untuk produktivitas dan konektivitas serta menyerap tenaga kerja terutama di daerah.

Untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, pemerintah dapat menggunakan kebijakan populis seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan Tunjangan Hari Raya (THR). Tentunya penyaluran Bansos tersebut harus tepat sasaran dan untuk itulah perlu dirintis sistem *database* yang terintegrasi antar instansi dari tingkat pusat hingga ke daerah atau desa. Kebijakan seperti ini memberikan manfaat untuk jangka pendek dan dampaknya hanya terasa pada tahun berjalan. Sedangkan Belanja Modal khususnya yang bersifat produktif dan mempunyai dalam pembangunan seperti jalan raya, jembatan, bendungan, pelabuhan dan bandara meskipun manfaatnya baru bisa dirasakan pada beberapa tahun yang akan



datang. Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa hingga akhir 2017, pemerintah telah merampungkan 26 Proyek Nasional Strategis (PSN) infrastruktur dengan total nilai investasi Rp46,5 triliun atau 10% dari total PSN sebanyak 245 proyek dan 2 program. Sebanyak 20 proyek diselesaikan pada 2016, sedangkan pada tahun lalu, ada 6 proyek yang telah dioperasikan. Estimasi total nilai investasi seluruh proyek dan program PSN Rp4.197 triliun.

Dari aspek kebijakan moneter, Pemerintah bersama BI mengajukan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada tahun 2019 berkisar antara Rp13.700-Rp14.000. Pada APBN 2018, pemerintah bersama DPR mematok nilai tukar rupiah sebesar Rp13.400 dengan pertumbuhan sebesar 5,4%. Sedangkan pada tahun 2019, asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar cenderung lebih melemah namun pemerintah tetap menginginkan pertumbuhan yang sama bahkan lebih tinggi. Dalam skenario seperti ini, pemerintah harus mewaspadai dampak defisit neraca perdagangan dengan terus menggenjot ekspor dan membatasi impor agar target pertumbuhan dapat tercapai. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018 menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus perdagangan mencapai US\$ 1 miliar. Pemerintah juga perlu memaksimalkan ekspor komoditas kelapa sawit (CPO) disamping minyak dan gas ke negara-negara mitra dagang utama seperti China, Australia, Malaysia hingga AS. Disamping neraca perdagangan, beban belanja pembayaran utang luar negeri pada APBN juga akan terdampak. Adanya perubahan nilai kurs yang terjadi akan membuat pemerintah harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk melunasi pokok dan bunga utang yang sudah jatuh tempo. Hal tersebut bisa saja mengganggu pembangunan ekonomi yang disusun oleh pemerintah. Sementara dari sektor swasta, dengan adanya pelemahan ini juga akan membebani kondisi finansial mereka sehingga menghambat proses produksi. Dampaknya tentu akan menurunkan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional melambat.

Terdapat konsekuensi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Apabila ingin meraih tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam jangka pendek, pemerintah dapat menempuh kebijakan yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Tetapi apabila berorientasi pada jangka panjang tentu belanja produktif seperti Belanja Modal adalah jawabannya meskipun hal tersebut berpotensi mengorbankan target pertumbuhan yang disepakati karena manfaatnya baru dirasakan beberapa tahun yang akan datang. Target pertumbuhan sebesar 5,4%-5,8% tidak mustahil tercapai, namun membutuhkan kerja keras dan koordinasi yang optimal antar K/L dan daerah yang mungkin agak sulit dilakukan pada tahun politik. Berbagai kasus pada pemerintahan sebelumnya menunjukkan sulitnya melakukan koordinasi antara K/L dan daerah terutama pada akhir tahun masa pemerintahan yang berkuasa.



## Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Dalam rapat antara Banggar DPR RI dengan Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Bappenas) serta Bank Indonesia (BI) pada tanggal 31 Mei 2018, Pemerintah bersama BI mengajukan asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

Indikator	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	APBN	Perkiraan
a. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,02	5,07	5,4	5,4-5,8
b. Inflasi (% yoy)	3,02	3,61	3,5	2,5-4,5
c. Tingkat Suku Bunga SPN-3 bulan (%)	5,7	4,98	5,2	4,6-5,2
d. Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.307	13.382	13400	13.700-14.000
e. Harga Minyak mentah Indonesia (US\$/Barel)	40,2	51,2	48	60-70
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	829	803,91	800	722-805
g. Lifting Gas (ribu minyak setara minyak per hari)	1.180	1.142,33	1.200	1.210 - 1.300

**Sumber: Kementerian Keuangan**

Pada tahun 2019, pemerintah memprediksi pertumbuhan akan mencapai 5,4%-5,8% yang disertai dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ sebesar Rp13.700-Rp14.000. Sementara itu di tahun 2018, Pemerintah bersama DPR telah bersepakat bahwa pertumbuhan ditetapkan di angka 5,4% dengan nilai nilai tukar Rupiah terhadap US\$ sebesar Rp13.400. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa pemerintah ingin mencapai pertumbuhan yang sama bahkan lebih tinggi dengan nilai tukar Rupiah terhadap US\$ yang cenderung melemah. Hal tersebut cukup berisiko karena dengan mematok nilai tukar Rupiah yang lebih rendah akan berdampak pada membengkaknya pembayaran bunga dan pokok hutang dalam APBN dan perlambatan investasi sektor swasta sehingga target pertumbuhan ekonomi berpotensi meleset. Namun, dibalik asumsi pelemahan kurs nilai tukar tersebut menurut pemerintah juga terdapat optimisme untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Apabila berbicara tentang kinerja ekspor Indonesia, Sejak 2012, pertumbuhan ekspor negatif karena pertumbuhan ekonomi global yang lemah, dan anjloknya permintaan, dan harga komoditas. Ketika permintaan komoditas anjlok atau dikenai bea masuk maka ekspor pun akan menurun. Selama ini, sekitar 60% dari ekspor Indonesia terdiri atas komoditas seperti gas, batu bara, produk mineral, dan kelapa sawit. Selain itu, input untuk menghasilkan barang ekspor baik bahan baku maupun mesin tersebut ternyata adalah barang impor begitu juga dengan kapal pengangkutnya. Secara garis besar terdapat permasalahan di sisi logistik dan ketergantungan akan komoditas yang mana menurut beberapa ekonom ketika terjadi pelemahan kurs nilai tukar tidak otomatis mendorong nilai ekspor.

Pada tahun 2017, nilai total ekspor meningkat pesat sebesar 15,8% dari US\$ 145 miliar di tahun 2016 menjadi US\$ 168 miliar dan surplus kurang lebih US\$ 12 miliar. Secara umum, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2017 cukup baik, namun ternyata masih kalah jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia (US\$231 miliar dan US\$184 miliar).

Apabila Indonesia memiliki fondasi ekspor yang baik, maka kinerja ekspor Indonesia tentu akan semakin meningkat. Peningkatan kinerja ekspor akan berdampak pada ketahanan perekonomian nasional suatu negara terutama dalam bentuk cadangan devisa. Ketika sebuah negara memiliki cadangan devisa yang besar maka negara tersebut tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uangnya akibat dinamika perekonomian global. Sebagai contoh, Tiongkok dengan cadangan devisanya yang besar dapat mematok nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang negara lain (*fixed exchange rate*). Sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem *floating exchange rate* (mengambang),



yang berarti bahwa intervensi di pasar valuta asing lebih diarahkan untuk menstabilkan atau menghindari gejolak nilai tukar rupiah di pasar dan tidak mematok dikisaran tertentu.

Perkembangan terakhir menyatakan bahwa Nilai cadangan devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi pada Januari 2018 sebesar US\$ 131,98 miliar. Namun, ternyata cadangan devisa juga menyusut cepat dalam empat bulan berturut-turut. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2018 sebesar US\$ 122,9. Rekor cadangan devisa merosot sejak nilai tukar rupiah terus tertekan pada Februari 2018. Saat itu kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) melewati Rp 13.500. Tekanan rupiah mencapai puncak pada Mei 2018 saat menembus Rp 14.000 per dollar. Dalam jangka panjang, stabilisasi nilai tukar rupiah tidak boleh bergantung dengan menaikkan suku bunga BI tetapi juga meningkatkan cadangan devisa dengan menggenjot ekspor. Kebijakan menaikkan suku bunga ini hanya bagus untuk jangka pendek dan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Beberapa ekonom dan kalangan perbankan menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia masih cukup aman untuk digunakan dalam stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun, mereka menyatakan perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk terus menggenjot ekspor dan menekan impor. Dalam rangka memperkuat nilai tukar Rupiah melalui peningkatan cadangan devisa, perlu adanya peningkatan kinerja dan tata kelola ekspor Indonesia yang dapat dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing ekspor dengan melakukan perbaikan nilai tambah dan efisiensi dari sektor industri, meningkatkan inovasi dan produktivitas di semua sektor agar tidak bergantung pada komoditas;
2. Perluasan pasar tujuan ekspor ke negara lain seperti Rusia, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk itulah perlu adanya optimalisasi peran Atase Perdagangan di negara sahabat serta perbaikan birokrasi;
3. Perlu adanya insentif terhadap eksportir agar membawa uang dollar yang mereka peroleh untuk dibawa ke Indonesia. Perlu ada tinjauan mengenai UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana eksportir tidak diwajibkan membawa uang dollar ke Indonesia;
4. Sosialisasi dan juga insentif pemanfaatan instrumen keuangan kepada para eksportir dalam bentuk *forward/ future contract* valuta asing (*hedging*) untuk melindungi nilai kontrak pada saat jatuh tempo pembayaran.

## Analisis Singkat Kebijakan Pembiayaan Pupuk Bersubsidi Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Kesejahteraan Petani

Tema dalam RKP 2019 ini adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Berkaitan dengan konteks pertumbuhan produksi pangan, persoalan yang mendapatkan sorotan adalah kebijakan subsidi pertanian dalam hal ini bantuan pupuk yang harus disalurkan secara tepat kepada yang berhak yaitu para petani kecil mengingat pengolahan komoditas pertanian sebagian besar dilakukan oleh petani kecil yang memiliki akses kepada input produksi yang terbatas. Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011 perubahan atas No. 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang Dalam Pengawasan, di mana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu.

Dari perspektif makro, Pemerintah melalui Kementan terus meningkatkan realisasi subsidi pupuk baik kimia maupun organik terutama dari tahun 2012-2015 dari Rp13.958.484 trilyun menjadi Rp31.316.227 trilyun (naik 124%). Kemudian pada tahun 2016-2017 nilai subsidi menurun dari Rp26.853.260 trilyun menjadi Rp26.840.700 trilyun (turun 4,7%). Meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan nilai subsidi, tetapi dari volume yang disalurkan justru meningkat dari 8.570.232,11 ton di tahun 2015 menjadi 9.197.764 ton di tahun 2016 (naik 7,3%). Sebelum akhirnya menurun menjadi 9.061.749 ton (turun 1,47%).

**Realisasi Nilai Subsidi dan Volume Subsidi Pupuk  
2012-2017**



**Sumber :** LHP BPK Atas LK Kementan Tahun 2012-2016  
LAKIN Dit Pupuk dan Pestisida 2012-2017

Penurunan realisasi subsidi pupuk tersebut memang bagian dari langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah agar APBN tidak “jebol” dan memang terjadi penurunan pada HPP pupuk. Meskipun demikian, volume pupuk bersubsidi dipertahankan untuk dalam kisaran 9 juta ton dalam dua tahun terakhir. Kebijakan pengalokasian anggaran untuk subsidi pupuk sampai saat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan guna mempertahankan ketahanan pangan nasional berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Meskipun peningkatan produksi pangan tidak hanya ditentukan dari penggunaan pupuk dan beban subsidi pupuk juga semakin membesar, namun dampak positif dari subsidi pupuk terlihat dari peningkatan produksi pangan khususnya padi.

Hanya saja, melihat dari efektivitas kebijakan tersebut dewasa ini, kerap ditemui berbagai permasalahan berulang seperti penyelewengan pupuk bersubsidi akibat kesenjangan HET dan HPP pupuk khususnya jenis



Urea yang semakin melebar, permasalahan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan *moral hazard* petani untuk menggunakan pupuk dengan dosis berlebihan yang semuanya kontraproduktif dengan besarnya anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah untuk subsidi pupuk. Sebagai tambahan dari aspek Keuangan Negara, pada Juni 2016, berdasarkan hasil kajian KPK tunggakan kewajiban bayar negara kepada produsen pupuk yaitu PT.PIHC mencapai angka Rp. 14,9 Triliun. Jumlah ini terbagi atas tunggakan pembayaran di 2014 sebesar Rp. 7,4 triliun, dan tunggakan pembayaran di tahun 2015 sebesar Rp. 7,5 triliun. Bagi produsen pupuk, tertundanya pembayaran selain mengakibatkan terganggunya *cashflow* di internal perusahaan BUMN tersebut, juga turut meningkatkan beban bunga yang mesti ditanggung perusahaan sendiri mengingat porsi pinjaman pembiayaan komersial dilakukan bersamaan dengan pembiayaan subsidi. Untuk itulah Pemerintah beserta DPR kedepannya perlu mengkaji berbagai opsi kebijakan terkait skema pembiayaan untuk subsidi pupuk tersebut agar tidak membebani APBN dan menciptakan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi para petani. Dengan melihat permasalahan yang ada selama ini, opsi kebijakan yang diambil diharapkan dapat menekan disparitas harga sehingga mengurangi *moral hazard* untuk melakukan penyimpangan. Berdasarkan analisis dari Pokja Khusus Perumusan Pupuk dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihimpun oleh Susilowati (2016), opsi kebijakan tersebut antara lain **(cari sumber asli dan BKF dan Pokja Khusus)** :

### 1. Subsidi Langsung Pupuk

Subsidi Langsung Pupuk (SLP) adalah bentuk bantuan untuk membeli pupuk yang diberikan langsung kepada petani dalam bentuk tunai, kupon, atau natura dalam bentuk kuota pupuk. Kelebihan dari kebijakan SLP model dana bantuan pupuk nontunai antara lain subsidi dalam APBN diterima langsung oleh petani; harga pupuk lebih bersaing; tidak ada disparitas harga pupuk, sehingga mengurangi penyelewengan pupuk ke sektor nonsubsidi. Subsidi yang diberikan hanya dapat digunakan untuk membeli pupuk, sehingga potensi pemanfaatan subsidi ke penggunaan lain dapat ditekan.

Dengan harga pupuk mengikuti harga pasar, penggunaan sarana produksi menjadi lebih optimal dan mendorong diversifikasi usaha tani. Akan tetapi kekurangannya antara lain harga pupuk akan melonjak dan berpotensi berfluktuasi serta berbeda antarwilayah. Pemerintah juga harus menyediakan dana untuk mengantisipasi fluktuasi harga pupuk di atas batas maksimal, sehingga ada risiko fiskal bagi pemerintah jika terjadi fluktuasi harga pupuk di pasaran. Hasil kajian bersama **BKF** dengan **GIZ** menyatakan Apabila melihat dari sudut pandang ekonomi dan kebijakan publik, maka mekanisme bantuan langsung pupuk non-tunai merupakan skema yang paling tepat untuk diterapkan karena bantuan diserahkan langsung kepada penerima, yang lebih mengetahui perilaku penggunaan pupuk paling tepat, dan juga dapat menekan potensi penyelewengan dan salah sasaran

### 2. Penghapusan Bertahap Subsidi Pupuk

Sumber dari terjadinya *moral hazard* dalam bentuk penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi adalah adanya disparitas harga pupuk subsidi dan nonsubsidi. Semakin besar disparitas harga maka insentif untuk melakukan *moral hazard* akan semakin besar. Apabila subsidi dikurangi, maka HET akan naik sampai pada tingkat tertentu di mana harga pupuk masih tetap bersubsidi. Untuk memberikan kompensasi peningkatan biaya produksi yang ditanggung petani karena meningkatnya harga pupuk, peningkatan HET secara bertahap diikuti dengan peningkatan HPP gabah. Dalam simulasi yang dilakukan oleh Pokja Khusus Perumusan Pupuk dengan menaikkan HET secara bertahap, maka selama lima tahun (2016–2020) jumlah total penghematan subsidi akan mencapai antara Rp84,99 triliun hingga Rp99,28 triliun. Hasil analisis simulasi juga menunjukkan jika kenaikan HET pupuk dimulai bulan Mei 2016 secara bertahap akan meningkatkan biaya usaha tani. Namun, dengan adanya kenaikan HPP gabah 5% per tahun dan produksi padi yang diasumsikan juga terjadi kenaikan 1,5% per tahun, maka persentase kenaikan biaya usaha tani akan tetap diikuti dengan kenaikan pendapatan petani. Tapi usulan ini ditolak DPR karena tidak populer.



## LAMPIRAN VI.II. (Notulensi Rapat)

**Tempat :** Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Ruang (R.611)

**Tanggal:** 5 Juni 2018

**Waktu:** Pukul 13.00-13.30WIB



Pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2018 pada pukul 13.00 WIB diadakan rapat dalam rangka penyusunan draft Analisis Ringkas Cepat (ARC) siklus pendahuluan RAPBN 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran (R.611). Rapat ini dipimpin oleh Ibu Rastri Paramita, S.E., M.M. selaku Koordinator Bidang Asumsi Makro dan dihadiri oleh para staf Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran (PKA). Ibu Rastri Paramita menyampaikan bahwa ARC tahun ini berbeda dengan ARC tahun-tahun sebelumnya yang lebih bersifat *by request*, dimana pada tahun ini PKA akan lebih proaktif menyampaikan ARC kepada Pimpinan DPR RI dan Banggar.

Rapat dibuka dengan pemaparan draft ARC yang berjudul "Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019". Setelah pemaparan draft para Analis memberikan usulan atau masukan diantaranya adalah :

1. Penajaman rekomendasi kebijakan dalam ARC tersebut;
2. Perlu adanya pembahasan yang lebih detail yang dapat dijadikan sub-tema ARC tersebut yaitu tentang kinerja ekspor Indonesia yang belum memuaskan dan investasi di tahun politik.

Kedua saran tersebut telah disepakati bersama dan akan segera ditindaklanjuti untuk penyempurnaan ARC tersebut. Akhirnya, rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB.

**Tempat :** Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Ruang (R.611)

**Tanggal:** 25 Juni 2018

**Waktu :** Pukul 16.00-16.30WIB



Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB diadakan rapat dalam rangka penyempurnaan draft Analisis Ringkas Cepat (ARC) siklus pendahuluan RAPBN 2019 dengan sub tema “Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah” yang bertempat di Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran (R.611). Rapat ini dipimpin oleh Ibu Rastri Paramita, S.E., M.M. selaku Koordinator Bidang Asumsi Makro dan dihadiri oleh para staf Analisis APBN di Pusat Kajian Anggaran (PKA) dan dihadiri oleh Analisis APBN Non Fungsional. Rapat dibuka dengan pemaparan poin-poin penting dalam ARC. Setelah pemaparan draft para Analis memberikan usulan atau masukan diantaranya adalah :

1. Perbandingan kebijakan sistem nilai tukar Indonesia dan devisa dengan negara lain khususnya Tiongkok ;
  2. Penambahan argument bahwa pelemahan nilai tukar rupiah akan meningkatkan ekspor;
  3. Kebijakan *hedging* untuk melindungi nilai kontrak pada saat jatuh tempo pembayaran.
- Kedua saran tersebut telah disepakati bersama dan akan segera ditindaklanjuti untuk penyempurnaan ARC tersebut. Akhirnya, rapat ditutup pada pukul 16.30 WIB.



**Tempat :** Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran

**Tanggal:** 19 Juli 2018

**Waktu :** Pukul 09.00-10.00WIB



Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pada pukul 09.00 WIB diadakan rapat dalam rangka penyempurnaan draft Analisis Ringkas Cepat (ARC) siklus pendahuluan RAPBN 2019 dengan sub tema “Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Petani ” yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran Bapak Ahmad Asep Saefulloh, M.Si., Ibu Rastri Paramita, S.E., M.M. selaku Koordinator Bidang Asumsi Makro dan dihadiri oleh para staf Analisis APBN di Pusat Kajian Anggaran (PKA) dan juga oleh para staf Analisis APBN.

Rapat dibuka dengan pemaparan poin-poin penting dalam ARC. Setelah pemaparan draft , Bapak Kepala Pusat (Kapus) beserta Analis memberikan usulan atau masukan diantaranya adalah :

1. Melakukan pemutakhiran data agar *up to date* dengan kebutuhan Banggar;
2. Perbaikan pada referensi atau rujukan;
3. Penambahan rekomendasi kebijakan yang relevan;
4. Penambahan infografis pada dokumen ARC tersebut.

Akhirnya rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB.

## **LAMPIRAN KEGIATAN VI**

### **(Siklus APBN Induk)**

**Fokus Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata  
Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Penyerap Devisa  
Untuk Memperkuat Nilai Tukar Rupiah**

Dalam keadaan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD belakangan ini yang sempat menembus Rp 14.800,00-Rp14.900,00, BI melakukan langkah stabilisasi dengan intervensi melalui Cadangan Devisa dan juga menaikkan Suku Bunga Bank Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pun bereaksi dengan memperketat izin untuk impor terutama untuk barang dan mewah dan mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk menukarkan USD ke Rupiah. Dalam kondisi perekonomian yang fluktuatif dan cukup sulit diprediksi seperti sekarang ini, RAPBN yang disusun pemerintah bersama DPR harus kredibel dan realistis untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi. Pemerintah harus fokus mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada sektor prioritas yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB), perolehan devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan DPR khususnya Badan Anggaran (Banggar) dan komisi diharapkan dapat membahas, menyetujui dan melakukan kontrol pada RKA Kementerian/Lembaga sektor prioritas tersebut dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor di Indonesia yang harus diprioritaskan untuk besar dan terus berkembang. Data dari tahun 2014-2017 menunjukkan tren yang positif pada kontribusi pariwisata terhadap devisa negara sebagai berikut :

**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Devisa RI  
Tahun 2014-2017 (Juta USD)**



Sumber : Capaian Sektor Pariwisata 3 Tahun Jokowi-JK (2017)

Untuk menambah “pundi-pundi” devisa, tentunya pemerintah dan Kemenpar harus fokus untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan rilis dari BPS, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia meningkat selama 5 tahun terakhir. Jumlah kunjungan wisman selama 2017 merupakan yang tertinggi dalam periode tersebut. Selama 2017 jumlah kunjungan wisman mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik 21,88 persen dibanding jumlah kunjungan selama 2016 yang tercatat 11,52 juta kunjungan. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2017 tersebut masih jauh dibawah target kinerja Kemenpar pada tahun 2017 sebesar 15 juta wisman.

Pemerintah sendiri pada tahun 2019 menargetkan kunjungan 20 juta wisman dan devisa sebesar Rp260 triliun. Namun, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja keras untuk memperbaiki daya saing. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia



dan Thailand dari Indeks Daya Saing Pariwisata *World Economics Forum* (WEF) Tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 42 dunia. Capaian tersebut masih tertinggal jauh dari Singapura (13), Malaysia (26) dan Thailand (34). Aspek daya saing pariwisata yang harus mendapat perhatian untuk diperbaiki oleh pemerintah menurut WEF antara lain adalah : a) Keamanan, b) Higienitas, c) Implementasi TIK, d) Kelestarian lingkungan dan, e) infrastruktur untuk pelayanan kepada turis.

Dukungan kepada sektor pariwisata sebenarnya sudah cukup besar dalam bentuk alokasi anggaran yang terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Secara nominal sektor pariwisata mengalami pertumbuhan rata-rata 45,8 persen, yaitu dari Rp1,9 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp5,8 triliun dalam tahun 2017. Namun besaran anggaran yang terus meningkat tersebut tidak diikuti oleh efektivitas dalam menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan. Untuk menguatkan data dari WEF tersebut, BPK dalam LHP Pemeriksaan Kinerja Terhadap Atas Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015-Semester I 2016 menemukan permasalahan ketidakefektifan khususnya di pemasaran dan pengembangan destinasi untuk segmen wisman sebagai berikut :

- a. Koordinasi Lintas Sektor Pengembangan Destinasi Pariwisata belum memadai;
- b. Perencanaan pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan destinasi yang berkelanjutan masih belum memadai;
- c. Belum terdapat koordinasi antara strategi pemasaran dengan implementasi promosi terkait penggunaan media ruang;
- d. Target dan capaian *branding* melalui media ruang dan festival belum ditetapkan sehingga kinerja promosi melalui *branding* Pesona Indonesia maupun *Wonderful Indonesia* tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Meskipun besaran dana yang telah dialokasikan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai target kunjungan wisatawan, opsi pengurangan anggaran untuk pariwisata khususnya anggaran pemasaran wisatawan mancanegara bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini. Simulasi regresi linier sederhana secara *time series* (2012-2016) oleh Sukirman (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kenaikan anggaran pariwisata dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jika pemerintah menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara, maka dibutuhkan kurang lebih anggaran pemasaran pariwisata mancanegara sebesar Rp6,09 triliun. Meskipun terdapat pengaruh positif akan tetapi dilihat dari signifikansi, alokasi anggaran pemasaran pariwisata tersebut tidak efektif jika pemerintah juga belum melakukan perbaikan pada implementasi kebijakan koordinasi lintas sektoral antara K/L/Daerah untuk membangun destinasi pariwisata yang memadai dan koordinasi untuk memperbaiki strategi pemasaran. Jika promosi pariwisata tidak diimbangi dengan pengembangan destinasi pariwisata, yang memadai tentu akan membuat wisatawan kecewa, dan enggan untuk kembali ke Indonesia.

Berikut adalah pertimbangan kebijakan yang ditempuh oleh Komisi X maupun Banggar dalam mendorong proses penganggaran yang kredibel di sektor pariwisata dalam rangka memperkuat devisa :

- a. **Komisi X** dapat mempertimbangkan kenaikan anggaran khususnya pada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Namun, tetap harus ada mekanisme *check and balance* dari 2 Kedeputan ini agar hasilnya optimal. Untuk pemasaran sebaiknya fokus pada negara dengan potensi *spending* dan *length of stay* wisman yang tinggi;
- b. **Komisi X** berkoordinasi dengan Banggar untuk mendorong Menteri Keuangan dan Bappenas untuk dapat mengalokasikan anggaran infrastruktur pariwisata lebih besar serta mendorong Koordinasi Lintas Sektoral untuk menyelesaikan "10 Bali Baru" ;
- c. **Komisi X** meminta Kemenpar berkoordinasi dengan BKPM untuk membatasi izin investor asing yang masuk di sektor pariwisata agar *profit* pariwisata tidak keluar dari Indonesia.



## Analisis Ringkas Cepat Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas

Pada RAPBN 2019, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Pertumbuhan tersebut salah satunya ditopang oleh Belanja Pemerintah. Dari 5 komponen pertumbuhan di RAPBN 2019 yaitu Belanja Rumah Tangga, Belanja Pemerintah, Ekspor, Impor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi Fisik, kontribusi Belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan pada tahun 2019 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,4%. Untuk melihat prospek kontribusi Belanja Pemerintah tersebut, perlu dilihat bagaimana efektivitas kebijakan Transfer ke Daerah (DAU, DAK dan DBH), sejauh ini dalam APBN untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, menekan angka kemiskinan dan membangun perekonomian daerah yang kompetitif. Secara umum, besaran Transfer ke Daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 transfer ke daerah sebesar Rp573,7 triliun, kemudian pada 2018 naik sebesar 22,6% menjadi Rp703,6 triliun. Gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dalam infografis berikut ini :



Sumber : Kementerian Keuangan RI (2017)

**Infografis diganti**

Dari infografis di atas dapat terlihat bagaimana timpangnya kontribusi antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia medio 2015-2016. Tingkat kemiskinan daerah juga masih cukup tinggi terutama di wilayah Papua. Hal yang perlu mendapat apresiasi adalah terdapat pertumbuhan PDRB year on year (yoy) di masing-masing daerah. Melalui gambaran singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa **sementara ini** pemanfaatan belanja pemerintah dalam bentuk transfer ke daerah tersebut belum efektifa menanggulangi kemiskinan, kesenjangan fiskal, dan membangun ekonomi regional yang kompetitif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena quality spending yang belum produktif. Daerah lebih menggunakan dana tersebut untuk belanja rutin dan administrasi dibanding belanja yang produktif seperti Belanja Modal.

Secara lebih rinci, berikut beberapa faktor yang menyebabkan inefektifitas pada kebijakan transfer ke daerah tersebut yaitu :



- a. Ketidakpatuhan daerah terhadap porsi anggaran belanja tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2017 menyatakan minimal 20 persen penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan infrastruktur/Belanja Modal belum dipenuhi oleh 302 daerah ;
- b. Kapasitas birokrat di daerah yang belum memadai untuk merealisasikan dana transfer tersebut sehingga terdapat dana transfer pemerintah pusat yang mengendap di deposito bank. Hal tersebut sebetulnya juga tidak lepas dari kekhawatiran pejabat berurusan dengan hukum sehingga memilih “main aman” dengan mendepositokannya ke Bank;
- c. Adanya permasalahan dalam pertanggungjawaban belanja daerah yang dibiayai dari Dana Transfer Pemerintah Pusat . Belanja daerah ini biasanya termasuk dalam kelompok Belanja Modal (proyek infrastruktur) yang biasanya dibiayai dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Permasalahan ini kerap menjadi temuan BPK dan menyebabkan kerugian negara.

Terkait porsi atau rasio belanja, berdasarkan data terkini dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), rata-rata rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah dalam APBD terus menurun selama 4 tahun terakhir dari 40,1% di 2014 menjadi 33,5% di 2018. Sebaliknya, untuk Belanja Modal rasionya fluktuatif namun di tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 3,9% dari tahun 2016. Pada tahun 2017 rasio Belanja Modal mencapai 25,9%, namun, pencapaian tersebut masih dibawah target nasional dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 30%. Masih rendahnya Belanja Modal ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal Belanja Modal ini mempunyai *multiplier effect* pada investasi yang akan masuk ke daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun faktanya, pemerintah daerah masih terjebak dalam pola pikir lama yang cenderung main aman, hal tersebut tentu berimbas kepada pembangunan yang stagnan di daerah tersebut.

Pemerintah pusat saat ini telah bertindak untuk mendisiplinkan perilaku pemerintah daerah tersebut dimana untuk DAU yang sebelumnya bebas digunakan untuk belanja apa saja oleh pemerintah daerah, kini 25% dari DAU tersebut wajib digunakan untuk Belanja Modal/infrastruktur. Namun, perlu langkah konkrit yang lebih jauh lagi untuk dapat mengubah pola pikir pemerintah daerah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah bersama DPR untuk mengubah pola pikir pemerintah daerah sehingga realisasi Belanja Modal diharapkan akan meningkat dan berkualitas :

- a. DPR dalam hal ini Komisi XI perlu berdiskusi dengan Kemenkeu untuk membuat skema *reward* dan *punishment* yang tepat untuk memacu daerah agar bersemangat untuk merealisasikan Dana Transfer dari pusat sesegera mungkin untuk Belanja Modal;
- b. Komisi XI perlu meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong Bank Pembangunan Daerah agar tidak menerima “parkiran” deposito yang bersumber dari Dana Transfer Pusat. Perlu adanya sanksi yang tegas dan proporsional bagi Bank yang menyimpan dana transfer tersebut;
- c. Komisi XI diharapkan dapat mendorong BPK untuk menjadi “konsultan” bagi pemerintah daerah agar mereka tidak takut dalam merealisasikan Belanja Modal dan tidak melawan peraturan perundang-undangan;
- d. Perlu adanya pemetaan terhadap daerah-daerah yang Belanja Modalnya rendah atau bermasalah untuk diberikan pendampingan dan dimonitor secara rutin bersama-sama oleh DPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.



## Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel

Dalam rapat antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran pada tanggal 4 September 2018, Kementerian Keuangan mengajukan RAPBN 2019 di sektor kesehatan sebesar **Rp121,9 triliun** yang terdiri dari **Rp88,2 triliun** yang berasal dari **Belanja Pusat** dan **Rp33,7 triliun Transfer Daerah**. Khusus untuk Belanja Pusat, **anggaran untuk Kemenkes diajukan sebesar Rp58,7 triliun**. Jika anggaran tersebut disetujui, maka anggaran untuk Kemenkes meningkat sebesar 28% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp45,9 triliun. Salah satu pos yang harus mendapat perhatian adalah pada **Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** yang masuk dalam program strategis RPJMN 2015-2019. Apabila mengkaji kinerja Kemenkes di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, diperoleh data sebagai berikut :

**Gambar 1. Target Indikator Kinerja Ditjen P2P yang terkait dengan RPJMN 2015-2019**

Indikator	2015		2016		2017		2018		2019	KET
	Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian*)	Target	
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	280	263	271	257	262	254	254	Data tahunan	245	
2. Prevalensi HIV (persen)	<0,5	0,33	<0,5	0,33	<0,5	0,33	<0,5	Data tahunan	<0,5	
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	21	21	23	23	25	24	26	24	34	
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	225	232	245	247	265	266	285	272	300	
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis	9	17	12	22	15	28	24	29	35	
6. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,28	NA	24,77	32,4	24,28	32,4	23,79	Data survei	23,38	
7. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4	NA	15,4	20,7	15,4	20,7	15,4	Data survei	15,4	
8. Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun	6,9	NA	6,4	8,8	5,9	8,8	5,6	Data survei	5,4	
9. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	75	66	80	80,7	85	85,4	90	Data tahunan	95	

**Sumber:** Bahan Paparan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan

Gambar 1 menunjukkan 9 indikator Ditjen P2P yang juga merupakan indikator pada RPJMN 2015-2019. Terlihat bahwa 3 indikator kinerja Ditjen P2P masih belum tercapai selama 2016-2017. Ketiga indikator tersebut adalah 1)Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (persen), 2)Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ tahun (persen), dan 3)Prevalensi merokok penduduk usia kurang dari sama dengan 18 tahun. Pada indikator prevalensi tekanan darah tinggi diketahui bahwa prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2016 dan 2017 masih jauh dibawah target kinerja (semakin kecil persentasenya semakin bagus). **Pada tahun 2016 target kinerja prevalensi tekanan darah tinggi adalah sebesar 24,77 persen, sementara capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar 32,4 persen**. Pada tahun 2017 target prevalensi tekanan darah tinggi direncanakan untuk turun hingga 24,28 persen, namun capaian kinerja tahun 2017 tetap pada angka 32,4 persen.

Serupa dengan prevalensi darah tinggi, prevalensi obesitas pada usia 18 tahun keatas dan prevalensi merokok penduduk usia kurang dari sama dengan 18 tahun masih jauh dibawah target kinerja. **Pada tahun 2016 dan 2017 prevalensi obesitas pada usia 18 tahun keatas tetap statis pada angka 20,7 persen, sementara target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017 adalah 15,4 persen. Prevalensi merokok juga menunjukkan tren angka prevalensi yang statis selama 2016 dan 2017 yaitu sebesar 8,8, padahal target yang ditetapkan adalah 6,4 pada 2016 dan 5,9 pada 2017.**

Apabila pencegahan dan pengendalian tidak dilakukan secara maksimal, maka akan berdampak sistemik pada biaya pengobatan. Program Jaminan Kesehatan Negara (JKN) yang diorganisir BPJS yang defisit selama 3 tahun terakhir tidak lepas dari kurang optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit. Anggaran untuk BPJS sebagian besar habis untuk pengobatan katastrofik seperti gagal ginjal, kanker dan stroke. **Penyakit tersebut sebagian besar muncul dari kebiasaan merokok, obesitas dan tekanan darah tinggi.** Selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS selalu negatif. Pada tahun 2014 defisit anggaran perusahaan publik itu mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016. Pada akhir 2018, BPJS Kesehatan diperkirakan akan menanggung defisit anggaran sebesar Rp16 triliun. Dampaknya adalah BPJS terpaksa menunggak biaya operasional rumah sakit seperti dokter, obat-obatan dan lain-lain. Penyertaan penyakit katastrofik ke dalam penyakit yang ditanggung JKN memang baik, akan tetapi pemerintah harus waspada apabila jumlah pengidap penyakit tersebut lebih besar daripada pendapatan BPJS. Hal tersebut akan berpengaruh sistemik kepada kualitas hidup rakyat Indonesia dan menghambat pembangunan.

Sebagai langkah perbaikan kedepannya, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh DPR bersama pemerintah :

- DPR perlu mempertimbangkan kenaikan anggaran tetapi juga mendorong efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit terkait Prevalensi Darah Tinggi, Obesitas dan kebiasaan merokok untuk usia dibawah 18 tahun;
- DPR bersama Kemenkes mengkaji anggaran untuk *coverage* penyakit katastrofik dalam layanan JKN. Jika memang dirasa membebani APBN, perlu ada tindak lanjut berupa pengurangan subsidi untuk jenis penyakit tersebut dan menarik premi tambahan. Hal tersebut diharapkan akan mendorong dan memaksa masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.



## Analisis Singkat PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia

Penyertaan Modal Negara merupakan proses pemisahan aset negara menjadi modal di perusahaan baik BUMN, BUMS, perusahaan asing, ataupun perusahaan milik lembaga internasional. PMN dapat berupa tunai atau hak negara yang dinilai dengan uang. PMN diharapkan mampu memberikan *multiplier effect*, tanpa menghabiskan biaya yang besar. Hal ini terjadi karena proses pemberian PMN adalah proses pemisahan aset negara untuk dikelola BUMN, tanpa melepas aset negara tersebut. Dalam Rapat Banggar pada tanggal 20 September 2018, telah disepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT. PLN (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) pada pagu anggaran tahun 2019. Masing-masing sebesar Rp6,5 triliun untuk PLN dan 10 triliun untuk Hutama Karya. PMN tersebut diperuntukkan untuk pengembangan kapasitas bisnis BUMN tersebut yaitu untuk program pembangunan listrik desa (PLN) dan menyelesaikan target pembangunan lima ruas tol Trans Sumatera agar selesai di tahun 2019 (Hutama Karya).

Tujuan PMN pada 2 BUMN tersebut memang *on track* dengan Nawacita pemerintahan yang fokus pada infrastruktur dan konektivitas serta peningkatan kapasitas produksi. Namun, DPR dan juga pemerintah juga harus memperhatikan defisit pada neraca transaksi berjalan. Akibat dari defisit neraca transaksi berjalan tersebut menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap USD semakin melemah hingga menembus kisaran Rp14.800/USD-Rp14.900/USD. Untuk menguatkan kembali nilai tukar perlu ada upaya peningkatan ekspor dan pengendalian impor secara besar-besaran. Ketika ekspor meningkat, maka keuntungan ekspor dalam bentuk valas akan menambah persediaan valas dalam negeri akan bertambah sehingga nilai tukar Rupiah terhadap USD akan menguat.

LPEI sebagai lembaga yang sepenuhnya dimiliki pemerintah yang mempunyai mandat untuk menyediakan pembiayaan dalam rangka mendorong ekspor nasional perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk PMN. Pada rapat antara Kementerian Keuangan dengan Banggar pada tanggal 4 September 2018, Kementerian Keuangan mengajukan permohonan PMN kepada LPEI sebesar Rp2,5 triliun untuk mendorong peningkatan ekspor dan kinerja pemodal serta melaksanakan penugasan khusus. Alokasi penambahan PMN kepada LPEI untuk peningkatan kapasitas bisnis dialokasikan sebesar Rp1,5 triliun sedangkan untuk penugasan khusus sebesar Rp 1 triliun. Penugasan khusus diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.08/2017 dimana Menteri Keuangan telah mengeluarkan tiga Keputusan Menteri tentang penugasan khusus ekspor.

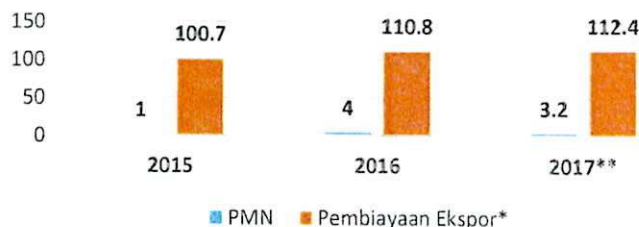
LPEI jika dibandingkan dengan bank pada umumnya lebih memiliki ruang gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi *supply* (dalam negeri) dan di sisi *demand* (luar negeri). Pembiayaan dapat diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Terkait persetujuan pemberian PMN sendiri, tentu harus ada kajian yang komprehensif tentang kinerja entitas yang bersangkutan setelah diberikan PMN tersebut. Untuk kasus LPEI, dana dari PMN tersebut dimaksudkan agar eksportir bisa menikmati tingkat suku bunga yang kompetitif dan meningkatkan *outstanding* pembiayaan kepada eksportir selain melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah. Dengan tingkat suku bunga yang kompetitif akan menjadi stimulus munculnya eksportir-eksportir khususnya dari sektor UMKM yang akan menyumbang devisa dan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Secara lebih rinci, Beberapa capaian yang mampu dihasilkan dari penambahan PMN kepada LPEI di antaranya peningkatan kinerja pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor, penyediaan suku bunga pembiayaan ekspor yang kompetitif kepada eksportir, dan



peningkatan peluang penetrasi ekspor ke negara-negara non tradisional. Berikut adalah perkembangan PMN yang didapat LPEI beserta kinerja yang dicapai (terutama penyaluran pembiayaan ekspor) selama 3 tahun terakhir :

**PMN dan Capaian Pembiayaan Ekspor  
2015-2017  
(Triliun Rupiah)**



**Sumber :** LPEI dan Nota Keuangan RAPBN 2019

**Ket : \*)** PMN didapat diakhir tahun berjalan, maka capaian pembiayaan baru diukur pada tahun selanjutnya.

**\*\*)** Asumsi capaian pembiayaan ekspor sampai akhir tahun 2018

PMN yang didapat LPEI naik turun, tetapi capaian pembiayaan ekspor menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Namun, berdasarkan analisis statistik sederhana , ternyata PMN tidak signifikan berpengaruh terhadap capaian pembiayaan ekspor LPEI selama tiga tahun berturut-turut. Dapat diinterpretasikan bahwa LPEI tidak terlalu bergantung dari PMN untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. Namun, apabila melihat dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional dan angka yang diajukan oleh pemerintah pada RAPBN 2019 Rp2,5 triliun menurun Rp0,7 triliun dari realisasi tahun lalu, **jumlah yang diajukan oleh pemerintah dapat dipertimbangkan untuk disetujui**. Disamping itu, DPR juga harus mendorong LPEI untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik dalam proses bisnis mereka. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap LPEI Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Semester I) ternyata LPEI belum sepenuhnya didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut adalah catatan penting dari BPK untuk menjadi perhatian LPEI :

- a. LPEI belum sepenuhnya melaksanakan mandat dalam mendukung Program Ekspor Nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (Banyak pemberian pinjaman yang tidak tepat sasaran);
- b. LPEI tidak segera menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan akumulasi cadangan LPEI;
- c. Belum ada kejelasan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana eks Program Kemitraan PT BEI (Persero) yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang LPEI;
- d. LPEI belum memiliki mekanisme pengawasan pembiayaan melalui skema two step loan kepada end user dan definisi UMKM menurut LPEI tidak selaras dengan definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Besaran tarif premi Asuransi Proteksi Piutang Dagang belum mengakomodasi tarif premi dari perusahaan reasuransi dan besaran tarif premi Asuransi Marine Cargo dan No Claim Bonus yang diberikan belum diatur dalam peraturan internal LPEI; dan
- f. Pemberian rating dua debitur LPEI tidak sesuai dengan Manual IEB Credit Rating System dan prinsip kehati-hatian;
- g. LPEI belum sepenuhnya menerapkan Risk Assesment yang memadai dalam penetapan tingkat suku bunga Pembiayaan;
- h. Pengikatan dan penilaian agunan terkait pembiayaan yang diberikan oleh LPEI belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

## LAMPIRAN VI.II. (Notulensi Rapat)

**Tempat :** Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Ruang (R.611)

**Tanggal:** 17 September 2018

**Waktu:** Pukul 13.30-14.30 WIB



Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pada pukul 13.30 WIB diadakan rapat dalam rangka membahas finalisasi Analisis Ringkas Cepat (ARC) Siklus APBN Induk yang bertempat di Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran (R.611). Rapat ini dipimpin oleh Ibu Rastri Paramita, S.E., M.M. selaku Koordinator Bidang Asumsi Makro dan dihadiri oleh para staf Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran (PKA). Terdapat 2 ARC sekaligus yang dibahas dalam rapat kali ini yaitu :

1. Fokus Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Penyerap Devisa Untuk Memperkuat Nilai Tukar Rupiah;
2. Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas.

Para Analis memberi beberapa saran dan masukan penting yaitu:

1. Untuk ARC yang pertama perlu ada penyederhaan judul , data rinci mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara dan pada bab rekomendasi penggantian “Komisi” menjadi DPR saja;
2. Sedangkan untuk ARC yang kedua perlu ada perubahan rekomendasi kebijakan.

Kedua saran tersebut telah disepakati bersama dan akan segera ditindaklanjuti untuk penyempurnaan ARC tersebut. Akhirnya, rapat ditutup pada pukul 14.30 WIB.



**Tempat :** Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Ruang (R.611)

**Tanggal:** 24 September 2018

**Waktu :** Pukul 08.00-09.00 WIB



Pada hari Senin tanggal 24 September 2018 pada pukul 08.00 WIB diadakan rapat dalam rangka membahas finalisasi Analisis Ringkas Cepat (ARC) Siklus APBN Induk yang bertempat di Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran (R.611). Rapat ini dipimpin oleh Ibu Rastri Paramita, S.E., M.M. selaku Koordinator Bidang Asumsi Makro dan dihadiri oleh para staf Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran (PKA). Terdapat 2 ARC sekaligus yang dibahas dalam rapat kali ini yaitu :

1. Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel;
2. Analisis Singkat PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia.

Para Analis memberi beberapa saran dan masukan penting yaitu:

1. Untuk ARC yang pertama perlu ada perubahan rekomendasi kebijakan mengenai coverage BPJS;
2. Untuk ARC yang kedua cukup menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghindari bias karena data yang tersedia tidak mencukupi.

Kedua saran tersebut telah disepakati bersama dan akan segera ditindaklanjuti untuk penyempurnaan ARC tersebut. Akhirnya, rapat ditutup pada pukul 09.00 WIB.





## **LAMPIRAN KEGIATAN VII**

### **(Siklus Pembicaraan Pendahuluan)**

---



## LAMPIRAN VII.I. (Analisis Final dan Infografis)

### Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

Berdasarkan hasil Rapat antara Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Bappenas) dan Bank dalam rapat-rapat di siklus pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019, pemerintah mengajukan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-5,8% Perkembangan terakhir, Panja Asumsi menetapkan asumsi pertumbuhan berkisar 5,2%-5,6%. Dasar pengajuan asumsi tersebut dilandasi optimisme bahwa akan terjadi peningkatan investasi dan momentum perekonomian yang semakin membaik. Apabila dilihat sekilas dari proyeksi tersebut, hal tersebut sangat jauh dari apa yang ditargetkan oleh Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 8% pada tahun 2019. Bahkan asumsi atau proyeksi tersebut sebenarnya juga kurang realistis apabila melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi belakangan ini.

Ketidakrealistisan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut dipertegas dengan selalu melesetnya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR RI selama tiga tahun berturut-turut. Perkembangan terakhir pada TA 2017 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,07% dibawah target APBNP 2017 sebesar 5,2% (BPS, 2017). Namun, pencapaian 5,07% ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2014. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari kinerja ekspor Indonesia sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, yang belum mencapai harapan dikarenakan ada perlambatan ekonomi global yang menurunkan *demand* ekspor khususnya non migas. Penurunan ini secara eksternal disebabkan oleh kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang berdampak sistemik secara *indirect* pada kinerja ekspor Indonesia. Sementara secara internal berkaitan dengan belum kompetitifnya sarana prasarana penunjang ekspor. Alhasil, pemerintah mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonominya.

Pemerintah pada Tahun Anggaran 2019 mengusung tema kebijakan fiskal 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Terkait dengan investasi, apabila dilihat dari perilaku investor, mereka cenderung untuk *wait and see* pada tahun 2019 yang bertepatan dengan pilpres dan pileg. Hal tersebut berkaitan dengan kemungkinan timbulnya ketidakpastian karena kemungkinan perubahan regulasi. Untuk daya saing, pemerintah berencana untuk memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan ekspor. Disatu sisi beberapa analisa dari lembaga riset dan perbankan menyakini bahwa kinerja ekspor di tahun politik ini akan melambat. Berbagai persoalan fundamental seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi menjadi faktor penghambat kinerja ekspor.

Pada tahun politik seperti ini akan lebih baik bagi pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan dengan memprioritaskan peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Khusus belanja pemerintah, pemerintah perlu fokus pada peningkatan Belanja Modal yang diarahkan untuk produktivitas dan konektivitas serta menyerap tenaga kerja terutama di daerah.

Untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, pemerintah dapat menggunakan kebijakan populis seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan Tunjangan Hari Raya (THR). Tentunya penyaluran Bansos tersebut harus tepat sasaran dan untuk itulah perlu dirintis sistem *database* yang terintegrasi antar instansi dari tingkat pusat hingga ke daerah atau desa. Kebijakan seperti ini memberikan manfaat untuk jangka



pendek dan dampaknya hanya terasa pada tahun berjalan. Sedangkan Belanja Modal khususnya yang bersifat produktif dan mempunyai dalam pembangunan seperti jalan raya, jembatan, bendungan, pelabuhan dan bandara meskipun manfaatnya baru bisa dirasakan pada beberapa tahun yang akan datang. Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa bahwa hingga akhir 2017, pemerintah telah merampungkan 26 Proyek Nasional Strategis (PSN) infrastruktur dengan total nilai investasi Rp46,5 triliun atau 1,1% dari total PSN sebanyak 245 proyek dan 2 program. Sebanyak 20 proyek diselesaikan pada 2016, sedangkan pada tahun lalu, ada 6 proyek yang telah dioperasikan. Estimasi total nilai investasi seluruh proyek dan program PSN Rp4.197 triliun.

Dari aspek kebijakan moneter, Pemerintah bersama BI mengajukan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada tahun 2019 berkisar antara Rp13.700-Rp14.000. Pada APBN 2018, pemerintah bersama DPR mematok nilai tukar rupiah sebesar Rp13.400 dengan pertumbuhan sebesar 5,4%. Sedangkan pada tahun 2019, asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar cenderung lebih melemah namun pemerintah tetap menginginkan pertumbuhan yang sama bahkan lebih tinggi. Dalam skenario seperti ini, pemerintah harus mewaspadai dampak defisit neraca perdagangan dengan terus menggenjot ekspor dan membatasi impor agar target pertumbuhan dapat tercapai. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018 menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus perdagangan mencapai US\$ 1 miliar. Pemerintah juga perlu memaksimalkan ekspor komoditas kelapa sawit (CPO) disamping minyak dan gas ke negara-negara mitra dagang utama seperti China, Australia, Malaysia hingga AS. Disamping neraca perdagangan, beban belanja pembayaran utang luar negeri pada APBN juga akan terdampak. Adanya perubahan nilai kurs yang terjadi akan membuat pemerintah harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk melunasi pokok dan bunga utang yang sudah jatuh tempo. Hal tersebut bisa saja mengganggu pembangunan ekonomi yang disusun oleh pemerintah. Sementara dari sektor swasta, dengan adanya pelemahan ini juga akan membebani kondisi finansial mereka sehingga menghambat proses produksi. Dampaknya tentu akan menurunkan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional melambat.

Terdapat konsekuensi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Apabila ingin meraih tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam jangka pendek, pemerintah dapat menempuh kebijakan yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Tetapi apabila berorientasi pada jangka panjang tentu belanja produktif seperti Belanja Modal adalah jawabannya meskipun hal tersebut berpotensi mengorbankan target pertumbuhan yang disepakati karena manfaatnya baru dirasakan beberapa tahun yang akan datang. Target pertumbuhan sebesar 5,2%-5,6% tidak mustahil tercapai, namun membutuhkan kerja keras dan koordinasi yang optimal antar K/L dan daerah yang mungkin agak sulit dilakukan pada tahun politik. Berbagai kasus pada pemerintahan sebelumnya menunjukkan sulitnya melakukan koordinasi antara K/L dan daerah terutama pada akhir tahun masa pemerintahan yang berkuasa.





# REVIEW ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2019



Pemerintah bersama DPR dan Panja Asumsi Makro Banggar menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 di kisaran 5,2%-5,6%.



Target dan realisasi pertumbuhan ekonomi RI 3 tahun terakhir, hasilnya selalu meleset dan hanya mencapai 5,07% pada TA 2017. Capaian 5,07% adalah yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir dan jauh dari sasaran RPJMN 2015-2019.



Tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan kebijakan APBN untuk mendorong investasi dan daya saing yang salah satunya adalah mendorong ekspor. Namun sarana fondasi ekspor RI belum memadai.



Salah satu tantangan terbesar pencapaian pertumbuhan perekonomian melalui investasi di tahun 2019 adalah momen Pileg dan Pilpres. Diperkirakan investor akan menunda dan bersikap wait and see.



Akan lebih baik apabila pada tahun 2019, pemerintah bersikap realistis untuk fokus pada stabilisasi dan perbaikan daya beli masyarakat.

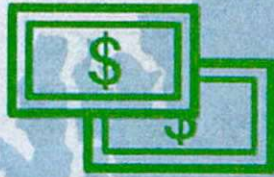


Pemerintah diharapkan menggenjot Belanja Modal dalam bentuk infrastruktur yang berdampak pada pembangunan seperti jalan raya, pelabuhan dan airport. Namun, harus fokus sesuai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan realistis sesuai dengan kemampuan.





Perkembangan terakhir tentang penyelesaian PSN pemerintah telah merampungkan 26 PSN dengan total nilai investasi Rp46,5 triliun pada tahun 2017 atau 1,1% dari keseluruhan PSN sebanyak 245 PSN dan 2 program. Estimasi total nilai investasi seluruh proyek dan program PSN Rp4.197 triliun.



Pemerintah bersama BI mengajukan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada tahun 2019 berkisar antara Rp13.700-Rp14.000. Dalam skenario seperti ini, pemerintah harus mewaspadai dampak defisit neraca perdagangan dengan terus menggenjot ekspor dan membatasi impor agar target pertumbuhan dapat tercapai.



Pelemahan nilai tukar Rupiah juga berdampak pada beban belanja pembayaran utang luar negeri pada APBN yang makin membesar. Sementara dari sektor swasta, dengan adanya pelemahan ini juga akan membebani kondisi finansial mereka sehingga menghambat proses produksi. Dampaknya tentu akan menurunkan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional melambat.



Apakah target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,6% tersebut realistis? Tentu tidak menutup kemungkinan target tersebut tercapai. Hanya saja hal tersebut membutuhkan kerja keras dan koordinasi yang optimal antar K/L dan daerah yang mungkin agak sulit dilakukan pada akhir tahun masa pemerintahan yang berkuasa.



## **Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah**

Dalam beberapa rapat pada siklus pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019, Pada tahun 2019, pemerintah bersama DPR khususnya Panja Asumsi Makro Banggar DPR RI sementara ini menyepakati pertumbuhan akan mencapai 5,2%-5,6% yang disertai dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ sebesar Rp13.700-Rp14.000. Hal tersebut cukup berisiko karena dengan mematok nilai tukar Rupiah yang lebih rendah akan berdampak pada membengkaknya pembayaran bunga dan pokok hutang dalam APBN dan perlambatan investasi sektor swasta sehingga target pertumbuhan ekonomi berpotensi meleset. Namun, dibalik asumsi pelemahan kurs nilai tukar tersebut menurut pemerintah juga terdapat optimisme untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Apabila berbicara tentang kinerja ekspor Indonesia, Sejak 2012, pertumbuhan ekspor negatif karena pertumbuhan ekonomi global yang lemah, dan anjloknya permintaan, dan harga komoditas. Ketika permintaan komoditas anjlok atau dikenai bea masuk maka ekspor pun akan menurun. Selama ini, sekitar 60% dari ekspor Indonesia terdiri atas komoditas seperti gas, batu bara, produk mineral, dan kelapa sawit. Selain itu, input untuk menghasilkan barang ekspor baik bahan baku maupun mesin tersebut ternyata adalah barang impor begitu juga dengan kapal pengangkutnya. Secara garis besar terdapat permasalahan di sisi logistik dan ketergantungan akan komoditas menurut beberapa ekonom ketika terjadi pelemahan kurs nilai tukar tidak otomatis mendongkrak nilai ekspor.

Pada tahun 2017, nilai total ekspor meningkat pesat sebesar 15,8% dari US\$ 145 miliar di tahun 2016 menjadi US\$ 168 miliar dan surplus kurang lebih US\$ 12 miliar. Secara umum, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2017 cukup baik, namun ternyata masih kalah jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia (US\$231 miliar dan US\$184 miliar).

Apabila Indonesia memiliki fondasi ekspor yang baik, maka kinerja ekspor Indonesia tentu akan semakin meningkat. Peningkatan kinerja ekspor akan berdampak pada ketahanan perekonomian nasional suatu negara terutama dalam bentuk cadangan devisa. Ketika sebuah negara memiliki cadangan devisa yang besar maka negara tersebut tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uangnya akibat dinamika perekonomian global. Sebagai contoh, Tiongkok dengan cadangan devisanya yang besar dapat mematok nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang negara lain (*fixed exchange rate*). Sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem *floating exchange rate* (mengambang), yang berarti bahwa intervensi di pasar valuta asing lebih diarahkan untuk menstabilkan atau menghindari gejolak nilai tukar rupiah di pasar dan tidak mematok dikisaran tertentu.

Perkembangan terakhir menyatakan bahwa Nilai cadangan devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi pada Januari 2018 sebesar US\$ 131,98 miliar. Namun, ternyata cadangan devisa juga menyusut cepat dalam empat bulan berturut-turut. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2018 sebesar US\$ 122,9.

Rekor cadangan devisa merosot sejak nilai tukar rupiah terus tertekan pada Februari 2018. Saat itu kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) melewati Rp 13.500. Tekanan rupiah mencapai puncak pada Mei 2018 saat menembus Rp 14.000 per dollar. Perkembangan terakhir pada tanggal 6 Juli 2017, nilai tukar rupiah terhadap dollar menembus Rp14.400/US\$. Dalam jangka panjang, stabilisasi nilai tukar rupiah tidak boleh bergantung dengan menaikkan suku bunga BI tetapi juga meningkatkan cadangan devisa dengan menggenjot ekspor. Kebijakan menaikkan suku bunga ini hanya bagus untuk jangka pendek dan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Beberapa ekonom dan kalangan perbankan menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia masih cukup aman untuk digunakan dalam stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun, mereka menyatakan perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk terus menggenjot ekspor dan menekan impor. Dalam rangka memperkuat nilai tukar Rupiah melalui peningkatan cadangan devisa, perlu adanya peningkatan kinerja dan tata kelola ekspor Indonesia yang dapat dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing ekspor dengan melakukan perbaikan nilai tambah dan efisiensi dari sektor industri, meningkatkan inovasi dan produktivitas di semua sektor agar tidak bergantung pada komoditas;
2. Perluasan pasar tujuan ekspor ke negara lain seperti Rusia, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk itulah perlu adanya optimalisasi peran Atase Perdagangan di negara sahabat serta perbaikan birokrasi;
3. Perlu adanya insentif terhadap eksportir agar membawa uang dollar yang mereka peroleh untuk dibawa ke Indonesia. Perlu ada tinjauan mengenai UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana eksportir tidak diwajibkan membawa uang dollar ke Indonesia;
4. Sosialisasi dan juga insentif pemanfaatan instrumen keuangan kepada para eksportir dalam bentuk *forward/ future contract* valuta asing (*hedging*) untuk melindungi nilai kontrak pada saat jatuh tempo pembayaran.





## PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

### PENINGKATAN KINERJA DAN TATA KELOLA EKSPOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN CADANGAN DEvisa UNTUK STABILISASI NILAI Tukar RUPIAH



Pada tahun 2019, pemerintah bersama DPR sementara ini memprediksi pertumbuhan akan mencapai 5,2%-5,6% yang disertai dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ sebesar Rp13.700-Rp14.000.

Apabila mematok nilai tukar Rupiah lebih rendah hal tersebut akan berdampak pada membengkaknya pembayaran bunga dan pokok hutang dalam APBN dan perlambatan investasi swasta. Namun, pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut adalah peluang meningkatkan ekspor.



Secara garis besar terdapat permasalahan di sisi biaya logistik bahan baku yang tinggi dan ketergantungan akan komoditas yang mana hal tersebut menurut beberapa ekonom, ketika terjadi pelemahan kurs nilai tukar tidak otomatis mendorong nilai ekspor RI.



Apabila kinerja ekspor membaik maka cadangan devisa akan meningkat sehingga nilai tukar rupiah akan menguat. Cadangan devisa RI pada Januari 2018 mencapai rekor sebesar US\$ 131,98 miliar namun empat bulan kemudian menjadi US\$ 122,9 miliar. Pada 6 Juli 2017 nilai tukar rupiah menembus Rp14.400/US\$.

Dalam jangka panjang, stabilisasi nilai tukar rupiah tidak boleh bergantung dengan menaikkan suku bunga BI tetapi juga meningkatkan cadangan devisa dengan menggenjot ekspor dan menekan impor.

### PERBANDINGAN NILAI EKSPOR RI DENGAN NEGARA ASEAN TAHUN 2017



US\$ 231 M



US\$ 184 M



US\$ 168,7 M

### PENINGKATAN KINERJA DAN TATA KELOLA EKSPOR



Perbaiki nilai tambah dan efisiensi dari sektor industri untuk ekspor.



Optimalisasi peran Atase Perdagangan untuk membuka pasar ekspor baru seperti Rusia, Afrika dan Amerika selatan.

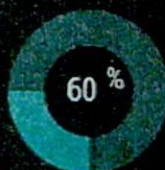


Perlu adanya tinjauan terhadap UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Devisa agar eksportir mau membawa uang hasil ekspor ke Indonesia.



Sosialisasi dan insentif pemanfaatan forward contract sebagai nilai lindung pada jatuh tempo pembayaran (hedging).

FYI



Selama ini, sekitar 60% dari ekspor Indonesia bergantung pada komoditas seperti gas, batu bara, produk mineral, dan kelapa sawit.

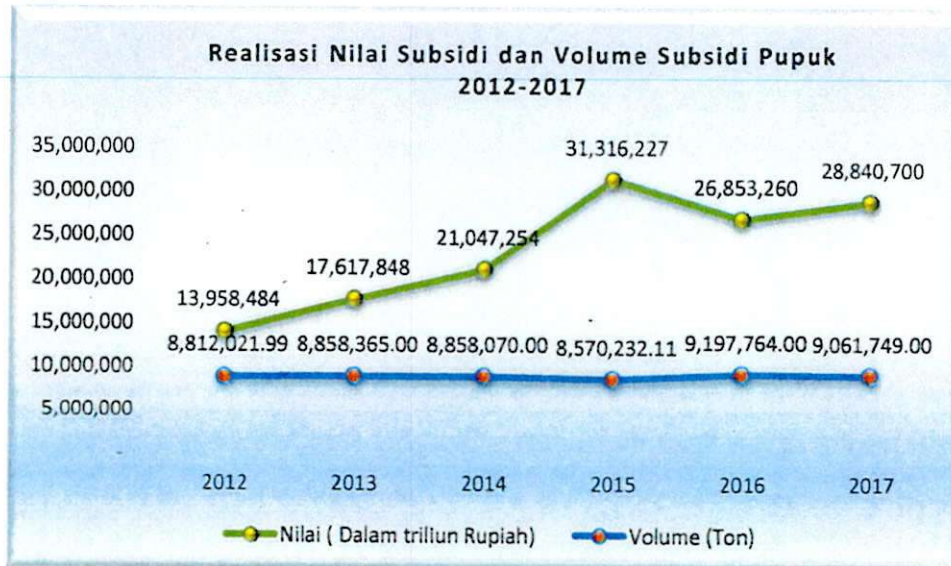


## Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk

### Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Petani

Tema dalam RKP 2019 ini adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Berkaitan dengan konteks pertumbuhan produksi pangan, persoalan yang mendapatkan sorotan adalah kebijakan subsidi pertanian dalam hal ini bantuan pupuk yang harus disalurkan secara tepat kepada yang berhak yaitu para petani kecil mengingat pengolahan komoditas pertanian sebagian besar dilakukan oleh petani kecil yang memiliki akses kepada input produksi yang terbatas. Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga, dan mutu.

Pemerintah melalui Kementan terus meningkatkan realisasi subsidi pupuk baik kimia maupun organik terutama dari tahun 2012-2015 dari Rp13.958.484 triliun menjadi Rp31.316.227 triliun (naik 124%). Meskipun sempat menurun di tahun 2016 menjadi Rp26.853.260 triliun (turun 14,25%), pada tahun 2017 nilai subsidi kembali meningkat menjadi Rp28.840.700 triliun (naik 7,4%). Meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan nilai subsidi, tetapi dari volume yang disalurkan justru meningkat dari 8.570.232,11 ton di tahun 2015 menjadi 9.197.764 ton di tahun 2016 (naik 7,3%). Sebelum akhirnya di tahun 2017 menurun menjadi 9.061.749 ton (turun 1,47%).



**Sumber :** LHP BPK Atas LK Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2012-2016  
LHP BPK Atas LKPP Tahun Anggaran 2017  
LAKIN Dit Pupuk dan Pestisida 2012-2017, diolah

Kebijakan subsidi pupuk sampai saat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan guna mempertahankan ketahanan pangan nasional berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dampak positif dari kebijakan subsidi pupuk menurut Dewan Komisiner INDEF Bustanul Arifin terlihat dari data BPS yang mencatat peningkatan produksi pangan khususnya padi yang naik dari 75,4 juta ton gabah kering giling (GKG) di tahun 2015 menjadi 79,1 juta ton GKG di 2016. Kemudian pada tahun 2017, BPS mencatat peningkatan produksi gabah menjadi 81,38 juta ton GKG.

Dampak positif dari kebijakan tersebut layak untuk diapresiasi. Pada tahun ini, pemerintah akan memberikan kartu tani sebagai alat pembayaran untuk mempermudah transaksi dan mengurangi penyelewengan dan rencananya akan diujicobakan di 10 provinsi di luar Jawa. Namun, sebagaimana



lazimnya sebuah kebijakan tetap harus ada evaluasi pada aspek-aspek yang perlu mendapatkan perbaikan. Berdasarkan kajian dari Serikat Petani Indonesia (SPI) pada tahun 2016, kerap ditemui berbagai permasalahan berulang seperti realisasi penyaluran yang tidak mampu sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran dan diselewengkan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya permasalahan dalam penyaluran subsidi pupuk yang berulang pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (11.a/LHP/XVII/05/2015 dan 27/LHP/XVII/05/2016). Dari sisi finansial, kemampuan APBN untuk membiayai subsidi pupuk juga semakin terbatas, karena jika pada tahun yang sama pemerintah harus membayar hutang subsidi pupuk kepada produsen, maka pemerintah dengan persetujuan dari DPR akan membayar hutang subsidi pupuk tersebut dari anggaran subsidi pupuk yang disediakan APBN. Semakin besar nilai hutang pada tahun tersebut, semakin besar pula yang harus dibayarkan kepada produsen sehingga mengurangi jatah anggaran yang awalnya akan dibelanjakan untuk subsidi pupuk.

Untuk itulah pemerintah bersama DPR kedepannya perlu mengkaji berbagai opsi kebijakan terkait skema pembiayaan untuk subsidi pupuk tersebut agar tidak membebani APBN dan menciptakan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi para petani. Berikut adalah opsi kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah bersama DPR, antara lain:

### **1. Bantuan Langsung Pupuk**

Kebijakan ini diujicobakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu di Lombok Nusa Tenggara Barat. Gambaran dari kebijakan ini adalah petani menerima bantuan sejumlah pupuk sesuai kuota yang telah ditetapkan berapa pun harga pasar dari pupuk tersebut dan produsen/swasta akan memperoleh subsidi input (gas) kemudian petani akan diberikan kartu tani sebagai alat bayar. Sebagai konsekuensi, pemerintah harus mempertimbangkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi fluktuasi harga pupuk diatas batas maksimal ruang fiskal. Agar kebijakan ini tepat sasaran kepada penerima yang berhak, harus ada pemutakhiran database lintas institusi yaitu TNP2K, RDKK Kementan dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kementan.

### **2. Pengurangan Subsidi Pupuk Secara Bertahap**

Berdasarkan perhitungan dari Pokja Khusus Perumusan Kebijakan Subsidi Pupuk Kemenko Perekonomian pada tahun 2016, apabila subsidi dikurangi secara bertahap dan kemudian dicabut setelah 3 tahun atau setelah tahun ke 3 hanya disubsidi 20%, maka HET akan naik secara bertahap dan disparitas harga menurun sehingga penyelewengan berkurang. Meskipun HET naik, pendapatan petani akan naik asal dibarengi dengan kenaikan HPP gabah dan kenaikan produktivitas padi. Kebijakan ini diperkirakan akan menghemat Rp84,99 triliun hingga Rp99,28 triliun selama 5 tahun. Namun, kebijakan ini secara politik tidak populer dan pernah ditolak DPR.

### **3. Realokasi Subsidi Pupuk Kimia ke Pupuk Organik**

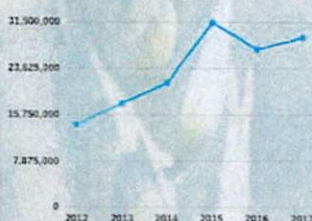
Subsidi pupuk kimia mendorong pemborosan penggunaan oleh petani dan merusak unsur hara dalam tanah sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan produktivitas. Pemerintah perlu mendorong perubahan alokasi subsidi secara bertahap dari pupuk kimia ke organik yang ekonomis, produktif dan ramah lingkungan. Dengan harga *low cost* pupuk organik dapat membantu petani kecil untuk lebih berkembang, meski hasilnya tidak seinstan apabila menggunakan pupuk kimia. Komposisi pupuk organik juga lebih mudah didapat dibandingkan pupuk kimia yang bahan dasarnya masih impor sehingga dapat menghemat biaya subsidi.





## ANALISIS OPSI KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI

### REALISASI SUBSIDI PUPUK 2012-2017



Realisasi subsidi pupuk terus meningkat dari 2012-2015 dari Rp13,9 triliun menjadi Rp31,3 triliun (naik 124%). Sempat turun di tahun 2016 menjadi Rp26,8 triliun (turun 14,25%) di tahun 2017 naik kembali sebesar Rp28,8 triliun.

Dampaknya produksi padi 2015-2017 meningkat.

### CATATAN KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK SAAT INI :

- Realisasi penyaluran berbeda dari apa yang diajukan RDCK dan salah sasaran;
- Disparitas yang tinggi antara harga subsidi dengan non subsidi memicu penyelewengan;
- Risiko fiskal terkait hutang pemerintah kepada produsen pupuk dan fluktuasi harga gas.

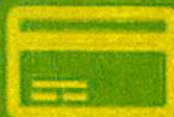
### ALTERNATIF KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK DI MASA DEPAN



Mengacu pada tema RKP 2019 yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan, kebijakan subsidi saat ini nampaknya belum menjawab tantangan tersebut. Untuk itulah pemerintah bersama DPR perlu mencermati opsi lain. Berikut adalah opsi kebijakan tersebut.

### BANTUAN LANGSUNG PUPUK NON TUNAI

Petani menerima bantuan langsung pupuk sesuai kuota dan harga pasar dengan kartu tani sebagai alat bayar. Produsen diberi subsidi input (gas). Apabila harga pupuk melonjak pemerintah melakukan rencana kontijensi.



SUMBER: BKF KEMENKEU



### PENGURANGAN SUBSIDI BERTAHAP

Subsidi dikurangi secara bertahap dan dicabut setelah 3 tahun atau setelah tahun ke 3 hanya disubsidi 20%. HPP gabah akan dinaikkan sebagai kompensasi. Diperkirakan dalam 5 tahun akan terjadi penghematan Rp84,99 - Rp99,28 triliun.

SUMBER:  
POKJA SUBSIDI PUPUK  
KEMENKO PEREKONOMIAN

### PENGALIHAN SUBSIDI KE PUPUK ORGANIK

Dengan harga murah, pupuk organik dapat membantu petani kecil untuk lebih berkembang, meski hasilnya tidak secepat pupuk kimia. Biaya subsidi juga dapat ditekan karena bahan baku pupuk organik tidak banyak bergantung pada impor.





**LAMPIRAN VII.II. (Upload ARC di Website Pusat Kajian Anggaran)**

Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 / Juli 2018

524

Prinsip-prinsip manajemen keuangan yang diterapkan perusahaan di atas masih kurang sejalan dengan kondisi riil. Tahun penuh dan faktor eksternal yang kurang mempengaruhi perkembangan perlu ditanyakan oleh pemerintah. Bagaimana upaya manajemen keuangan dalam rangka melindungi investasi dalam bentuk aset produktif yang lebih produktif.

### Kritik dan Saran

Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah / Juli 2013

2001.05

Peningkatan Kinerja Dan Taz Kekua Eksplor Dalam Rangka Mengantisipasi Tantangan Devisa Untuk Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

### Kritik dan Saran

Analisis Ringkas Cepat Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Petani / Agustus 2018

2004-2005

Mengetahui bahwa pemerintah telah dan sedang berupaya untuk mendorong produksi pangan dan pertanian, khususnya pertanian yang menghasilkan produk pangan yang bernilai tambah, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mendorong produksi pangan yang bernilai tambah.

### Kritik dan Saran

**LAMPIRAN VII.III. (Form Feedback)**

**SURVEI**  
**KEPUASAN LAYANAN ANALISIS RINGKAS CEPAT**  
**REVIEW PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI**  
**DALAM SIKLUS PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN 2019**  
**PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Fraksi : .....

Komisi/AKD : *Badan Anggaran*

No. Anggota : .....

Mohon pernyataan berikut ini dijawab dengan memberikan tanda silang (x) pada kategori yang dipilih.

SP = Sangat Puas

P = Puas

TP = Tidak Puas

STP = Sangat Tidak Puas

NO	PERTANYAAN	SP	P	TP	STP
<b>DUKUNGAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARC)</b>					
<b>A.</b>	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>				
1.	Dukungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam bentuk ARC telah memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.		X		
2.	Kemudahan mendapatkan layanan dukungan keahlian yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI.		X		
<b>B.</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>				
3.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian ARC kepada Anggota DPR RI.		X		
<b>C.</b>	<b>Produk dan Dukungan Badan Keahlian</b>				
4.	Kualitas substansi produk ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.		X		
5.	Kesesuaian produk dan dukungan ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan kebutuhan Anggota DPR RI.		X		
<b>D.</b>	<b>Kompetensi dan Perilaku SDM</b>				
6.	Kualitas SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		
7.	Keramahan dan kesopanan SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		





**SURVEI**  
**KEPUASAN LAYANAN ANALISIS RINGKAS CEPAT**  
**PENINGKATAN KINERJA DAN TATA KELOLA EKSPOR**  
**DALAM RANGKA MENINGKATKAN CADANGAN DEvisa**  
**UNTUK STABILISASI NILAI TukAR RUPIAH**  
**PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Fraksi : .....

Komisi/AKD : BANGGAL

No. Anggota : .....

Mohon pernyataan berikut ini dijawab dengan memberikan tanda silang (x) pada kategori yang dipilih.

SP = Sangat Puas

P = Puas

TP = Tidak Puas

STP = Sangat Tidak Puas

NO	PERTANYAAN	SP	P	TP	STP
<b>DUKUNGAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARC)</b>					
<b>A.</b>	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>				
1.	Dukungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam bentuk ARC telah memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.		X		
2.	Kemudahan mendapatkan layanan dukungan keahlian yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI.		X		
<b>B.</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>				
3.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian ARC kepada Anggota DPR RI.		X		
<b>C.</b>	<b>Produk dan Dukungan Badan Keahlian</b>				
4.	Kualitas substansi produk ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.		X		
5.	Kesesuaian produk dan dukungan ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan kebutuhan Anggota DPR RI.		X		
<b>D.</b>	<b>Kompetensi dan Perilaku SDM</b>				
6.	Kualitas SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		
7.	Keramahan dan kesopanan SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		



SURVEI  
KEPUASAN LAYANAN ANALISIS RINGKAS CEPAT  
ALTERNATIF KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKSI PANGAN DAN PEMERATAAN  
KESEJAHTERAAN PETANI  
PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Fraksi : .....

Komisi/AKD : *Banoba*

No. Anggota : .....

Mohon pernyataan berikut ini dijawab dengan memberikan tanda silang (x) pada kategori yang dipilih.

SP = Sangat Puas

P = Puas

TP = Tidak Puas

STP = Sangat Tidak Puas

NO	PERTANYAAN	SP	P	TP	STP
<b>DUKUNGAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARC)</b>					
<b>A.</b>	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>				
1.	Dukungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam bentuk ARC telah memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.		✓		
2.	Kemudahan mendapatkan layanan dukungan keahlian yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI.		✓		
<b>B.</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>				
3.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian ARC kepada Anggota DPR RI.		✓		
<b>C.</b>	<b>Produk dan Dukungan Badan Keahlian</b>				
4.	Kualitas substansi produk ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.		✓		
5.	Kesesuaian produk dan dukungan ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan kebutuhan Anggota DPR RI.		✓		
<b>D.</b>	<b>Kompetensi dan Perilaku SDM</b>				
6.	Kualitas SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		✓		
7.	Keramahan dan kesopanan SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		✓		

E.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan				
	8. Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPR RI terhadap produk dan dukungan keahlian yang diberikan.		/		

## SARAN

Apakah saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan kualitas layanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Team work antar bagian / yang berstnrgi  
dan Team supporting lainya

Jakarta, 2018

Surveyor: \_\_\_\_\_

Responden: \_\_\_\_\_



## **LAMPIRAN KEGIATAN VII**

### **(Siklus APBN Induk)**

---

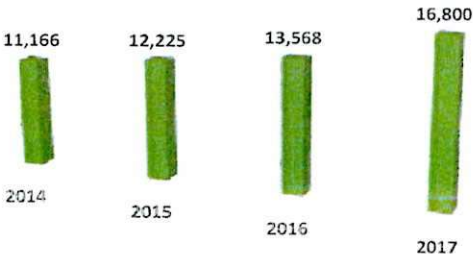
LAMPIRAN VII.I. (Analisis Final dan Infografis)

Fokus Pada Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Sumber Devisa

Dalam keadaan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD belakangan ini yang sempat menembus Rp14.800,00-Rp14.900,00, hal tersebut memaksa BI melakukan langkah stabilisasi dengan intervensi melalui Cadangan Devisa. Untuk menghadapi dinamika moneter, sebuah negara harus memiliki Cadangan Devisa yang besar agar nilai tukar mata uangnya terhadap USD stabil. Dalam kondisi perekonomian yang fluktuatif dan cukup sulit diprediksi seperti sekarang ini, RAPBN yang disusun pemerintah bersama DPR harus kredibel dan realistis untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi. Pemerintah harus fokus mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada sektor prioritas yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB), perolehan devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan DPR diharapkan dapat membahas, menyetujui dan melakukan kontrol pada RKA Kementerian/Lembaga sektor prioritas tersebut dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pariwisata. Data *balance of payment* (selisih ekspor-impor) sektor pariwisata yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam empat tahun terakhir menunjukkan surplus. Selain itu, kontribusi pariwisata terhadap devisa negara dari tahun 2014-2017 menunjukkan tren yang terus meningkat sebagai berikut :

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Devisa RI Tahun 2014-2017 (Miliar USD)



Sumber : Katadata (2018).

Secara peringkat, pendapatan devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2015 berada di urutan ke 4 sebagai penyumbang devisa terbesar pada 2015, di bawah migas, batu bara dan kelapa sawit. Kemudian pada tahun 2016, pariwisata berada di peringkat ke 2, dibawah sawit. Untuk menambah “pundi-pundi” devisa, tentunya pemerintah dhi Kemenpar harus fokus untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan rilis dari BPS, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia meningkat selama 5 tahun terakhir. Jumlah kunjungan wisman selama 2017 merupakan yang tertinggi dalam periode tersebut. Selama 2017 jumlah kunjungan wisman mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik 21,88 persen dibanding jumlah kunjungan selama 2016 yang tercatat 11,52 juta kunjungan. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2017 tersebut masih jauh dibawah target kinerja Kemenpar pada tahun 2017 sebesar 15 juta wisman.

Pemerintah sendiri pada tahun 2019 menargetkan kunjungan 20 juta wisman dan devisa sebesar Rp260 triliun. Namun, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja keras untuk memperbaiki daya saing. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand dari Indeks Daya Saing Pariwisata *World Economics Forum* (WEF) Tahun 2017 Indonesia



berada di peringkat 42 dunia. Capaian tersebut masih tertinggal jauh dari Singapura (13), Malaysia (26) dan Thailand (34). Aspek daya saing pariwisata yang harus mendapat perhatian untuk diperbaiki oleh pemerintah menurut WEF antara lain adalah : a) Keamanan, b) Higienitas, c) Implementasi Teknologi Informasi Komunikasi, d) Kelestarian lingkungan dan, e) infrastruktur untuk pelayanan kepada turis.

Dukungan kepada sektor pariwisata sebenarnya sudah cukup besar dalam bentuk alokasi anggaran yang terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Secara nominal sektor pariwisata mengalami pertumbuhan rata-rata 45,8 persen, yaitu dari Rp1,9 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp5,8 triliun dalam tahun 2017. Namun besaran anggaran yang terus meningkat tersebut tidak diikuti oleh efektivitas dalam menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan. BPK dalam LHP Pemeriksaan Kinerja Terhadap Atas Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015-Semester I 2016 menemukan permasalahan ketidakefektifan khususnya di pemasaran dan pengembangan destinasi untuk segmen wisman sebagai berikut :

- a. Koordinasi Lintas Sektoral Pengembangan Destinasi Pariwisata belum memadai;
- b. Perencanaan pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan destinasi yang berkelanjutan masih belum memadai;
- c. Belum terdapat koordinasi antara strategi pemasaran dengan implementasi promosi terkait penggunaan media ruang;
- d. Target dan capaian *branding* melalui media ruang dan festival belum ditetapkan sehingga kinerja promosi melalui *branding* Pesona Indonesia maupun *Wonderful Indonesia* tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Meskipun besaran dana yang telah dialokasikan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai target kunjungan wisatawan, opsi pengurangan anggaran untuk pariwisata khususnya anggaran pemasaran wisatawan mancanegara bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini. Simulasi regresi linier sederhana secara *time series* (2012-2016) oleh Sukirman (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kenaikan anggaran pariwisata dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jika pemerintah menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara, maka dibutuhkan kurang lebih anggaran pemasaran pariwisata mancanegara sebesar Rp6,093,5 triliun. Meskipun terdapat pengaruh positif akan tetapi alokasi anggaran pemasaran pariwisata tersebut tidak efektif jika pemerintah belum melakukan perbaikan pada implementasi kebijakan koordinasi lintas sektoral antara K/L/Daerah untuk membangun destinasi pariwisata yang memadai dan koordinasi untuk memperbaiki strategi pemasaran. Jika promosi pariwisata tidak diimbangi dengan pengembangan destinasi pariwisata, yang memadai tentu akan membuat wisatawan kecewa, dan enggan untuk kembali ke Indonesia.

Berikut adalah pertimbangan kebijakan yang ditempuh oleh DPR dalam mendorong proses penganggaran yang kredibel di sektor pariwisata dalam rangka memperkuat devisa :

- a. DPR mendorong Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan alokasi anggaran khususnya pada pemasaran pariwisata mancanegara dan pengembangan destinasi dan industri pariwisata. Namun, tetap harus ada mekanisme *check and balance* antar keduanya agar hasilnya optimal. Untuk pemasaran sebaiknya fokus pada negara dengan potensi *spending* dan *length of stay* wisman yang tinggi;
- b. DPR mendorong Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk dapat mengalokasikan anggaran infrastruktur pariwisata lebih besar dan;
- c. Mendorong Koordinasi Lintas Sektoral untuk menyelesaikan "10 Bali Baru".



# PARIWISATA SEBAGAI SUMBER DEVISA UTAMA

Pariwisata adalah salah satu sektor yang patut mendapat prioritas dalam rangka menyerap devisa untuk memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap USD. Devisa diperoleh dengan mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman).

#2

Pada tahun 2016, pariwisata berada di peringkat 2 sebagai penyumbang devisa RI dibawah CPO.

+4

*Balance of Payment* yang positif selama 4 tahun terakhir.

20JT

Pemerintah menargetkan 20 juta kunjungan wisman pada tahun 2019. Capaian pada tahun 2017 sebesar 14 juta.

Efektivitas pemasaran dan pengembangan pariwisata RI harus ditingkatkan. Hal yang harus mendapat perhatian :



Promosi dan Branding



Kesiapan Destinasi



Koordinasi antar K/L/Daerah

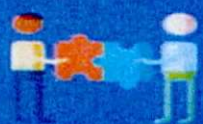
Rekomendasi untuk DPR :



Mendorong kenaikan alokasi anggaran untuk pemasaran dan pengembangan destinasi pariwisata. Namun, harus ada *check and balances* antara keduanya.



Mendorong Menkeu dan Menbappenas untuk menyediakan alokasi anggaran infrastruktur pariwisata yang lebih besar.



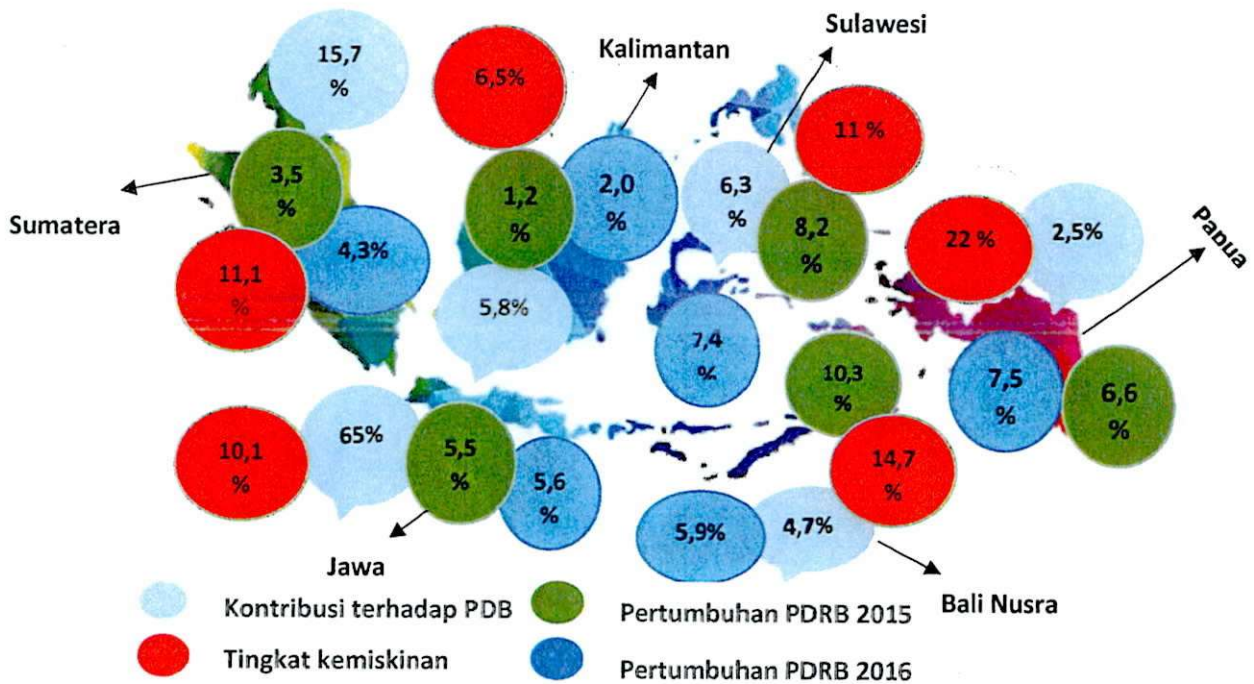
Mendorong Koordinasi Lintas Sektoral untuk menyelesaikan "10 Bali Baru".



## Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas

Pada RAPBN 2019, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Pertumbuhan tersebut salah satunya ditopang oleh Belanja Pemerintah. Dari 5 komponen pertumbuhan di RAPBN 2019 yaitu Belanja Rumah Tangga, Belanja Pemerintah, Ekspor, Impor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi Fisik, kontribusi Belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan pada tahun 2019 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,4%. Untuk melihat prospek kontribusi Belanja Pemerintah tersebut, perlu dilihat bagaimana efektivitas kebijakan Transfer ke Daerah (DAU, DAK dan DBH), sejauh ini dalam APBN untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, menekan angka kemiskinan dan membangun perekonomian daerah yang kompetitif. Secara umum, besaran Transfer ke Daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 transfer ke daerah sebesar Rp573,7 triliun, kemudian pada 2018 naik sebesar 22,6% menjadi Rp703,6 triliun. Untuk RAPBN 2019 direncanakan sebesar Rp759,3 triliun. Sedangkan gambaran mengenai kondisi perekonomian antar daerah dapat dilihat dalam infografis berikut ini :

### INFOGRAFIS DISPARITAS ANTAR DAERAH 2015-2016



Sumber : Kementerian Keuangan RI 2017 (diolah)

Dari infografis di atas dapat terlihat bagaimana timpangnya kontribusi daerah terhadap PDB Indonesia tahun 2015-2016, dimana **Pulau Jawa mendominasi PDB nasional sebesar 65%** dibandingkan dengan daerah lain. Tingkat kemiskinan daerah juga masih cukup tinggi terutama di wilayah Papua yaitu sebesar 22%. Hal yang perlu mendapat apresiasi adalah terdapat pertumbuhan PDRB year on year (yoy) di masing-masing daerah. Melalui gambaran singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa **sementara ini pemanfaatan belanja pemerintah dalam bentuk transfer ke daerah tersebut belum efektif menanggulangi kemiskinan, kesenjangan fiskal, dan membangun ekonomi regional yang kompetitif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena quality**



**spending yang belum produktif.** Daerah lebih menggunakan dana tersebut untuk belanja rutin dan administrasi dibanding belanja yang produktif seperti Belanja Modal.

Secara lebih rinci, berikut beberapa faktor yang menyebabkan inefektifitas pada kebijakan transfer ke daerah tersebut yaitu :

- a. Ketidakpatuhan daerah terhadap porsi anggaran belanja tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2017 menyatakan minimal 20 persen penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan infrastruktur/Belanja Modal belum dipenuhi oleh 302 daerah ;
- b. Kapasitas birokrat di daerah yang belum memadai untuk merealisasikan dana transfer tersebut sehingga terdapat dana transfer pemerintah pusat yang mengendap di deposito bank. Hal tersebut sebetulnya juga tidak lepas dari kekhawatiran pejabat berurusan dengan hukum sehingga memilih “main aman” dengan mendepositokannya ke Bank;
- c. Adanya permasalahan dalam pertanggungjawaban belanja daerah yang dibiayai dari Dana Transfer Pemerintah Pusat . Belanja daerah ini biasanya termasuk dalam kelompok Belanja Modal (proyek infrastruktur) yang biasanya dibiayai dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Permasalahan ini kerap menjadi temuan BPK dan menyebabkan kerugian negara.

Terkait porsi atau rasio belanja, berdasarkan data terkini dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), rata-rata rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah dalam APBD terus menurun selama 3 tahun terakhir dari 40,1% di 2014 menjadi 33,5% di 2017. Sebaliknya, untuk rasio Belanja Modal terhadap total belanja dalam APBD rasionya fluktuatif namun di tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 3,9% dari tahun 2016. **Pada tahun 2017 rasio Belanja Modal mencapai 25,9%, namun, pencapaian tersebut masih dibawah target nasional dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 30%.** Masih rendahnya rasio Belanja Modal terhadap total belanja dalam APBD ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal Belanja Modal ini mempunyai *multiplier effect* pada investasi yang akan masuk ke daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun faktanya, pemerintah daerah masih terjebak dalam pola pikir lama yang cenderung main aman, hal tersebut tentu berimbas kepada pembangunan yang stagnan di daerah tersebut.

Pemerintah pusat saat ini telah bertindak untuk mendisiplinkan perilaku pemerintah daerah tersebut dimana untuk DAU yang sebelumnya bebas digunakan untuk belanja apa saja oleh pemerintah daerah, kini 25% dari DAU tersebut wajib digunakan untuk Belanja Modal/infrastruktur. Namun, perlu langkah konkrit yang lebih jauh lagi untuk dapat mengubah pola pikir pemerintah daerah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah bersama DPR untuk mengubah pola pikir pemerintah daerah sehingga realisasi Belanja Modal diharapkan akan meningkat dan berkualitas :

- a. DPR perlu mendorong Kemenkeu untuk membuat skema *reward* dan *punishment* yang tepat untuk memacu daerah agar dana transfer yang diterima dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas;
- b. DPR perlu mendorong pemerintah pusat untuk mengedukasi pemerintah daerah tentang juklak dan juknis yang mudah dilaksanakan dan tidak berubah-ubah sehingga realisasi Belanja Modal optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perlu adanya pemetaan terhadap daerah-daerah yang pemanfaatan dana transfer untuk Belanja Modalnya rendah atau bermasalah untuk diberikan pendampingan dan dimonitor secara rutin bersama-sama oleh DPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.



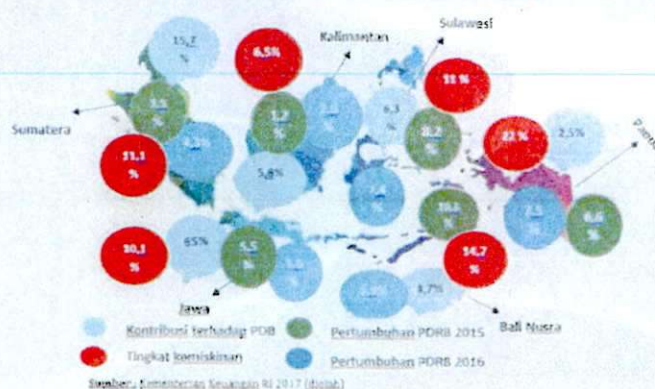
# OPTIMALISASI TRANSFER KE DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

## OVERVIEW



Anggaran yang dialokasikan untuk transfer ke daerah terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014 transfer ke daerah sebesar Rp573,7 triliun, kemudian pada 2018 naik sebesar 22,6% menjadi Rp703,6 triliun (tidak termasuk Dana Desa). Untuk RAPBN 2019 alokasi direncanakan sebesar Rp759,3 triliun. Lantas, bagaimana kemajuan yang dicapai daerah ?

INFOGRAFIS DISPARITAS ANTAR DAERAH 2015-2016



Pulau Jawa masih mendominasi PDB Nasional (65%). Tingkat kemiskinan masih tinggi di wilayah Indonesia Timur khususnya Papua.

## QUALITY SPENDING



Masalah tidak melulu pada kurangnya dana, tetapi bagaimana realisasi belanjanya. Besaran dana transfer yang mengucur ke daerah tidak diikuti dengan rasio Belanja Modal yang ideal terhadap APBD. RPJMN 2015-2019 menargetkan secara nasional Belanja Modal 30% dari APBD.

Belanja Modal (infrastruktur) mempunyai multiplier effect pada investasi yang akan masuk ke daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

DPR perlu mendorong Kemenkeu untuk membuat skema reward dan punishment yang tepat untuk memacu daerah agar dana transfer yang diterima dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas.

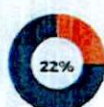
## RASIO BELANJA MODAL PEMDA\*



22.6%



22.8%



22%



25.9%

Ket\*: Rata-rata rasio Belanja Modal Pemda se Indonesia  
Sumber: DJPK (2018).

## Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel

Dalam rapat antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran pada tanggal 4 September 2018, Kementerian Keuangan mengajukan RAPBN 2019 di sektor kesehatan sebesar **Rp121,9 triliun** yang terdiri dari **Rp88,2 triliun** yang berasal dari **Belanja Pusat** dan **Rp33,7 triliun Transfer Daerah**. Khusus untuk Belanja Pusat, **anggaran untuk Kemenkes diajukan sebesar Rp58,7 triliun**. Jika anggaran tersebut disetujui, maka anggaran untuk Kemenkes meningkat sebesar 28% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp45,9 triliun. Salah satu pos yang harus mendapat perhatian adalah pada **Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** yang masuk dalam program strategis RPJMN 2015-2019. Apabila mengkaji kinerja Kemenkes di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, diperoleh data sebagai berikut :

**Gambar 1. Target Indikator Kinerja Ditjen P2P yang terkait dengan RPJMN 2015-2019**

Indikator	2015		2016		2017		2018		2019	KET
	Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian*)	Target	
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	280	263	271	257	262	254	254	Data tahunan	245	
2. Prevalensi HIV (persen)	<0,5	0,33	<0,5	0,33	<0,5	0,33	<0,5	Data tahunan	<0,5	
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	21	21	23	23	25	24	26	24	34	
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	225	232	245	247	265	266	285	272	300	
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis	9	17	12	22	15	28	24	29	35	
6. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,28	NA	24,77	32,4	24,28	32,4	23,79	Data survei	23,38	
7. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4	NA	15,4	20,7	15,4	20,7	15,4	Data survei	15,4	
8. Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun	6,9	NA	6,4	8,8	5,9	8,8	5,6	Data survei	5,4	
9. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	75	66	80	80,7	85	85,4	90	Data tahunan	95	

**Sumber:** Bahan Paparan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (2018)

Gambar 1 menunjukkan 9 indikator Ditjen P2P yang juga merupakan indikator pada RPJMN 2015-2019. Terlihat bahwa 3 indikator kinerja Ditjen P2P masih belum tercapai selama 2016-2017. Ketiga indikator tersebut adalah 1)Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (persen), 2)Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ tahun (persen), dan 3)Prevalensi merokok penduduk usia kurang dari sama dengan 18 tahun.

Pada indikator prevalensi tekanan darah tinggi diketahui bahwa prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2016 dan 2017 masih jauh dibawah target kinerja (semakin kecil persentasenya semakin bagus). **Pada tahun 2016 target kinerja prevalensi tekanan darah tinggi adalah sebesar 24,77 persen, sementara capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar 32,4 persen.** Pada tahun 2017 target prevalensi tekanan darah tinggi direncanakan untuk turun hingga 24,28 persen, namun capaian kinerja tahun 2017 tetap pada angka 32,4 persen.

Serupa dengan prevalensi darah tinggi, prevalensi obesitas pada usia 18 tahun keatas dan prevalensi merokok penduduk usia kurang dari sama dengan 18 tahun masih jauh dibawah target kinerja. **Pada tahun 2016 dan 2017 prevalensi obesitas pada usia 18 tahun keatas tetap statis pada angka 20,7 persen, sementara target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017 adalah 15,4 persen.** Prevalensi



**merokok juga menunjukkan tren angka prevalensi yang statis selama 2016 dan 2017 yaitu sebesar 8,8, padahal target yang ditetapkan adalah 6,4 pada 2016 dan 5,9 pada 2017.**

Apabila pencegahan dan pengendalian tidak dilakukan secara maksimal, maka akan berdampak sistemik pada biaya pengobatan. Program Jaminan Kesehatan Negara (JKN) yang diorganisir BPJS yang defisit selama 3 tahun terakhir tidak lepas dari kurang optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit. Anggaran untuk BPJS 30% habis untuk pengobatan katastrofik seperti jantung, gagal ginjal, kanker dan stroke. **Penyakit tersebut sebagian besar muncul dari kebiasaan merokok, obesitas dan tekanan darah tinggi.** Selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS selalu negatif. Pada tahun 2014 defisit anggaran perusahaan publik itu mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016. Pada akhir 2018, BPJS Kesehatan diperkirakan akan menanggung defisit anggaran sebesar Rp16 triliun. Dampaknya adalah BPJS terpaksa menunggak biaya operasional rumah sakit seperti dokter, obat-obatan dan lain-lain. Penyertaan penyakit katastrofik ke dalam penyakit yang ditanggung JKN memang baik, akan tetapi pemerintah harus waspada apabila jumlah pengidap penyakit tersebut lebih besar daripada pendapatan BPJS. Hal tersebut akan berpengaruh sistemik kepada kualitas hidup rakyat Indonesia dan menghambat pembangunan.

Sebagai langkah perbaikan kedepannya, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh DPR bersama pemerintah :

- DPR perlu mempertimbangkan kenaikan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tetapi juga mendorong efektivitas implementasinya;
- DPR perlu mengkaji opsi *cost sharing* atau berbagi biaya antara BPJS Kesehatan dengan industri rokok atau BPJS tidak mengcover sepenuhnya biaya pengobatan penyakit katastrofik tersebut.



## PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

### PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT UNTUK MEMPERKUAT KUALITAS ANGGARAN KESEHATAN

#### CATATAN KINERJA PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT DITJEN P2P KEMENKES TA 2017\* :



Prevalensi merokok  
dibawah usia 18 tahun:  
Target 2017 : 5,9%  
Capaian 2017 : 8,8%



Prevalensi obesitas  
belum mencapai target:  
Target 2017 : 15,4%  
Capaian 2017 : 20,7%



Prevalensi hipertensi  
belum mencapai target:  
Target 2017 : 24,28%  
Capaian 2017 : 32,24%

Sumber : Ditjen P2P Kemenkes (2018)

Ket\* : Semakin kecil persentase semakin bagus.

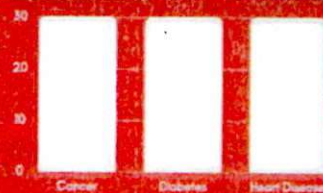


Merokok, obesitas dan hipertensi menjadi  
pemicu penyakit katastrofik seperti  
Diabetes, Jantung, Stroke dan Kanker.



Klagaas Aulansyah/detik.com

Penyakit katastrofik  
berkontribusi pada Defisit  
BPJS. Pendapatan BPJS minus  
dibanding pasien penyakit  
katastrofik yang ditanggung.



Anggaran BPJS 30% habis  
untuk pengobatan penyakit  
katastrofik.



Defisit BPJS terus meningkat  
dari tahun ke tahun.

#### SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN



DPR perlu  
mempertimbangkan  
kenaikan anggaran  
untuk pencegahan dan  
pengendalian  
penyakit



Opsi cost sharing  
/berbagi biaya BPJS  
dengan industri rokok  
(Rokok merupakan  
kontributor penyakit  
katastrofik)



BPJS tidak mengcover  
sepenuhnya biaya  
pengobatan penyakit  
katastrofik tersebut  
(sebagian ditanggung  
pasien)



Kualitas hidup rakyat suatu negara dapat  
dilihat dari seberapa besar jumlah  
penduduk yang sehat. Semakin banyak  
yang sehat maka akan berdampak positif  
terhadap pembangunan. Pencegahan dan  
pengendalian penyakit yang optimal akan  
merubah perilaku masyarakat dalam  
menjaga kesehatannya.



## Analisis PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia

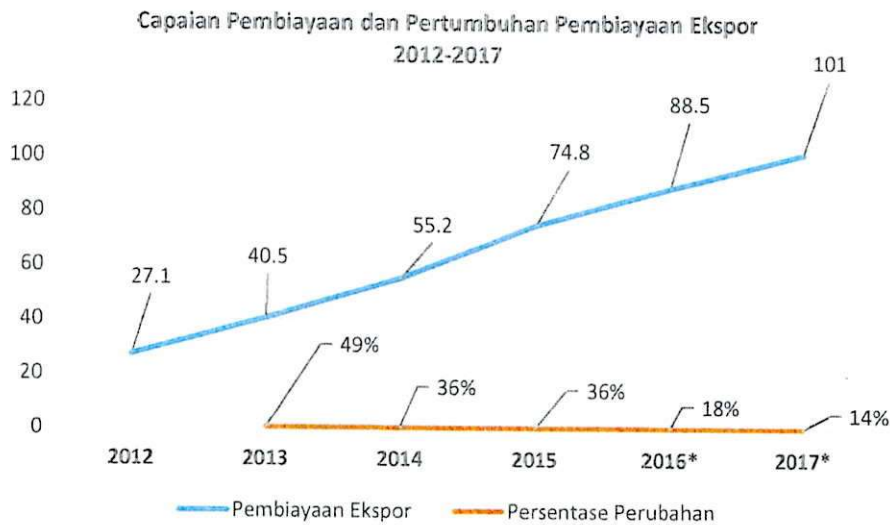
Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan proses pemisahan aset negara menjadi modal di perusahaan baik BUMN, BUMS, perusahaan asing, ataupun perusahaan milik lembaga internasional. PMN dapat berupa tunai atau hak negara yang dinilai dengan uang. PMN diharapkan mampu memberikan *multiplier effect*, tanpa menghabiskan biaya yang besar. Hal ini terjadi karena proses pemberian PMN adalah proses pemisahan aset negara untuk dikelola BUMN, tanpa melepas aset negara tersebut. Dalam Rapat Banggar Panja Pembiayaan dan Defisit pada tanggal 20 September 2018, telah disepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT. PLN (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) pada pagu anggaran tahun 2019. Masing-masing sebesar Rp6,5 triliun untuk PLN dan 10 triliun untuk Hutama Karya. PMN tersebut diperuntukkan untuk pengembangan kapasitas bisnis BUMN tersebut yaitu untuk program pembangunan listrik desa (PLN) dan menyelesaikan target pembangunan lima ruas tol Trans Sumatera agar selesai di tahun 2019 (Hutama Karya).

Tujuan PMN pada 2 BUMN tersebut memang *on track* dengan Nawacita pemerintahan yang fokus pada infrastruktur dan konektivitas serta peningkatan kapasitas produksi. Namun, DPR dan juga pemerintah juga harus memperhatikan defisit pada neraca transaksi berjalan. Akibat dari defisit neraca transaksi berjalan tersebut menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap USD semakin melemah hingga menembus kisaran Rp14.800/USD-Rp14.900/USD. Untuk menguatkan kembali nilai tukar perlu ada upaya peningkatan ekspor dan pengendalian impor secara besar-besaran. Ketika ekspor meningkat, maka keuntungan ekspor dalam bentuk valas akan menambah persediaan valas dalam negeri akan bertambah sehingga nilai tukar Rupiah terhadap USD akan menguat.

LPEI sebagai lembaga yang sepenuhnya dimiliki pemerintah yang mempunyai mandat untuk menyediakan pembiayaan dalam rangka mendorong ekspor nasional perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk PMN. Pada rapat antara Kementerian Keuangan dengan Banggar pada tanggal 4 September 2018, Kementerian Keuangan mengajukan permohonan PMN kepada LPEI sebesar Rp2,5 triliun untuk mendorong peningkatan ekspor dan kinerja pemodal serta melaksanakan penugasan khusus. Alokasi penambahan PMN kepada LPEI untuk peningkatan kapasitas bisnis dialokasikan sebesar Rp1,5 triliun sedangkan untuk penugasan khusus sebesar Rp 1 triliun. Penugasan khusus diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.08/2017 dimana Menteri Keuangan telah mengeluarkan tiga Keputusan Menteri tentang penugasan khusus ekspor.

LPEI jika dibandingkan dengan bank pada umumnya lebih memiliki ruang gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi *supply* (dalam negeri) dan di sisi *demand* (luar negeri). Pembiayaan dapat diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Terkait persetujuan pemberian PMN sendiri, tentu harus ada kajian yang komprehensif tentang kinerja entitas yang bersangkutan setelah diberikan PMN tersebut. Untuk kasus LPEI, dana dari PMN tersebut dimaksudkan agar eksportir bisa menikmati tingkat suku bunga yang kompetitif dan meningkatkan *outstanding* pembiayaan kepada eksportir selain melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah. Dengan tingkat suku bunga yang kompetitif akan menjadi stimulus munculnya eksportir-eksportir khususnya dari sektor UMKM yang akan menyumbang devisa dan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Secara lebih rinci, Beberapa capaian yang mampu dihasilkan dari penambahan PMN kepada LPEI di antaranya peningkatan kinerja pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor, penyediaan suku bunga pembiayaan ekspor yang kompetitif kepada eksportir, dan peningkatan peluang penetrasi ekspor ke negara-negara non tradisional. Berikut adalah perkembangan PMN yang didapat LPEI beserta kinerja yang dicapai (terutama penyaluran pembiayaan ekspor) selama 5 tahun terakhir :



**Sumber :** LPEI dan Nota Keuangan RAPBN 2019

**Ket : \*)** Tahun 2016 dan 2017 LPEI mendapat PMN 2015 dan 2016 sebesar Rp 1 triliun dan 4 triliun.

Selama 5 tahun (2012-2017), LPEI selalu mengalami pertumbuhan dari sisi nominal pembiayaan ekspor. Namun, apabila dilihat dari persentase pertumbuhan *year on year* (YoY) justru malah menurun dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2013 sebesar 49% menurun menjadi 36% di tahun 2014 dan 2015. Setelah disuntik PMN pada tahun 2015 dan 2016, pertumbuhan pembiayaan turun menjadi 18% (2016) dan 14% (2017). Berdasarkan uraian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa suntikan PMN belum menjadi faktor pendorong kapasitas bisnis LPEI. Justru setelah diberikan PMN, pertumbuhannya menurun. Namun, apabila melihat kebutuhan negara untuk meningkatkan kinerja ekspor, maka **jumlah yang diajukan oleh pemerintah dapat dipertimbangkan oleh DPR untuk disetujui.**

Disamping itu, DPR juga harus mendorong LPEI untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik dalam proses bisnis mereka. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap LPEI Tahun 2014 dan Tahun 2015, BPK memberi catatan penting untuk menjadi perhatian LPEI :

- a. LPEI **belum sepenuhnya melaksanakan mandat dalam mendukung Program Ekspor Nasional** melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (Banyak pemberian pinjaman yang tidak tepat sasaran);
- b. LPEI **tidak segera menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan akumulasi cadangan LPEI;
- c. **Belum ada kejelasan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana eks Program Kemitraan PT BEI (Persero)** yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang LPEI;
- d. LPEI **belum memiliki mekanisme pengawasan pembiayaan melalui skema two step loan kepada end user** dan definisi UMKM menurut LPEI tidak selaras dengan definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. **Besaran tarif premi Asuransi Proteksi Piutang Dagang belum mengakomodasi tarif premi dari perusahaan reasuransi** dan besaran tarif premi Asuransi Marine Cargo dan No Claim Bonus yang diberikan belum diatur dalam peraturan internal LPEI; dan
- f. **Pemberian rating dua debitur LPEI tidak sesuai dengan Manual IEB Credit Rating System** dan prinsip kehati-hatian;
- g. LPEI **belum sepenuhnya menerapkan Risk Assesment** yang memadai dalam penetapan tingkat suku bunga Pembiayaan;
- h. **Pengikatan dan penilaian agunan** terkait pembiayaan yang diberikan oleh LPEI **belum sepenuhnya sesuai ketentuan.**





# Analisis PMN LPEI Pada RAPBN 2019

## Overview

Dalam rapat antara Kemenkeu dengan Banggar 4 September 2018, Kemenkeu mengajukan usulan PMN pada RAPBN 2019 untuk Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI)/Eximbank sebesar Rp2,5 triliun yang terdiri dimana Rp1,5 triliun untuk peningkatan kapasitas/kinerja bisnis dan Rp 1 triliun untuk melaksanakan penugasan khusus:

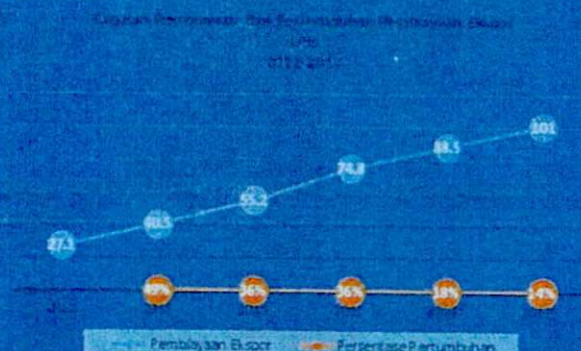


Penugasan Khusus  
40%



## Analisis Deskriptif

Capaian Pembiayaan Ekspor LPEI 2012-2017  
(Triliun Rupiah)



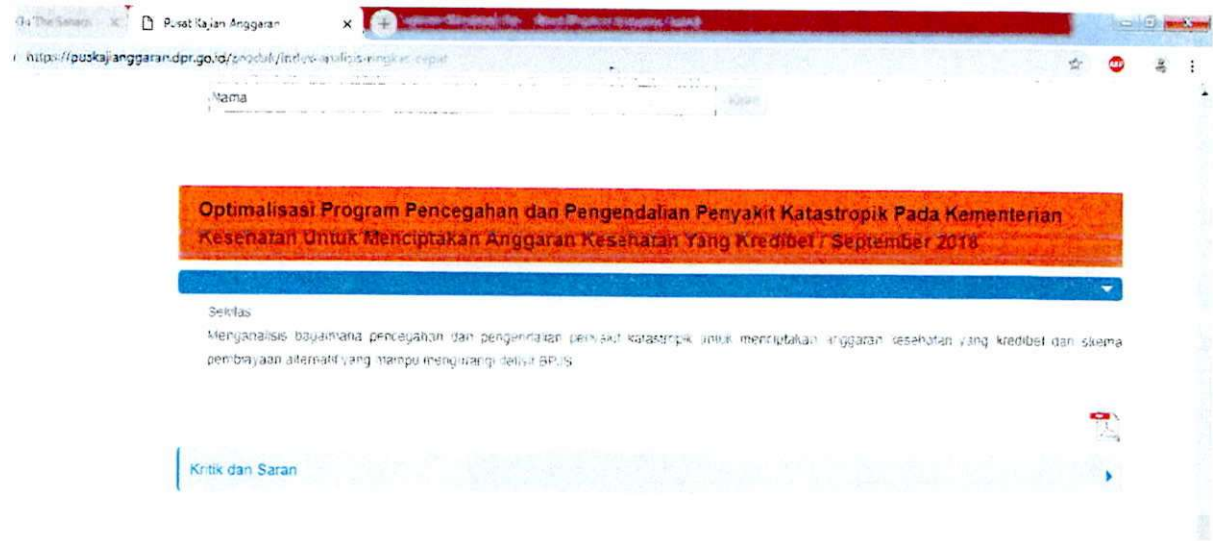
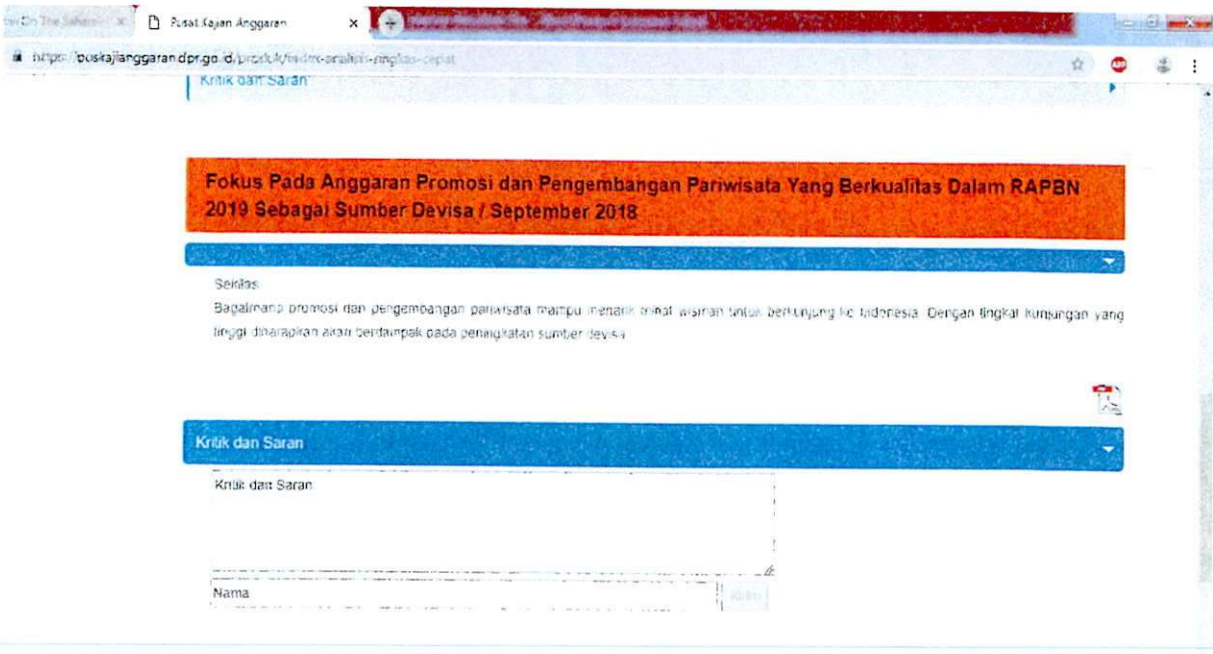
Selama 5 tahun (2012-2017), LPEI selalu mengalami pertumbuhan dari sisi nominal pembiayaan ekspor dari Rp 27,1 triliun (2012) menjadi Rp101 triliun (2017). Namun, apabila dilihat dari persentase pertumbuhan year on year (YoY) justru malah menurun dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2013 sebesar 49% menurun menjadi 36 % di tahun 2014 dan 2015. Setelah disuntik PMN pada tahun 2015 dan 2016, pertumbuhan pembiayaan justru turun menjadi 18% (2016) kemudian 14% (2017).

Suntikan PMN belum menjadi faktor pendorong peningkatan kapasitas bisnis LPEI. Justru setelah diberikan PMN, pertumbuhannya menurun. Namun, apabila melihat kebutuhan negara untuk meningkatkan kinerja ekspor, maka jumlah yang diajukan oleh pemerintah dapat dipertimbangkan oleh DPR untuk disetujui.

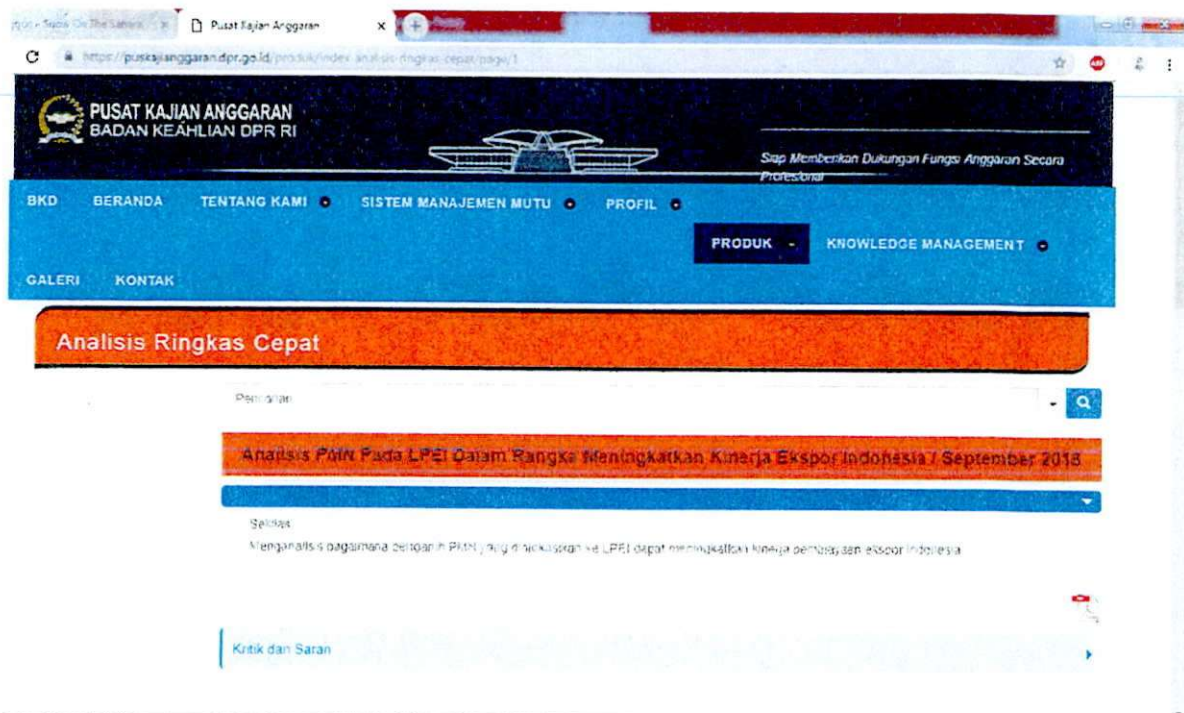
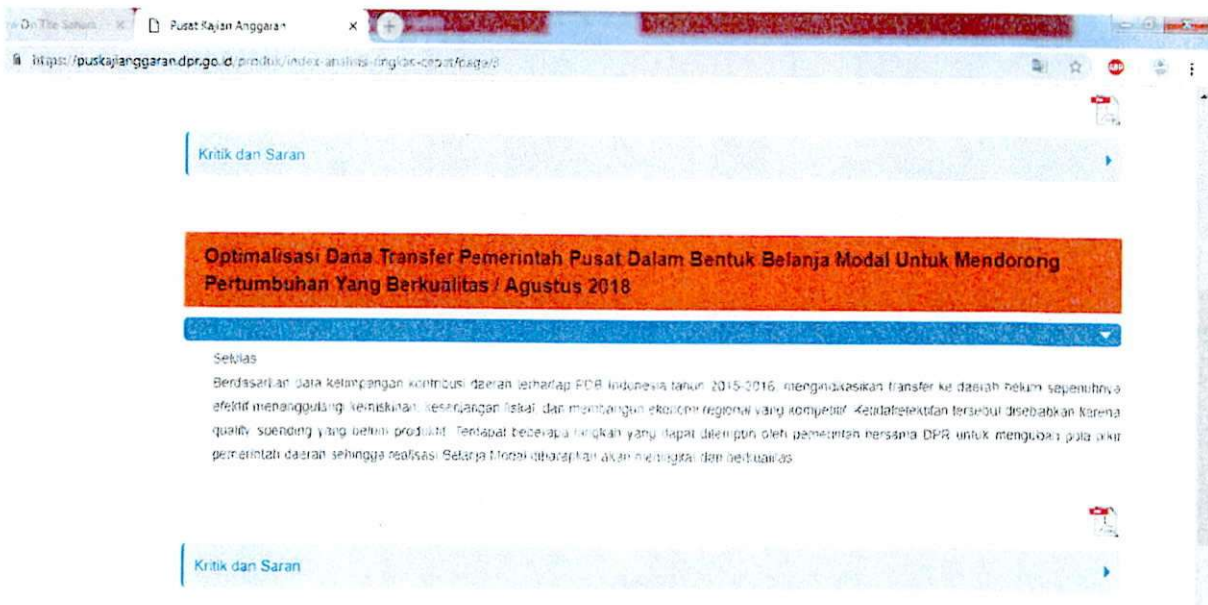
LPEI juga harus memperhatikan tata kelola proses bisnis mereka dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2014 dan Tahun 2015.



LAMPIRAN VII.II. (Upload ARC di Website Pusat Kajian Anggaran)







LAMPIRAN VII.III. (Form Feedback)



PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

EVALUASI HASIL ANALISIS

Judul Analisis : Cipta dan. 80% Baru Tanya

Nama : Taufiq Ahmad

Posisi/Jabatan ☐ Anggota DPR RI  
☒ Tenaga Ahli  
☐ Sekretariat Badan Anggaran

Evaluasi :

- 1. Bagaimana kesesuaian tema analisis / referensi terhadap kebutuhan Badan Anggaran ?  
Tema Analisis kebutuhan -tanya baru perbaikan  
judul "Tanya ke Daerah"
- 2. Bagaimana kesesuaian waktu pemberian analisis / referensi ?  
periode analisis sesuai dgn kebutuhan. namun  
waktu pemberian perlu diperbaiki pada saat  
hari "H" pengisian
- 3. Bagaimana kesesuaian substansi analisis / referensi terhadap kebutuhan Badan Anggaran ?  
Cukup sesuai hanya saja perlu penyesuaian pada  
(1) alokasi dana transfer per daerah dgn kebutuhan  
ekonomi tiap daerah "Causality"  
(2) alokasi. Dana transfer daerah per daerah tdk  
perencanaan Kementerian
- 4. Bagaimana kesesuaian jumlah halaman dan tampilan visual analisis / referensi terhadap kebutuhan Badan Anggaran ?  
(1) Visual kurang menarik perlu perbaikan dgn  
peta "tanya ke"  
(2) pakai "Chart" yg lebih simple dan cepat
- 5. Berikan saran agar penulisan analisis / referensi memenuhi kebutuhan Badan Anggaran.  
(1) analisis sektoral ekonomi atau pvt  
(2) analisis transfer dana dari s.d. "policy"  
(3) perlu justifikasi. Causality "independent variabel"



4. analisis lebih mendalam tgz "D/D" untuk  
rekanal rewards & punishment

7 transfer ke dalam perlu diperhal analisis  
mis DAU, OAK, DBIT, Bone best, dan

TERIMA KASIH

**SURVEI**  
**KEPUASAN LAYANAN ANALISIS RINGKAS CEPAT**  
**FOKUS PADA ANGGARAN PROMOSI DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA**  
**YANG BERKUALITAS DALAM RAPBN 2019 SEBAGAI SUMBER DEVISA**  
**PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Fraksi : .....

Komisi/AKD : BAKN DPR RI

Mohon pernyataan berikut ini dijawab dengan memberikan tanda silang (x) pada kategori yang dipilih.

SP = Sangat Puas

P = Puas

TP = Tidak Puas

STP = Sangat Tidak Puas

NO	PERTANYAAN	SP	P	TP	STP
<b>DUKUNGAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARC)</b>					
<b>A.</b>	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>				
1.	Dukungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam bentuk ARC telah memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.		X		
2.	Kemudahan mendapatkan layanan dukungan keahlian yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI.		X		
<b>B.</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>				
3.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian ARC kepada Anggota DPR RI.		X		
<b>C.</b>	<b>Produk dan Dukungan Badan Keahlian</b>				
4.	Kualitas substansi produk ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.		X		
5.	Kesesuaian produk dan dukungan ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan kebutuhan Anggota DPR RI.		X		
<b>D.</b>	<b>Kompetensi dan Perilaku SDM</b>				
6.	Kualitas SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		
7.	Keramahan dan kesopanan SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		





**SURVEI**  
**KEPUASAN LAYANAN ANALISIS RINGKAS CEPAT**  
**OPTIMALISASI DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**  
**DALAM BENTUK BELANJA MODAL UNTUK**  
**MENDORONG PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS**  
**PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Fraksi : .....

Komisi/AKD : BAKN DPR RI

Mohon pernyataan berikut ini dijawab dengan memberikan tanda silang (x) pada kategori yang dipilih.

SP = Sangat Puas

P = Puas

TP = Tidak Puas

STP = Sangat Tidak Puas

NO	PERTANYAAN	SP	P	TP	STP
<b>DUKUNGAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARC)</b>					
<b>A.</b>	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>				
1.	Dukungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam bentuk ARC telah memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.		X		
2.	Kemudahan mendapatkan layanan dukungan keahlian yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI.		X		
<b>B.</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>				
3.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian ARC kepada Anggota DPR RI.		X		
<b>C.</b>	<b>Produk dan Dukungan Badan Keahlian</b>				
4.	Kualitas substansi produk ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.		X		
5.	Kesesuaian produk dan dukungan ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan kebutuhan Anggota DPR RI.		X		
<b>D.</b>	<b>Kompetensi dan Perilaku SDM</b>				
6.	Kualitas SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		
7.	Keramahan dan kesopanan SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		



E.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan						
	8.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPR RI terhadap produk dan dukungan keahlian yang diberikan.				X	

SARAN

Apakah saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan kualitas layanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI  
perlu peningkatan kapasitas dan model reporting yang lebih tajam dan mendalam untuk topik khusus, sehingga  
nantinya dapat digunakan sebagai bahan yang lebih  
komprehensif.

Jakarta, 27 September 2018

Surveyor: \_\_\_\_\_

Responden: Warijan, SE, ME

**SURVEI**  
**KEPUASAN LAYANAN ANALISIS RINGKAS CEPAT**  
**OPTIMALISASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KATASTROFIK**  
**PADA KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK MENCIPTAKAN**  
**ANGGARAN KESEHATAN YANG KREDIBEL**  
**PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Fraksi : .....

Komisi/AKD : BAKN DPR RI

Mohon pernyataan berikut ini dijawab dengan memberikan tanda silang (x) pada kategori yang dipilih.

SP = Sangat Puas

P = Puas

TP = Tidak Puas

STP= Sangat Tidak Puas

NO	PERTANYAAN	SP	P	TP	STP
<b>DUKUNGAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARC)</b>					
<b>A.</b>	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>				
1.	Dukungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam bentuk ARC telah memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.		X		
2.	Kemudahan mendapatkan layanan dukungan keahlian yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI.		X		
<b>B.</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>				
3.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian ARC kepada Anggota DPR RI.		X		
<b>C.</b>	<b>Produk dan Dukungan Badan Keahlian</b>				
4.	Kualitas substansi produk ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.		X		
5.	Kesesuaian produk dan dukungan ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan kebutuhan Anggota DPR RI.		X		
<b>D.</b>	<b>Kompetensi dan Perilaku SDM</b>				
6.	Kualitas SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		
7.	Keramahan dan kesopanan SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		



E.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan					
	8.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPR RI terhadap produk dan dukungan keahlian yang diberikan.		X		

SARAN

Apakah saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan kualitas layanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Format laporan perlu di standsarisasi agar lebih mudah baca dan elegan. Selain itu analisis dan paparan yang lebih tajam di perlukan.

Jakarta, 27 September 2018

Surveyor: \_\_\_\_\_

Responden: Warijan, SE, ME

**SURVEI**  
**KEPUASAN LAYANAN ANALISIS RINGKAS CEPAT**  
**ANALISIS PMN PADA LPEI**  
**DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR INDONESIA**  
**PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Fraksi : .....

Komisi/AKD : BAKN DPR RI

Mohon pernyataan berikut ini dijawab dengan memberikan tanda silang (x) pada kategori yang dipilih.

SP = Sangat Puas

P = Puas

TP = Tidak Puas

STP = Sangat Tidak Puas

NO	PERTANYAAN	SP	P	TP	STP
<b>DUKUNGAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARC)</b>					
<b>A.</b>	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>				
1.	Dukungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam bentuk ARC telah memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.		X		
2.	Kemudahan mendapatkan layanan dukungan keahlian yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI.		X		
<b>B.</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>				
3.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian ARC kepada Anggota DPR RI.		X		
<b>C.</b>	<b>Produk dan Dukungan Badan Keahlian</b>				
4.	Kualitas substansi produk ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.		X		
5.	Kesesuaian produk dan dukungan ARC yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan kebutuhan Anggota DPR RI.		X		
<b>D.</b>	<b>Kompetensi dan Perilaku SDM</b>				
6.	Kualitas SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		
7.	Keramahan dan kesopanan SDM Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.		X		



E.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan					
	8.	Kecepatan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPR RI terhadap produk dan dukungan keahlian yang diberikan.		X		

## SARAN

Apakah saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan kualitas layanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Standar laporan dan paparan diperlukan agar lebih baik dan mudah dalam menggunakan hasil laporan ini.

Jakarta, 27 September 2018

Surveyor: \_\_\_\_\_

Responden: Warijan, SE, ME

## LEMBAR TESTIMONI

Nama : Eko Adityo Ananto, S.E.  
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/198808102018031001  
Judul Kegiatan Aktualisasi : OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT SIKLUS PEMBICARAAN  
PENDAHULUAN R-APBN 2019 DAN SIKLUS APBN INDUK 2019

Testimoni:

APC yang dibuat oleh Saudara Eko Adityo Ananto  
sangat bagus untuk menambah informasi bagi Anggota  
Dewan.



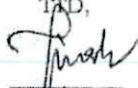


## LEMBAR TESTIMONI

Nama : Eko Adityo Ananto, S.E.  
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/198808102018031001  
Judul Kegiatan Aktualisasi : OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT SIKLUS PEMBICARAAN  
PENDAHULUAN R-APBN 2019 DAN SIKLUS APBN INDUK 2019

### Testimoni:

Presentasi yang disampaikan sudah baik,  
dan alangkah lebih baik jika data mengenai Dana Desa  
juga ditambahkan Daerah yang menjadi contoh berhasil  
atau tidaknya program Dana Desa  
terhadap kemiskinan.

TTD,  
  
Ariy H.

## LEMBAR TESTIMONI

Nama : Eko Adityo Ananto, S.E.  
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/198808102018031001  
Judul Kegiatan Aktualisasi : OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT SIKLUS PEMBICARAAN  
PENDAHULUAN R-APBN 2019 DAN SIKLUS APBN INDUK 2019

Testimoni: Presentasi Saudara Eko sangat baik. Analisis yg dilakukan  
padat dan berisi sangat membantu kami dalam memahami data @  
data serta informasi RAPBN 2019 dan siklus APBD.  
Pertahankan! Tingkatkan Analisis agar lebih  
baik lagi.

TTD,








**Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor**

**Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat  
Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan  
Siklus APBN Induk 2019**

Nama Peserta	:	Eko Adityo Ananto,S.E.
NIP	:	19880810 201803 1 001
Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Jabatan	:	Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu	:	Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk
Siklus ARC	:	Pembicaraan Pendahuluan
Judul	:	Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019



1) Kegiatan 1 : Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)

<b>Penyelesaian Kegiatan : 27 Mei-28 Mei 2018</b>	<b>Catatan Mentor</b>		<b>Paraf Mentor</b>
Tahapan Kegiatan - Mencari referensi dari analisis terdahulu; - Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor; - Berdiskusi dengan Kapus PKA			
	<b>Penjelasan</b>	<b>Catatan Mentor</b>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Draft Format Analisis ; - Notulensi rapat; - Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Melakukan perencanaan dengan matang dan seksama ( <b>Komitmen Mutu</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		



Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perencanaan yang matang (<b>Akuntabel</b>);</li> <li>-Sungguh-sungguh menjalankan tugas (<b>Profesional</b>).</li> </ul>		
----------------------------	--	--	---




2) Kegiatan 2 : Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 30 Mei 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; - Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN yang lain.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Database</i> referensi; - Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan penguatan teori yang dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		


3) Kegiatan 3 : Melakukan Pengumpulan Data (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 30 Mei-31 Mei 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar;</li> <li>- Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 2019 ;</li> <li>- Mencari data pembanding dari sumber lain (opsional) ;</li> <li>- Berkoordinasi dengan Mentor.</li> </ul>			
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<p><b>Penjelasan</b></p>	<p><b>Catatan Mentor</b></p>	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen data terkait indikator asumsi ekonomi makro yang dibicarakan pemerintah dan DPR;</li> <li>- Dokumen data pembanding dari sumber lain (opsional).</li> </ul>		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		





Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan (<b>Akuntabel</b>);</li><li>-Sungguh-sungguh menjalankan tugas (<b>Profesional</b>).</li></ul>		
----------------------------	--	--	---

4) Kegiatan 4 : Melakukan Olah Data (Do)



Penyelesaian Kegiatan : 1 Juni- 3 Juni 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang mengacu pada dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar ; - Melakukan olah data dengan aplikasi pengolah data; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Rekapitulasi dalam bentuk excel; - Kertas kerja hasil pengolahan data dari semua indikator.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pengolahan data yang dilakukan secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> )		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		



5) Kegiatan 5 : Melakukan Analisis



Penyelesaian Kegiatan : 4 Juni 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 ; - Merancang infografis; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Draft analisis sementara; - Rancangan infografis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias <b>(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas);</b> - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan <b>(Etika Publik).</b>		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan <b>(Akuntabel);</b> -Sungguh-sungguh menjalankan tugas <b>(Profesional).</b>		

6) Kegiatan 6 : Evaluasi dan Koreksi (Check)

Penyelesaian Kegiatan : 5 Juni 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengirimkan <i>draft</i> ARC sementara tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 kepada Koordinator Bidang Asumsi Ekonomi Makro/Mentor; - Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis; - Melakukan koreksi bersama-sama.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Hasil analisis final (dokumen); - Notulensi rapat.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		



7) Kegiatan 7 : Finalisasi Analisis (Act)


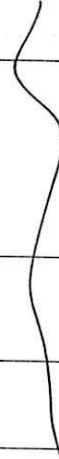
Penyelesaian Kegiatan : 20 Juni 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Menyerahkan hasil analisis final kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran; - Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen; - Upload hasil ARC di website; - Membuat form feedback kepada Pimpinan Banggar sebagai langkah evaluasi untuk kedepannya.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen Analisis Ringkas Cepat (ARC); - <i>Softfile</i> Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke website; - <i>Form Feedback</i> .		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

**Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor**


**Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat  
Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan  
Siklus APBN Induk 2019**

Nama Peserta	:	Eko Adityo Ananto,S.E.
NIP	:	19880810 201803 1 001
Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Jabatan	:	Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu	:	Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk
Siklus ARC	:	Pembicaraan Pendahuluan
Judul	:	Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah


1) Kegiatan 1 : Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)

<b>Penyelesaian Kegiatan : 27 Mei-28 Mei 2018</b>	<b>Catatan Mentor</b>		<b>Paraf Mentor</b>
Tahapan Kegiatan - Mencari referensi dari analisis terdahulu; - Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor; - Berdiskusi dengan Kapus PKA			
	<b>Penjelasan</b>	<b>Catatan Mentor</b>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Draft Format Analisis ; - Notulensi rapat; - Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Melakukan perencanaan dengan matang dan seksama ( <b>Komitmen Mutu</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		





Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>-Perencanaan yang matang (<b>Akuntabel</b>);</li><li>-Sungguh-sungguh menjalankan tugas (<b>Profesional</b>).</li></ul>		
----------------------------	---	--	---


2) Kegiatan 2 : Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 21 Juni 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; - Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analisis APBN yang lain.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Database</i> referensi; - Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan penguatan teori yang dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		





3) Kegiatan 3 : Melakukan Pengumpulan Data (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 22 Juni-23 Juni 2018		Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar; - Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 2019 ; - Mencari data pembandingan dari sumber lain (opsional) ; - Berkoordinasi dengan Mentor.				
		Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu		- Dokumen data terkait indikator asumsi ekonomi makro yang dibicarakan pemerintah dan DPR; - Dokumen data pembandingan dari sumber lain (opsional).		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		- Pencatatan data secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Koordinasi dan kerjasama dengan Sekretariat Badan Anggaran ( <i>Whole of Government</i> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		


<p>Penguatan Nilai Organisasi</p>	<p>-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel);          -Sungguh-sungguh menjalankan tugas (Profesional).</p>		
-----------------------------------	--	--	---



4) Kegiatan 4 : Melakukan Olah Data (Do)


Penyelesaian Kegiatan : 24 Juni 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar ; - Melakukan olah data dengan aplikasi pengolah data; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Rekapitulasi dalam bentuk excel; - Kertas kerja hasil pengolahan data dari semua indikator.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pengolahan data yang dilakukan secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias <b>(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas);</b> - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan <b>(Etika Publik)</b>		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan <b>(Akuntabel);</b> -Sungguh-sungguh menjalankan tugas <b>(Profesional).</b>		

5) Kegiatan 5 : Melakukan Analisis



Penyelesaian Kegiatan : 24 Juni 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 ; - Merancang infografis; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Draft</i> analisis sementara; - Rancangan infografis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		



6) Kegiatan 6 : Evaluasi dan Koreksi (Check)

Penyelesaian Kegiatan : 25 Juni-2 Juli 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengirimkan <i>draft</i> ARC sementara; - Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis; - Melakukan koreksi bersama-sama.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Hasil analisis final (dokumen); - Notulensi rapat.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias <b>(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas)</b> ; - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan <b>(Etika Publik)</b> .		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan <b>(Akuntabel)</b> ; -Sungguh-sungguh menjalankan tugas <b>(Profesional)</b>		

7) Kegiatan 7 : Finalisasi Analisis (Act)

Penyelesaian Kegiatan : 3 Juli-8 Juli 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Menyerahkan hasil analisis final kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran; - Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen; - Upload hasil ARC di website; - Membuat form feedback kepada Pimpinan Banggar sebagai langkah evaluasi untuk kedepannya.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen Analisis Ringkas Cepat (ARC); - <i>Softfile</i> Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke website; - <i>Form Feedback</i> .		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		






**Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor**

**Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat  
Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan  
Siklus APBN Induk 2019**

Nama Peserta	:	Eko Adityo Ananto,S.E.
NIP	:	19880810 201803 1 001
Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Jabatan	:	Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu	:	Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk
Siklus ARC	:	Pembicaraan Pendahuluan
Judul	:	Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Petani


1) Kegiatan 1 : Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)

<b>Penyelesaian Kegiatan : 27 Mei-28 Mei 2018</b>	<b>Catatan Mentor</b>		<b>Paraf Mentor</b>
Tahapan Kegiatan - Mencari referensi dari analisis terdahulu; - Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor; - Berdiskusi dengan Kapus PKA			
	<b>Penjelasan</b>	<b>Catatan Mentor</b>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Draft Format Analisis ; - Notulensi rapat; - Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Melakukan perencanaan dengan matang dan seksama ( <b>Komitmen Mutu</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		


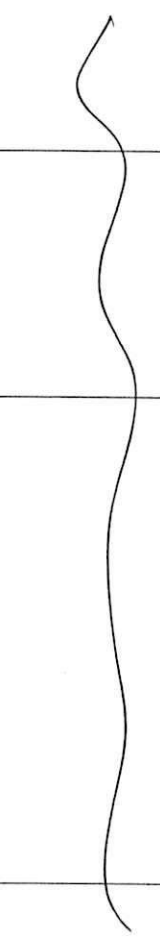
Penguatan Nilai Organisasi	-Perencanaan yang matang ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		
----------------------------	--	--	---




2) Kegiatan 2 : Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 11 Juli 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; - Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN yang lain.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Database</i> referensi; - Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan penguatan teori yang dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		


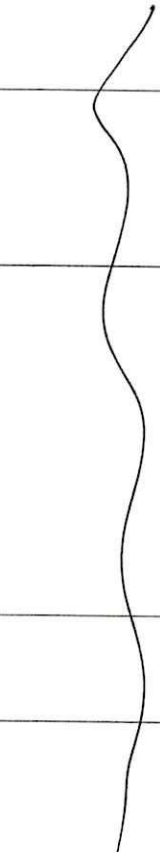
3) Kegiatan 3 : Melakukan Pengumpulan Data (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 2 Juli-14 Juli 2018		Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar; - Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 2019 ; - Mencari data pembandingan dari sumber lain (opsional) ; - Berkoordinasi dengan Mentor.				
		Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen data terkait indikator asumsi ekonomi makro yang dibicarakan pemerintah dan DPR; - Dokumen data pembandingan dari sumber lain (opsional).			
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pencatatan data secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Koordinasi dan kerjasama dengan Sekretariat Badan Anggaran ( <i>Whole of Government</i> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).			
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.			





Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas (Profesional).		
----------------------------	---	--	---

4) Kegiatan 4 : Melakukan Olah Data (Do)


Penyelesaian Kegiatan : 12 Juli-14 Juli 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 di Banggar ; - Melakukan olah data dengan aplikasi pengolah data; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Rekapitulasi dalam bentuk excel; - Kertas kerja hasil pengolahan data dari semua indikator.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pengolahan data yang dilakukan secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> )		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		





5) Kegiatan 5 : Melakukan Analisis

Penyelesaian Kegiatan : 15 Juli-18 Juli 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2019 ; - Merancang infografis; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Draft</i> analisis sementara; - Rancangan infografis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias <b>(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas)</b> ; - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan <b>(Etika Publik)</b> .		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan <b>(Akuntabel)</b> ; -Sungguh-sungguh menjalankan tugas <b>(Profesional)</b> .		

6) Kegiatan 6 : Evaluasi dan Koreksi (Check)

Penyelesaian Kegiatan : 19 Juli-28 Juli 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengirimkan <i>draft</i> ARC sementara; - Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis; - Melakukan koreksi bersama-sama.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Hasil analisis final (dokumen); - Notulensi rapat.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

7) Kegiatan 7 : Finalisasi Analisis (Act)

Penyelesaian Kegiatan : 29 Juli 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Menyerahkan hasil analisis final kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran; - Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen; - Upload hasil ARC di website; - Membuat form feedback kepada Pimpinan Banggar sebagai langkah evaluasi untuk kedepannya.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen Analisis Ringkas Cepat (ARC); - <i>Softfile</i> Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke website; - <i>Form Feedback</i> .		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		


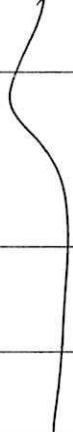



**Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor**

**Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat  
Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan  
Siklus APBN Induk 2019**



Nama Peserta	:	Eko Adityo Ananto,S.E.
NIP	:	19880810 201803 1 001
Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Jabatan	:	Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu	:	Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk
Siklus ARC	:	APBN Induk
Judul	:	Fokus Pada Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Sumber Devisa

1) Kegiatan 1 : Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)

Penyelesaian Kegiatan : 27 Mei-28 Mei 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari referensi dari analisis terdahulu;</li> <li>- Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor;</li> <li>- Berdiskusi dengan Kapus PKA</li> </ul>	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft Format Analisis ;</li> <li>- Notulensi rapat;</li> <li>- Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus.</li> </ul>		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Melakukan perencanaan dengan matang dan seksama ( <b>Komitmen Mutu</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		



<p>Penguatan Nilai Organisasi</p>	<p>-Perencanaan yang matang <b>(Akuntabel)</b>; -Sungguh-sungguh menjalankan tugas <b>(Profesional)</b>.</p>		
-----------------------------------	--	--	---


2) Kegiatan 2 : Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 4 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; - Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN yang lain.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Database</i> referensi; - Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan penguatan teori yang dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> )		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		


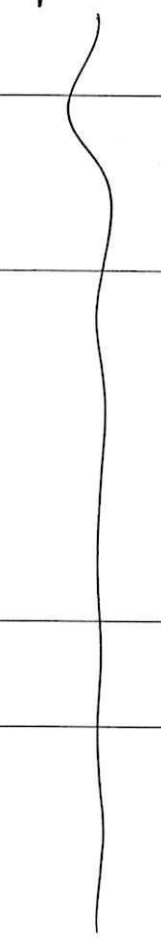


3) Kegiatan 3 : Melakukan Pengumpulan Data (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 4-10 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus APBN Induk; - Mencari data pembanding dari sumber lain (opsional) ; - Berkoordinasi dengan Mentor.			
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<b>Penjelasan</b>	<b>Catatan Mentor</b>	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Dokumen data terkait pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 ; - Dokumen data pembanding dari sumber lain (opsional).  - Pencatatan data secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Koordinasi dan kerjasama dengan Sekretariat Badan Anggaran ( <i>Whole of Government</i> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		



<p>Penguatan Nilai Organisasi</p>	<p>-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel);          -Sungguh-sungguh menjalankan tugas (Profesional).</p>		
-----------------------------------	--	--	---

4) Kegiatan 4 : Melakukan Olah Data (Do)


Penyelesaian Kegiatan : 17 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Melakukan olah data dengan aplikasi pengolah data; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Rekapitulasi dalam bentuk excel; - Kertas kerja hasil pengolahan data dari semua indikator.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pengolahan data yang dilakukan secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> )		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		





5) Kegiatan 5 : Melakukan Analisis

Penyelesaian Kegiatan : 17 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Merancang infografis; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Draft</i> analisis sementara; - Rancangan infografis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

6) Kegiatan 6 : Evaluasi dan Koreksi (Check)

Penyelesaian Kegiatan : 17 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengirimkan <i>draft</i> ARC sementara; - Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis; - Melakukan koreksi bersama-sama.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Hasil analisis final (dokumen); - Notulensi rapat.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

7) Kegiatan 7 : Finalisasi Analisis (Act)

Penyelesaian Kegiatan : 26 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Menyerahkan hasil analisis final dan infografis kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran; - Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen; - Upload hasil ARC di website; - Membuat form feedback kepada Pimpinan Banggar sebagai langkah evaluasi untuk kedepannya.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen Analisis Ringkas Cepat (ARC); - <i>Softfile</i> Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke website; - <i>Form Feedback</i> .	28 September 29 September	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		


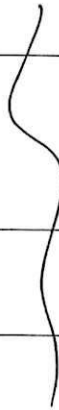



**Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor**

**Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat  
Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan  
Siklus APBN Induk 2019**



Nama Peserta	:	Eko Adityo Ananto,S.E.
NIP	:	19880810 201803 1 001
Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Jabatan	:	Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu	:	Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk
Siklus ARC	:	APBN Induk
Judul	:	Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas

1) Kegiatan 1 : Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)

<b>Penyelesaian Kegiatan : 27 Mei-28 Mei 2018</b>	<b>Catatan Mentor</b>		<b>Paraf Mentor</b>
Tahapan Kegiatan - Mencari referensi dari analisis terdahulu; - Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor; - Berdiskusi dengan Kapus PKA			
	<b>Penjelasan</b>	<b>Catatan Mentor</b>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Draft Format Analisis ; - Notulensi rapat; - Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Melakukan perencanaan dengan matang dan seksama ( <b>Komitmen Mutu</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		



Penguatan Nilai Organisasi	-Perencanaan yang matang (Akuntabel); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas (Profesional).		
----------------------------	--	--	---


2) Kegiatan 2 : Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 4 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; - Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analisis APBN yang lain.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Database</i> referensi; - Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan penguatan teori yang dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		





3) Kegiatan 3 : Melakukan Pengumpulan Data (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 4-10 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar;</li> <li>- Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus APBN Induk;</li> <li>- Mencari data pembanding dari sumber lain (opsional) ;</li> <li>- Berkoordinasi dengan Mentor.</li> </ul>			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen data terkait pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 ;</li> <li>- Dokumen data pembanding dari sumber lain (opsional).</li> </ul>		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan data secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias <b>(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas)</b>;</li> <li>- Koordinasi dan kerjasama dengan Sekretariat Badan Anggaran (<i>Whole of Government</i>);</li> <li>- Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan <b>(Etika Publik)</b>.</li> </ul>		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		



<p>Penguatan Nilai Organisasi</p>	<p>-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan (<b>Akuntabel</b>);          -Sungguh-sungguh menjalankan tugas (<b>Profesional</b>).</p>		
-----------------------------------	--	--	---

4) Kegiatan 4 : Melakukan Olah Data (Do)



Penyelesaian Kegiatan : 17 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Melakukan olah data dengan aplikasi pengolah data; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Rekapitulasi dalam bentuk excel; - Kertas kerja hasil pengolahan data dari semua indikator.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pengolahan data yang dilakukan secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> )		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		





5) Kegiatan 5 : Melakukan Analisis

Penyelesaian Kegiatan : 17 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Merancang infografis; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Draft</i> analisis sementara; - Rancangan infografis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

6) Kegiatan 6 : Evaluasi dan Koreksi (Check)

Penyelesaian Kegiatan : 17 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengirimkan <i>draft</i> ARC sementara; - Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis; - Melakukan koreksi bersama-sama.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Hasil analisis final (dokumen); - Notulensi rapat.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

7) Kegiatan 7 : Finalisasi Analisis (Act)

Penyelesaian Kegiatan : 25 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Menyerahkan hasil analisis final dan infografis kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran; - Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen; - Upload hasil ARC di website; - Membuat form feedback kepada Pimpinan Banggar sebagai langkah evaluasi untuk kedepannya.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen Analisis Ringkas Cepat (ARC); - <i>Softfile</i> Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke website; - <i>Form Feedback</i> .	28 September 29 September	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		





**Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor**

**Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat  
Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan  
Siklus APBN Induk 2019**


Nama Peserta	:	Eko Adityo Ananto,S.E.
NIP	:	19880810 201803 1 001
Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Jabatan	:	Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu	:	Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk
Siklus ARC	:	APBN Induk
Judul	:	Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel

1) Kegiatan 1 : Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)

<b>Penyelesaian Kegiatan : 27 Mei-28 Mei 2018</b>	<b>Catatan Mentor</b>		<b>Paraf Mentor</b>
Tahapan Kegiatan - Mencari referensi dari analisis terdahulu; - Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor; - Berdiskusi dengan Kapus PKA			
	<b>Penjelasan</b>	<b>Catatan Mentor</b>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Draft Format Analisis ; - Notulensi rapat; - Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Melakukan perencanaan dengan matang dan seksama ( <b>Komitmen Mutu</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		



Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>-Perencanaan yang matang (<b>Akuntabel</b>);</li><li>-Sungguh-sungguh menjalankan tugas (<b>Profesional</b>).</li></ul>			
----------------------------	---	--	--	---


2) Kegiatan 2 : Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 20 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; - Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN yang lain.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Database</i> referensi; - Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan penguatan teori yang dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		





3) Kegiatan 3 : Melakukan Pengumpulan Data (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 20 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar;</li> <li>- Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus APBN Induk;</li> <li>- Mencari data pembanding dari sumber lain (opsional) ;</li> <li>- Berkoordinasi dengan Mentor.</li> </ul>			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen data terkait pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 ;</li> <li>- Dokumen data pembanding dari sumber lain (opsional).</li> </ul>		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan data secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias (<b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b>);</li> <li>- Koordinasi dan kerjasama dengan Sekretariat Badan Anggaran (<i>Whole of Government</i>);</li> <li>- Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan (<b>Etika Publik</b>).</li> </ul>		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		



Penguatan Nilai Organisasi	<p>-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan (<b>Akuntabel</b>);</p> <p>-Sungguh-sungguh menjalankan tugas (<b>Profesional</b>).</p>		
----------------------------	--	--	---

4) Kegiatan 4 : Melakukan Olah Data (Do)



Penyelesaian Kegiatan : 22 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Melakukan olah data dengan aplikasi pengolah data; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Rekapitulasi dalam bentuk excel; - Kertas kerja hasil pengolahan data dari semua indikator.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pengolahan data yang dilakukan secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> )		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		





5) Kegiatan 5 : Melakukan Analisis

Penyelesaian Kegiatan : 22 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Merancang infografis; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Draft</i> analisis sementara; - Rancangan infografis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

6) Kegiatan 6 : Evaluasi dan Koreksi (Check)

Penyelesaian Kegiatan : 24 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengirimkan <i>draft</i> ARC sementara; - Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis; - Melakukan koreksi bersama-sama.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Hasil analisis final (dokumen); - Notulensi rapat.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

7) Kegiatan 7 : Finalisasi Analisis (Act)

Penyelesaian Kegiatan : 26 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Menyerahkan hasil analisis final dan infografis kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran; - Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen; - Upload hasil ARC di website; - Membuat form feedback kepada Pimpinan Banggar sebagai langkah evaluasi untuk kedepannya.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen Analisis Ringkas Cepat (ARC); - <i>Softfile</i> Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke website; - <i>Form Feedback</i> .	28 September 28 September	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		


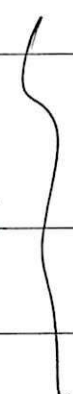



**Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor**

**Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat  
Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan  
Siklus APBN Induk 2019**



Nama Peserta	:	Eko Adityo Ananto,S.E.
NIP	:	19880810 201803 1 001
Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Jabatan	:	Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu	:	Belum Komprehensifnya Analisis Ringkas Cepat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Siklus APBN Induk
Siklus ARC	:	APBN Induk
Judul	:	Analisis Singkat PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia

1) Kegiatan 1 : Menyamakan Persepsi Terkait Format Analisis (Plan)

<b>Penyelesaian Kegiatan : 27 Mei-28 Mei 2018</b>	<b>Catatan Mentor</b>		<b>Paraf Mentor</b>
Tahapan Kegiatan - Mencari referensi dari analisis terdahulu; - Berdiskusi dengan Koordinator Bidang/Mentor; - Berdiskusi dengan Kapus PKA			
	<b>Penjelasan</b>	<b>Catatan Mentor</b>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Draft Format Analisis ; - Notulensi rapat; - Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Melakukan perencanaan dengan matang dan seksama ( <b>Komitmen Mutu</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		



Penguatan Nilai Organisasi	-Perencanaan yang matang ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		
----------------------------	--	--	---


2) Kegiatan 2 : Melakukan Pendalaman Teori Analisis (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 20 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengumpulkan referensi dari Jurnal, Karya Tulis Ilmiah dan <i>Report</i> dari Lembaga Internasional; - Melakukan diskusi dengan Mentor dan Analis APBN yang lain.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Database</i> referensi; - Catatan kerangka berpikir ( <i>framework</i> ) analisis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan penguatan teori yang dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		





3) Kegiatan 3 : Melakukan Pengumpulan Data (Do)

Penyelesaian Kegiatan : 20 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengikuti rapat dan mencatat data-data dari hasil rapat yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Mencari data terkait isu ekonomi di luar pembicaraan di Banggar untuk ARC siklus APBN Induk; - Mencari data pembanding dari sumber lain (opsional) ; - Berkoordinasi dengan Mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen data terkait pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 ; - Dokumen data pembanding dari sumber lain (opsional).		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pencatatan data secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Koordinasi dan kerjasama dengan Sekretariat Badan Anggaran ( <i>Whole of Government</i> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		



Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan (<b>Akuntabel</b>);</li><li>-Sungguh-sungguh menjalankan tugas (<b>Profesional</b>).</li></ul>		
----------------------------	--	--	---

4) Kegiatan 4 : Melakukan Olah Data (Do)



Penyelesaian Kegiatan : 23 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Rekapitulasi dan verifikasi data untuk ARC yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Melakukan olah data dengan aplikasi pengolah data; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Rekapitulasi dalam bentuk excel; - Kertas kerja hasil pengolahan data dari semua indikator.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pengolahan data yang dilakukan secara teliti dan seksama agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias <b>(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas);</b> - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan <b>(Etika Publik)</b>		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan <b>(Akuntabel);</b> -Sungguh-sungguh menjalankan tugas <b>(Profesional).</b>		





5) Kegiatan 5 : Melakukan Analisis

Penyelesaian Kegiatan : 23 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mendeskripsikan hipotesis dari sinkronisasi olah data dengan teori terkait hasil rapat Banggar RAPBN K/L/BUMN 2019 di Banggar; - Merancang infografis; - Berkonsultasi dengan mentor.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Draft analisis sementara; - Rancangan infografis.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

6) Kegiatan 6 : Evaluasi dan Koreksi (Check)

Penyelesaian Kegiatan : 24 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Mengirimkan <i>draft</i> ARC sementara; - Rapat internal untuk pengendalian mutu hasil analisis; - Melakukan koreksi bersama-sama.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Hasil analisis final (dokumen); - Notulensi rapat.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggung jawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		

7) Kegiatan 7 : Finalisasi Analisis (Act)

Penyelesaian Kegiatan : 26 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan - Menyerahkan hasil analisis final dan infografis kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran; - Apabila sudah disetujui, akan dilakukan pencetakan dokumen; - Upload hasil ARC di website; - Membuat form feedback kepada Pimpinan Banggar sebagai langkah evaluasi untuk kedepannya.			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen Analisis Ringkas Cepat (ARC); - <i>Softfile</i> Analisis Ringkas Cepat yang diupload ke website; - <i>Form Feedback</i> .	28 September 28 September	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Hasil Analisis dilakukan dengan seksama, profesional dan berorientasi kepada kualitas agar menghasilkan kajian yang valid dan tidak bias ( <b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b> ); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan ( <b>Etika Publik</b> ).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	-Persiapan yang matang dan seksama agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan ( <b>Akuntabel</b> ); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas ( <b>Profesional</b> ).		